PT PLN (PERSERO)

PERATURAN PELAKSANA PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0008 .SPo/DIR/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PELAKSANA PT PLN (PERSERO) NOMOR 0002.SPO/DIR/2025 TENTANG STANDAR PROSEDUR TATA USAHA KONSUMEN PRABAYAR DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKTUR PT PLN (PERSERO)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan konsumen prabayar, telah diterbitkan Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi perhitungan pemakaian listrik konsumen prabayar, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero).

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang ...

Paraf

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
16. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);

17. Keputusan ...

Paraf

17. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-159/MBU/06/2025 dan Nomor SK.017/DI-DAM/DO/2025 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
18. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (LPT) Tahun Buku 2025 PT PLN (Persero) yang dimuat dalam Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH Nomor 44 Tahun 2026;
19. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
20. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0012.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Tata Kelola Niaga dan Pelayanan Konsumen PT PLN (Persero);
21. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0049.P/DIR/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero);
22. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Pedoman Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANA PT PLN (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PELAKSANA PT PLN (PERSERO) NOMOR 0002.SPO/DIR/2025 TENTANG STANDAR PROSEDUR TATA USAHA KONSUMEN PRABAYAR DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ...

Paraf

PLN

Pasal 1
Pengertian

Dalam Peraturan Pelaksana ini, yang dimaksud dengan:

1. Aktivasi DIL adalah proses administrasi atas DIL pada sistem aplikasi untuk mengesahkan perubahan status Konsumen.
2. Aktivasi Induk Langganan, yang selanjutnya disingkat AIL, adalah arsip yang berisi data permohonan Konsumen, mulai dari PB, PD, hingga permohonan pelayanan lainnya.
3. Alat Pembatas dan Pengukur, yang selanjutnya disingkat APP, adalah alat milik PLN yang terdiri dari Alat Pembatas dan Alat Pengukur.
4. Amendemen adalah perubahan dokumen perjanjian ataupun dokumen resmi lainnya.
5. Aplikasi Digital Arsip Induk Langganan adalah aplikasi yang digunakan untuk mendokumentasikan DIL dan dokumen transaksi pelayanan dalam bentuk dokumen digital yang berbasis *web-based.*
6. Aplikasi Pelayanan Konsumen adalah perangkat lunak aplikasi yang bersifat standar dan terpusat yang diimplementasikan dan dioperasikan di seluruh Unit PLN dengan mengacu kepada proses bisnis penatausahaan Konsumen PLN dan peraturan lain yang ditetapkan oleh PLN dan Pemerintah.
7. Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT), yang selanjutnya disebut Aplikasi Pengaduan, adalah aplikasi standar yang digunakan oleh seluruh Unit PLN untuk mengelola pengaduan Konsumen baik yang disampaikan melalui PLN 123, loket pengaduan PLN, ataupun media lainnya.
8. Arus RMS adalah nilai *Root Mean Square* (RMS), arus listrik AC yang terukur dari nilai positif ke nilai negatif.
9. Arus Phasa adalah nilai arus dalam ampere yang terukur pada sisi phasa.
10. Arus Netral adalah besaran arus dalam ampere yang terukur pada sisi netral.
11. Aset Tetap Tidak Beroperasi Siaga, yang selanjutnya disebut ATTB Siaga, adalah aset tetap eks bongkar dengan kondisi fisik baik dan siap dioperasikan guna menjaga keandalan sistem kelistrikan.
12. Bencana Alam atau Kondisi Darurat (*Force Majeure)* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak dalam perjanjian/kontrak, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan tidak disebabkan kesengajaan/kelalaian para pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

13. Berita ...

Paraf

13. Berita Acara, yang selanjutnya disingkat BA, adalah naskah dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status, dan lain-lain bagi suatu permasalahan, baik berupa perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan.

14. Biaya Penyambungan adalah biaya yang dibayar Konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik atau penambahan daya.

15. *Clear Tamper Condition*/*Clear Tamper Token*, yang selanjutnya disingkat CTT, adalah Token untuk menormalkan kembali dalam hal Meter Prabayar dalam kondisi *tampering* (*Clear Tamper Token*-1, *Clear Tamper Token*-2).

16. *Clear Credit Token*, yang selanjutnya disingkat CCT, adalah Token untuk menghapus sisa kWh pada Meter Prabayar.

17. *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) adalah Token yang berfungsi untuk menambah *credit* kWh ke dalam Meter Prabayar.

18. Daftar Langganan Prabayar Perlu Diperhatikan, yang selanjutnya disingkat sebagai DLPPD, adalah daftar Konsumen yang perlu diperhatikan karena perhitungan pemakaian dan/atau pembelian Token listriknya dianggap tidak wajar.

19. Daftar Piutang Konsumen, yang selanjutnya disingkat DPK, adalah daftar yang mencatat semua aktivitas penagihan untuk suatu periode, termasuk jumlah yang terutang oleh Konsumen.

20. Data Induk Langganan, yang selanjutnya disingkat DIL, adalah himpunan seluruh data dan informasi mengenai Konsumen PLN yang berkaitan dengan proses jual beli Tenaga Listrik, dan terekam pada Aplikasi Pelayanan Konsumen dalam bentuk data komputer.

21. Denominasi Token adalah pengelompokan pecahan Token sesuai tarif daya Konsumen berdasarkan pendekatan pemakaian rata-rata per bulan dalam periode satu tahun.

22. General Manager adalah jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Direktur atau Executive Vice President yang memimpin, membina, dan mengelola Unit Induk atau Pusat-Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur atau Executive Vice President.

23. Generator Token adalah suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi Token.

24. Identitas Pelanggan, yang selanjutnya disebut IDPEL, adalah kode pengenal yang bersifat numerik dan unik untuk membedakan Sambungan Tenaga Listrik yang satu dengan yang lainnya, dan diberikan saat pertama kali terdaftar sebagai Konsumen di Unit Layanan PLN di mana Sambungan Tenaga Listriknya dilayani, serta bersifat tetap dan tidak akan berubah seterusnya.

25. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki lingkungan kerja di wilayah tertentu.

26. Jam ...

Paraf

26. Jam Nyala, yang selanjutnya disingkat JN, adalah gambaran waktu pemanfaatan energi listrik oleh Konsumen dalam 1 (satu) bulan yang dihitung dengan formula pemakaian energi listrik (dalam satuan kWh) dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan Daya Tersambung (dalam satuan kVA).

27. Jaminan Langganan Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut JL, adalah jaminan berupa uang atau bank garansi yang dikeluarkan oleh perbankan nasional atas pemakaian daya energi listrik selama menjadi Konsumen.

28. Jaringan Tenaga Listrik, yang selanjutnya disingkat JTL, adalah Jaringan Tenaga Listrik milik PLN yang dioperasikan dengan Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM), Tegangan Tinggi (TT), atau Tegangan Ekstra Tinggi (TET).

29. Jaringan Tegangan Menengah, yang selanjutnya disingkat JTM, adalah JTL yang dioperasikan PLN dengan Tegangan Menengah (TM) yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya.

30. Jaringan Tegangan Rendah, yang selanjutnya disingkat JTR, adalah JTL yang dioperasikan PLN dengan Tegangan Rendah (TR) yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya.

31. Kantor Pusat adalah induk organisasi PLN.

32. *Key Change Token* (*Key Change Token*-1 dan *Key Change Token*-2), yang selanjutnya disingkat KCT, adalah kode khusus yang terdiri dari kombinasi angka yang berfungsi untuk melakukan perubahan "*key*" pada Meter Prabayar, antara lain *Supply Group Code, Key Revision Number*, *Tariff Index.*

33. *Key Revision Number,* yang selanjutnya disingkat KRN, adalah fungsi untuk melakukan perubahan kode atau "*key*" yang merepresentasikan generasi suatu Token.

34. Kode Kedudukan, yang selanjutnya disebut KDDK, adalah serangkaian huruf dan angka yang mewakili kedudukan Persil Konsumen.

35. Kompensasi adalah penggantian atas pemakaian tenaga listrik berupa pemotongan kWh pembelian Token atau pengurangan Tagihan Listrik.

36. Konsumen adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli atau memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah.

37. Konsumen Prabayar adalah Konsumen yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN dengan transaksi pembayaran di muka sebelum tenaga listrik digunakan.

38. Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disingkat KHS, adalah perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume total pekerjaan masih bersifat perkiraan.

39. kWh ...

Paraf

39. kWh *Minus* adalah pengukuran yang terjadi dikarenakan relai gagal atau tidak dapat membuka dan meter akan menampilkan teks "Err202", indikator LED kuning berkedip, *buzzer* berbunyi, dan *backlight* layar berkedip.

40. Laporan Bulanan Kelainan Prabayar, yang selanjutnya disingkat LBKP, adalah laporan atas kelainan Meter Prabayar yang dilaporkan setiap bulan.

41. Layanan Pascabayar adalah layanan penjualan tenaga listrik yang diberikan kepada Konsumen Pascabayar.

42. Layanan Prabayar adalah layanan penjualan tenaga listrik yang diberikan kepada Konsumen Prabayar.

43. Listrik Prabayar adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik prabayar dengan cara membeli terlebih dahulu energi listrik yang hendak digunakan sehingga pada prinsipnya layanan Listrik Prabayar tidak mengenal piutang.

44. *Managed Service* adalah skema layanan penyediaan material dan/atau jasa oleh penyedia layanan yang diatur dalam suatu perjanjian kerja sama pada periode tertentu.

45. Meter Prabayar, yang selanjutnya disebut MPB, adalah alat pengukur yang dapat dioperasikan dan dikendalikan untuk mengalirkan energi listrik sesuai dengan sistem pembayaran yang disepakati antara PLN dan Konsumen Prabayar.

46. MPB Siaga adalah kWh meter pengganti yang digunakan untuk mengukur energi selama pemasangan sementara sesuai dengan tarif dan daya.

47. Nomor Meter adalah kode identitas yang tertera pada Alat Pembatas dan Pengukur.

48. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas yang terdiri dari 16 (enam belas) digit bersifat unik, tunggal, dan melekat yang pada setiap warga negara Indonesia.

49. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah identitas pelaku usaha terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka yang dilengkapi dengan pengaman dan tanda tangan elektronik.

50. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

51. Nomor Register adalah kode pembayaran yang dikeluarkan oleh sistem PLN yang hanya berisikan biaya PLN.

52. *Optical Probe* adalah perangkat media komunikasi yang digunakan untuk pengambilan data secara langsung (*direct connect*) pada Meter Prabayar menggunakan *software* dari pabrikan meter.

53. Pelayanan ...

Paraf

53. Pelayanan Teknik, yang selanjutnya disebut Yantek, adalah suatu program dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan, keandalan, efisiensi, dan kualitas pendistribusian energi listrik kepada Konsumen.

54. Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau badan yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN, baik sebagai Konsumen maupun non Konsumen.

55. Pembayaran Terpusat adalah sistem pembayaran rekening listrik secara terpusat untuk lebih dari 1 (satu) IDPEL yang memiliki lokasi dan Unit Induk yang berbeda, serta diperuntukkan untuk Instansi Pemerintah yang memiliki satuan kerja tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan anggarannya berada di kantor pusatnya, di mana alur prosesnya melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dananya masuk ke 1 (satu) *Virtual Account* (VA) yang sudah ditentukan oleh PLN.

56. Pembongkaran Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi milik Konsumen dengan mengambil seluruh peralatan milik PLN yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi milik Konsumen.

57. Pemeriksaan MPB adalah aktivitas pengecekan kondisi fisik Meter Prabayar dan tampilan indikator pada *display* meter.

58. Pemohon adalah semua pihak yang melakukan permohonan layanan meliputi Konsumen/non Konsumen dan/atau penerima surat kuasa.

59. Pemutusan Sementara adalah adalah penghentian penyaluran Tenaga Listrik ke instalasi milik Konsumen untuk sementara.

60. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut P2TL, adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis, dan/atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan/atau instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.

61. Penyalaan adalah proses menyalurkan listrik ke instalasi Persil/bangunan Pemakai Tenaga Listrik.

62. Penyambungan Baru, yang selanjutnya disingkat PB, adalah proses pengajuan sambungan baru tenaga listrik oleh calon Konsumen mulai pendaftaran sampai dengan penyambungan listrik pada Persil/bangunan calon Konsumen.

63. Penyambungan Kembali adalah proses pengajuan sambungan kembali tenaga listrik oleh calon Konsumen yang telah dilakukan aktivasi DIL atas kegiatan Pembongkaran Rampung, mulai pendaftaran sampai dengan penyambungan listrik pada Persil/bangunan calon Konsumen.

64. Penyambungan Sementara, yang selanjutnya disingkat PS, adalah proses pengajuan Sambungan Tenaga Listrik yang bersifat sementara dan terbatas dengan cara, daya, energi, dan jangka waktu tertentu oleh Pemakai Tenaga Listrik.

65. Penyesuaian ...

Paraf

65. Penyesuaian Perhitungan Pemakaian Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut P3TL, adalah penyesuaian perhitungan pemakaian tenaga listrik akibat adanya ketidaksesuaian parameter pengukuran dan Alat Pengukur.

66. Perekaman Data MPB adalah aktivitas pengambilan data pada Meter Prabayar dengan cara memasukkan beberapa S*hort Code* atau menggunakan *Optical Probe*.

67. Perintah Kerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah surat yang diterbitkan sebagai dasar penugasan untuk melaksanakan kegiatan di lapangan.

68. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yang selanjutnya disingkat PJBTL, adalah perjanjian jual beli tenaga listrik yang memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban antara PLN selaku penjual dan Konsumen selaku pembeli.

69. Perubahan Daya, yang selanjutnya disingkat PD, adalah proses pengajuan perubahan daya tenaga listrik oleh Konsumen mulai pendaftaran sampai dengan Konsumen mendapatkan daya listrik baru sesuai yang diajukan.

70. Persil Pemakai Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut Persil, adalah lahan milik Pemakai Tenaga Listrik yang dibatasi dengan batas-batas kepemilikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

71. PLN Unit adalah Unit Induk/Unit Pelaksana/Unit Layanan.

72. PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.

73. Perubahan Data Konsumen, yang selanjutnya disingkat PDK, adalah proses administrasi atas DIL pada sistem aplikasi untuk mengesahkan perubahan status Konsumen.

74. Petugas Pelayanan Teknik, yang selanjutnya disebut Petugas Yantek, adalah petugas yang menangani gangguan dan pemeliharaan jaringan listrik.

75. Petugas Pemeliharaan Meter, yang selanjutnya disebut Petugas Harmet, adalah petugas yang menangani penggantian dan/atau pemeliharaan kWh meter.

76. Piutang adalah seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh Konsumen kepada PLN yang berhubungan dengan proses jual beli tenaga listrik.

77. Piutang Ragu-Ragu, yang selanjutnya disingkat PRR, adalah piutang yang sukar ditagih atau diragukan untuk pembayarannya serta telah dilaksanakan Pembongkaran Rampung aliran tenaga listrik.

78. Re-aktivasi MPB adalah pemanfaatan kembali Meter Prabayar yang sebelumnya gagal digunakan dikarenakan hal tertentu.

79. Restitusi adalah pengembalian uang kepada Konsumen dalam bentuk Token maupun uang tunai.

80. Rute ...

Paraf

80. Rute Pemeriksaan Prabayar, atau yang selanjutnya disingkat RPP, adalah kode yang menunjukkan urutan langkah pemeriksaan meter di lapangan dalam melakukan pemeriksaan meter sesuai dengan jumlah kemampuan pemeriksaan meter seorang pemeriksa meter dalam 1 (satu) hari kerja.

81. Sambungan Rumah, yang selanjutnya disingkat SR, adalah jaringan listrik yang menghubungkan bangunan Konsumen dengan JTR.

82. Sambungan Tenaga Listrik adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN, yang merupakan sambungan antara Jaringan Tenaga Listrik milik PLN dan instalasi milik Konsumen.

83. Sertifikat Laik Operasi, yang selanjutnya disingkat SLO, adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan, yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi teknik.

84. *Set Maximum Power Load/Power Limit* Token, yang selanjutnya disingkat PLT, adalah Token untuk mengatur besarnya daya pada Meter Prabayar dalam satuan Watt/kW.

85. *Set Phase Power Unbalance Limit/Unbalance Limit* Token, yang selanjutnya disingkat ULT, adalah Token untuk memberi batas *unbalance* yang diperbolehkan antara phase R, S, dan T.

86. *Short Code* adalah kode singkat yang terstandardisasi untuk mengetahui parameter dan informasi pada Meter Prabayar.

87. Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat, yang selanjutnya disebut P2APST, adalah suatu sistem pembayaran Tagihan Listrik dan non-Tagihan Listrik melalui *acquirer* serta mitra *acquirer* secara *online real time* per transaksi dan pelimpahan dana dari *account acquirer* ke *account* PLN.

88. Stan Meter adalah angka kedudukan pada APP yang menunjukkan besarnya energi yang telah disalurkan melalui APP tersebut.

89. *Standard Transfer Specification,* yang selanjutnya disingkat STS, adalah standar internasional untuk menghasilkan 20 (dua puluh) digit Token yang sudah disahkan oleh IEC 62055-4.

90. Standar PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut SPLN, adalah peraturan, pedoman, instruksi, cara pengujian, dan spesifikasi teknik yang ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) yang bersifat wajib.

91. Stok adalah barang yang disimpan untuk nantinya digunakan dalam kegiatan operasional.

92. *Supply* ...

Paraf

92. *Supply Group Code*, yang selanjutnya disingkat SGC, adalah kode pengelompokan pasokan yang berfungsi untuk membedakan layanan *vending* berdasarkan area pelayanan sehingga konsumen pada suatu area hanya dapat dilayani oleh sistem *vending* yang sesuai dengan area tersebut dan tidak dapat dilayani oleh *vending* pada area lain, sedangkan PLN menerapkan sistem *single* SGC untuk seluruh wilayah kerja PLN yang berarti seluruh layanan *vending* dilayani melalui satu *Vending System* yang terintegrasi.

93. Surat Izin Persetujuan, yang selanjutnya disingkat SIP, adalah surat yang menyatakan bahwa permohonan Konsumen disetujui oleh PLN.

94. Tagihan Listrik adalah biaya pemakaian tenaga listrik yang harus dibayar oleh Konsumen yang terdiri dari Biaya Beban, Biaya Pemakaian kWh, Biaya Kelebihan kVArh, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pemakaian tenaga listrik.

95. Tagihan Susulan, yang selanjutnya disingkat TS, adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian rekening pemakaian tenaga listrik dengan ketentuan tertentu atau sebagai akibat adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran yang ditemukan saat P3TL atau P2TL.

96. Tanggal Jatuh Tempo, yang selanjutnya disebut Jatuh Tempo, adalah tanggal batas akhir Konsumen wajib melakukan pembayaran, yaitu setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan dan/atau sesuai PJBTL.

97. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh PLN.

98. *Tamper* adalah sebuah aktivitas penginputan Token atau kode pada Meter Prabayar guna menormalkan kondisi Meter Prabayar.

99. *Tariff Index* adalah pengelompokan tarif dan daya untuk membedakan golongan tarif dari STS sebanyak 2 (dua) digit numerik, terdiri dari 01 (satu) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan).

100. Tata Usaha Gudang, yang selanjutnya disingkat TUG, adalah aturan terkait dengan mekanisme material yang berada di gudang PLN.

101. Tingkat Mutu Pelayanan, yang selanjutnya disingkat TMP, adalah suatu ukuran yang menyatakan kualitas layanan PLN kepada Konsumen.

102. Token adalah kode yang dihasilkan oleh *Vending System* yang bersifat numerik dan unik (hanya cocok) untuk nomor serial Meter Prabayar tertentu, dan berfungsi sebagai media untuk mengaktifkan Meter Prabayar atau mengalirkan energi listrik ke Meter Prabayar dengan besaran tertentu.

103. Token Denominasi adalah token selain Token Perdana, yang dibeli oleh Konsumen melalui kanal pembayaran PLN yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu dan dikonversikan secara sistematis menjadi sejumlah kWh (*kilowatt hour*) yang dapat digunakan Konsumen setelah dimasukkan ke dalam MPB.

104. Token ...

Paraf

104. Token *Identifier*, yang selanjutnya disebut TID, adalah 24 (dua puluh empat) *bit field* yang terkandung di dalam Token yang mengidentifikasi tanggal dan waktu dari generasi Token.

105. Token Non Reguler adalah Token yang diterbitkan oleh PLN kepada Konsumen yang berupa Token Kompensasi JL, *free issue* Token, dan Token Kompensasi TMP.

106. Token Perdana adalah Token yang digunakan pertama kali sebesar rata-rata pemakaian per bulan dari Januari sampai dengan November pada tahun lalu.

107. Unit Cubicle Kabel Bergerak, yang selanjutnya disingkat UCKB, adalah komponen untuk mengevakuasi daya dari pembangkit melalui media saluran transmisi (tegangan tinggi) - trafo tenaga (*step down*) pada gardu induk maupun gardu hubung dengan tegangan 20.000 (dua puluh ribu) Volt yang dilengkapi dengan kabel sebagai pengganti saluran utama JTM yang terganggu, sebagai penyalur daya temporer ke jaringan distribusi tegangan menengah atau sebagai pemasok daya temporer ke Konsumen.

108. Unit Gardu Bergerak, yang selanjutnya disingkat UGB, adalah alat yang berfungsi untuk menggantikan trafo yang terganggu/rusak, sehingga listrik tidak padam lama dan dilengkapi dengan peralatan tambahan, seperti kubikel, kabel, dan troli, serta dapat dimobilisasi.

109. Unit Induk Distribusi/Unit Induk Wilayah, yang selanjutnya disingkat UID/UIW, adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Kantor Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh General Manager dan melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tertentu sesuai dengan tujuannya.

110. Unit Layanan adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Pelaksana yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Layanan dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan tujuannya.

111. Unit Organisasi, yang selanjutnya disingkat U.O., adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, antara lain U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.

112. Unit Pelaksana adalah organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Unit Induk atau Pusat-Pusat yang dipimpin, dibina, dan dikelola oleh Manager Unit Pelaksana dan melaksanakan kegiatan usaha ketenagalistrikan tertentu sesuai dengan tujuannya.

113. *Uninterruptible Power Supply*, yang selanjutnya disingkat UPS, adalah alat elektronik yang berfungsi sebagai cadangan listrik untuk memberikan suplai daya pada perangkat elektronik saat listrik utama padam.

114. *Vending System* adalah sistem yang dapat menghasilkan Token dengan spesifikasi teknik sesuai dengan *Standard Transfer Specification* dan merupakan bagian dari sistem prabayar.

2. Di antara...

Paraf

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud diberlakukan Peraturan Pelaksana ini adalah sebagai pedoman bagi PLN dalam melaksanakan penatausahaan Konsumen Prabayar di Lingkungan PLN.

(2) Tujuan diberlakukan Peraturan Pelaksana ini adalah:

a. Menstandardisasi dan menyeragamkan pelaksanaan penatausahaan Konsumen Prabayar di Lingkungan PLN.

b. Meningkatkan penjualan tenaga listrik dan percepatan pelayanan.

3. Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Pelaksana ini sebagai berikut:

a. Organisasi dan Kewenangan;
b. Pelayanan Konsumen Prabayar;
c. Pemeriksaan MPB;
d. Pengelolaan MPB;
e. Mekanisme Pembelian Token Denominasi dan Token Perdana;
f. Perhitungan Pemakaian Listrik Prabayar;
g. Pembukuan Pendapatan dan Piutang;
h. Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan; dan
i. Pemantauan dan Pengawasan.

4. Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Organisasi dan Kewenangan

(1) Organisasi terkait dengan pelaksanaan penatausahaan Konsumen Prabayar adalah sebagai berikut:

a. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi niaga;

b. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi proses bisnis operasional distribusi;

c. Satuan ...

Paraf

c. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengamanan pendapatan;

d. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengelola data Konsumen dan pelaporan penjualan tenaga listrik;

e. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi perbendaharaan;

f. UID/UIW, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan.

(2) Kewenangan tiap-tiap organisasi terkait dengan pelaksanaan penatausahaan Konsumen Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Pelaksana ini.

5. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Pemeriksaan MPB

(1) Tujuan Pemeriksaan MPB untuk memastikan penggunaan tenaga listrik oleh Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Periode Pemeriksaan MPB dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam periode 6 (enam) bulan, sesuai tanggal yang telah ditentukan.

(3) Perencanaan Pemeriksaan MPB oleh petugas baca meter disusun dalam sebuah peta RPP.

(4) Mekanisme Pemeriksaan MPB diatur dalam Lampiran Peraturan Pelaksana ini.

(5) Tindak lanjut Pemeriksaan MPB dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Pengelolaan MPB

(1) Pengelolaan MPB dilakukan secara terpusat, berskala korporat, dengan mengoptimalkan aspek seluruh infrastruktur prabayar (perangkat *hardware, software,* dan *design system),* proses bisnis, dan prosedur yang ada.

(2) Mekanisme pengelolaan MPB mulai dan penerimaan MPB di Unit Pelaksana sampai dengan pengelolaan Token Listrik Prabayar.

(3) Data laporan dan informasi Listrik Prabayar yang terdapat pada Aplikasi Pelayanan Konsumen, meliputi:

a. data laporan pembelian *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT);

b. data ...

Paraf

b. data rekapitulasi mutasi pembelian *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) antarunit;

c. data laporan penerimaan dan penjualan Token;

d. data monitoring penggunaan energi;

e. data laporan pembelian Token prabayar setiap Konsumen;

f. data laporan dan historis pembelian setiap Konsumen;

g. data laporan kinerja sistem MPB;

h. data laporan pengaduan Konsumen Prabayar.

(4) Evaluasi MPB dilakukan untuk mengetahui jenis dan penyebab kerusakan meter guna meningkatkan kualitas serta kinerja MPB.

7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
Mekanisme Pembelian Token Denominasi dan Token Perdana

(1) Pembelian Token Denominasi dan Token Perdana oleh Konsumen dilakukan pada kanal pembayaran PLN.

(2) Setelah kanal pembayaran PLN menerima dana pembelian Token Denominasi dan Token Perdana dari Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem P2APST mencatat transaksi serta menerbitkan Token Denominasi dan Token Perdana sesuai besaran nominal Denominasi Token yang dibeli berupa 20 (dua puluh) digit kode/angka unik untuk diinput ke MPB oleh Konsumen.

Pasal 6B
Perhitungan Pemakaian Listrik Prabayar

(1) Perhitungan pemakaian kWh Listrik Prabayar dilakukan terhadap pembelian Token Denominasi, Token Perdana, dan Token Non Reguler dalam periode 1 (satu) bulan berjalan.

(2) Syarat dan ketentuan perhitungan pemakaian kWh Listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Pelaksana ini.

(3) Perlakuan akuntansi untuk perhitungan pemakaian Listrik Prabayar mengacu pada ketentuan akuntansi yang berlaku.

8. Ketentuan pada Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ...

Paraf

Pasal 7
Pembukuan Pendapatan dan Piutang

(1) Pembukuan pendapatan dan Piutang Layanan Prabayar mengacu kepada ketentuan akuntansi yang berlaku.

(2) Pengawasan Piutang Konsumen Prabayar digunakan untuk memonitor Piutang Konsumen Prabayar yang terdiri dari:

a. Daftar Piutang Lancar; dan

b. Daftar PRR.

9. Ketentuan pada Pasal 12 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Lampiran

Ketentuan dalam Peraturan Pelaksana ini mengenai:

a. Organisasi dan Kewenangan;
b. Pelayanan Konsumen Prabayar;
c. Pemeriksaan MPB;
d. Pengelolaan MPB;
e. Mekanisme Pembelian Token Denominasi dan Token Perdana;
f. Perhitungan Pemakaian Listrik Prabayar;
g. Pembukuan Pendapatan dan Piutang;
h. Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan; dan
i. Pemantauan dan Pengawasan,

diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pelaksana ini.

10. Mengubah Lampiran Peraturan Pelaksana, sehingga secara keseluruhan menjadi sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pelaksana ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku, maka:

a. Ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero) sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Pelaksana ini, dinyatakan tetap berlaku;

b. Keputusan ...

Paraf

b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 367.K/DIR/2012 tentang Sistem Akuntansi dan Pengakuan Pendapatan Listrik Pra Bayar (LPB) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini, serta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya kebijakan operasional terkait petunjuk teknis pendapatan usaha sebagai pelaksanaan kebijakan pelaporan keuangan; dan

c. ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pelaksana ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Pelaksana ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0002.SPo/DIR/2025 tentang Standar Prosedur Tata Usaha Konsumen Prabayar di Lingkungan PT PLN (Persero).

Peraturan Pelaksana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2026

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO,

DENNY TRIYANTO

DIREKTUR RETAIL DAN NIAGA,

M. FAHRUR ROZY

DIREKTUR DISTRIBUSI,

ARSYADANY G. AKMALAPUTRI

DIREKTUR KEUANGAN,

SULISTYO BIANTORO

Paraf

LAMPIRAN
PERATURAN PELAKSANA PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0008 .SPo/DIR/2026
TANGGAL : 28 Agustus 2026

PLN

PT PLN (PERSERO)

STANDAR PROSEDUR
TATA USAHA KONSUMEN LAYANAN LISTRIK PRABAYAR
PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0008 .SPo/DIR/2026

Revisi ke : 0	Paraf :

CATATAN REVISI

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Bagian yang Dilakukan Revisi	Keterangan Revisi
		1. Penyesuaian format Peraturan Pelaksana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0039.E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero). 2. Penambahan materi muatan terkait: a. Perubahan Bab I Organisasi dan Kewenangan; b. Bab V Mekanisme Pembelian Token Denominasi dan Token Perdana; c. Bab VI Perhitungan Pemakaian Listrik Prabayar.	Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi perhitungan pemakaian listrik Konsumen prabayar, perlu ditambahkan materi muatan terkait pencatatan listrik prabayar. Penambahan materi muatan tersebut akan mencabut Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 367.K/DIR/2012 tentang Sistem Akuntansi & Pengakuan Pendapatan Listrik Pra Bayar (LPB).

Revisi ke : 0	Paraf :

DAFTAR ISI

CATATAN REVISI i
DAFTAR ISI ii
BAB I ORGANISASI DAN KEWENANGAN 1
BAB II PELAYANAN KONSUMEN PRABAYAR 2
2.1. Pelayanan Informasi 2
2.2. Penyambungan Baru 3
2.3. Perubahan Daya 11
2.4. Penyambungan Sementara 20
2.5. Perubahan Dari Layanan Pascabayar Ke Layanan Prabayar 28
2.6. Perubahan Dari Layanan Prabayar Ke Layanan Pascabayar 35
2.7. Perubahan Golongan Tarif Tenaga Listrik Pada Daya Yang Sama 39
2.8. Kode Golongan 46
2.9. Perubahan Kode Golongan 46
2.10. Perubahan Data Konsumen 51
2.11. Pemberhentian Sebagai Konsumen 54
2.12. Penyambungan Kembali 60
2.13. Kegiatan Pengaduan Konsumen 68
2.14. Meter Rusak 79
2.15. Klaim Garansi Meter Prabayar Rusak 87
2.16. Penangguhan Penyambungan 90
2.17. Restitusi Biaya Penyambungan 91
BAB III PEMERIKSAAN METER PRABAYAR 93
3.1. Tujuan Dari Pemeriksaan Meter Prabayar Sebagai Berikut: 93
3.2. Periode Pemeriksaan Meter Prabayar 93
3.3. Perencanaan Pembentukan Rute Pemeriksaan Prabayar 93
3.4. Mekanisme Pemeriksaan Meter Prabayar 97
3.5. Tindak Lanjut Pemeriksaan Meter Prabayar 100
BAB IV PENGELOLAAN METER PRABAYAR 101
4.1. Pengelolaan Meter Prabayar 101
4.2. Mekanisme Pengelolaan Meter Prabayar 101

Revisi ke : 0	Paraf

4.3. Data Laporan Dan Informasi Listrik Prabayar 107
4.4. Evaluasi Meter Prabayar 108
BAB V MEKANISME PEMBELIAN TOKEN DENOMINASI DAN TOKEN PERDANA ... 111
BAB VI PERHITUNGAN PEMAKAIAN LISTRIK PRABAYAR 112
BAB VII PEMBUKUAN PENDAPATAN DAN PIUTANG 113
BAB VIII DOKUMENTASI, ADMINISTRASI, DAN PELAPORAN 114
BAB IX PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 115
FORMAT I. TID *ROLLOVER* DAN GENERASI TOKEN 116
FORMAT II. PENGELOLAAN METER PRABAYAR 118
TABEL SIMULASI PERHITUNGAN PELAPORAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK PRABAYAR 121

Revisi ke : 0	Paraf :

BAB I
ORGANISASI DAN KEWENANGAN

Organisasi, kewenangan, dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan penatausahaan Konsumen Prabayar adalah sebagai berikut:

1.1. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi niaga, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.1.1. menetapkan strategi dan kebijakan yang bersifat operasional terkait layanan Listrik Prabayar;

1.1.2. memberikan arahan yang bersifat operasional terkait pelaksanaan layanan Listrik Prabayar.

1.2. Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi proses bisnis operasional distribusi, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyelenggarakan fungsi manajemen distribusi.

1.3. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengamanan pendapatan, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.3.1. melakukan pengelolaan pemeriksaan meter, rekonsiliasi konsumsi energi, memonitor, dan mengevaluasi efektivitas proses manajemen Piutang;

1.3.2. melakukan koordinasi sebelum menyetujui perubahan kode golongan.

1.4. Satuan Kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengelola data Konsumen dan pelaporan penjualan tenaga listrik, yang memiliki kewenangan menyetujui perubahan kode golongan (DIL dan DPK) di Aplikasi Pelayanan Konsumen.

1.5. Satuan Kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi perbendaharaan, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan verifikasi berkas dan persyaratan perubahan kode golongan.

1.6. UID/UIW, Unit Pelaksana, dan Unit Layanan, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan layanan Listrik Prabayar yang telah ditetapkan.

BAB II
PELAYANAN KONSUMEN PRABAYAR

Pelayanan Konsumen Prabayar terdiri:

2.1. Pelayanan informasi

2.1.1. Pelayanan informasi terdiri dari:

2.1.1.1. informasi Konsumen bersifat eksternal; dan

2.1.1.2. informasi Konsumen bersifat internal.

2.1.2. Informasi Konsumen bersifat eksternal sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.1.1 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, meliputi:

2.1.2.1. Informasi yang dapat diakses oleh publik, terdiri dari:

a. Tarif Tenaga Listrik;

b. Biaya Penyambungan;

c. ketentuan Kompensasi TMP;

d. gangguan layanan ketenagalistrikan;

e. mekanisme PB, PD, dan PS;

f. mekanisme perubahan nama Konsumen;

g. syarat dan ketentuan Sambungan Tenaga Listrik;

h. produk layanan;

i. daftar PLN Unit;

j. lokasi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBLU); dan

k. daftar bank dan/atau pihak lain selain bank, yang bekerja sama dengan PLN untuk melayani pembayaran non Tagihan Listrik, dan pembelian Token Listrik Prabayar.

2.1.2.2. Informasi yang hanya dapat diakses oleh Konsumen, antara lain:

a. informasi mengenai Piutang non Tagihan Listrik dan kewajiban lainnya;

b. informasi mengenai pembelian Token Listrik Prabayar;

c. informasi mengenai pembelian rata-rata Token per bulan;

d. informasi progres tindak lanjut penyelesaian pengaduan gangguan dan keluhan Konsumen;

e. informasi riwayat permohonan, PDK, Pemutusan Sementara, P3TL, dan P2TL; dan

f. informasi progres permohonan PB, Penyambungan Kembali, PD, PS, dan layanan lainnya.

2.1.3. Informasi Konsumen bersifat internal sebagaimana butir 2.1.1.2 merupakan informasi yang dikecualikan untuk dapat diakses kepada publik, antara lain:

2.1.3.1. DIL;

2.1.3.2. DPK;

2.1.3.3. data teknik;

2.1.3.4. daftar dan/atau rekapitulasi riwayat pembelian Token;

2.1.3.5. daftar dan/atau rekapitulasi riwayat pembelian rata-rata Token per bulan;

2.1.3.6. daftar dan/atau rekapitulasi riwayat pengubahan data langganan;

2.1.3.7. daftar dan/atau rekapitulasi riwayat permohonan PB, PD, PS;

2.1.3.8. daftar dan/atau rekapitulasi riwayat Pemutusan Sementara; dan

2.1.3.9. daftar dan/atau rekapitulasi riwayat P3TL dan P2TL.

2.2. Penyambungan Baru

2.2.1. Syarat dan ketentuan PB meliputi:

2.2.1.1. Calon Konsumen wajib memiliki SLO sebelum dilaksanakan Penyalaan tenaga listrik.

2.2.1.2. Dalam hal calon Konsumen belum memiliki SLO, maka Penyalaan tenaga listrik ditunda sampai dengan calon Konsumen memiliki SLO.

2.2.1.3. Hari layanan penyambungan mengikuti ketentuan TMP yang berlaku.

2.2.1.4. Sebagai upaya mengamankan investasi yang sudah dikeluarkan PLN untuk mendapatkan *revenue* sesuai yang

diharapkan, maka permohonan PB kolektif untuk perumahan, ruko, hunian, dan lain sebagainya yang berpotensi tidak langsung menggunakan tenaga listrik, diupayakan dilayani dengan Layanan Pascabayar.

2.2.1.5. Dalam hal permohonan PB kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.1.4 telah disetujui, pengajuan permohonan perubahan layanan ke prabayar dapat diproses setelah dalam 3 (tiga) bulan terakhir pemakaian tenaga listrik tiap bulan telah di atas 40 (empat puluh) JN.

2.2.1.6. Dalam hal permohonan perubahan layanan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.1.5 kurang dari 1 (satu) tahun berlangganan, maka Konsumen dikenakan biaya material dan jasa.

2.2.2. Mekanisme PB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

2.2.2.1. Calon Konsumen mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123; atau

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN.

2.2.2.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan penyambungan disampaikan kepada calon Konsumen pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.2.2.3. Calon Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan penyambungan.

2.2.2.4. Informasi data dan dokumen calon Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

b. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

c. alamat *email*;

d. salinan identitas calon Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

e. nomor Kartu Keluarga Pemohon dan/atau pemilik/penghuni apabila sambungan listrik yang dimohon merupakan golongan tarif listrik bersubsidi;

f. NPWP calon Konsumen bagi yang memiliki;

g. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan calon Konsumen yang bersangkutan untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual;

h. alamat lengkap Persil/bangunan yang akan dilaksanakan penyambungan;

i. titik koordinat Persil/bangunan yang akan dilaksanakan penyambungan;

j. pilihan jenis layanan;

k. daya yang dibutuhkan;

l. peruntukan penggunaan listrik;

m. Token Perdana;

n. Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI); dan

o. SLO.

2.2.2.5. Segala data dan informasi mengenai calon Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan penyambungan.

2.2.2.6. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh calon Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan penyambungan.

b. Dalam penerbitan jawaban permohonan penyambungan Konsumen diberikan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran Biaya Penyambungan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan penyambungan sebagaimana huruf b berisi biaya yang harus dibayar oleh calon Konsumen, yaitu:

   1) Biaya Penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN;

   2) biaya pembelian Token Perdana untuk calon Konsumen Prabayar; dan

   3) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang

selama 14 (empat belas) hari kalender apabila calon Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

2.2.2.7. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan calon Konsumen paling lambat sebelum dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan.

2.2.2.8. Pembayaran Biaya Penyambungan, Token Perdana, dan biaya lainnya harus dibayar lunas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon Konsumen dikenakan Biaya Penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

b. Biaya JTL yang diperlukan untuk PB merupakan JTL standar PLN.

c. Dalam hal calon Konsumen menghendaki TMP, keandalan, dan/atau estetika tertentu dalam pelaksanaan penyambungan atau terdapat ketentuan pemerintah daerah setempat sehingga dibutuhkan JTL khusus, maka calon Konsumen dikenakan biaya tambahan atas kegiatan tersebut.

d. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

e. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah calon Konsumen melakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan biaya lainnya.

2.2.2.9. Setelah calon Konsumen melakukan pembayaran Biaya Penyambungan, selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:

a. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak daftar Konsumen yang sudah membayar Biaya Penyambungan di Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengajukan permintaan MPB melalui nota dinas ke fungsi konstruksi untuk Unit Pelaksana atau fungsi distribusi untuk Unit Layanan dengan melampirkan daftar Konsumen yang sudah membayar Biaya Penyambungan.

c. Fungsi konstruksi pada Unit Pelaksana atau fungsi distribusi pada Unit Layanan menindaklanjuti nota dinas

dengan menerbitkan TUG yang berlaku dengan melampirkan daftar nomor MPB sesuai jumlah yang diminta oleh fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan.

d. Fungsi konstruksi pada Unit Pelaksana atau fungsi distribusi pada Unit Layanan mengambil MPB dan aksesoris ke gudang Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan membawa berkas permintaan barang mengacu pada ketentuan TUG yang berlaku.

e. Dalam hal jumlah dan fisik MPB sudah sesuai dengan nota dinas permintaan barang, maka fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan menandatangani bukti penerimaan barang.

f. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan aktivasi nomor MPB tersebut pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

g. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak PK dan BA pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

h. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) pada Aplikasi Pelayanan Konsumen, yang masing-masing Token terdiri atas 20 (dua puluh) digit angka, yaitu:

1) KCT-1;
2) KCT-2;
3) CTT-1;
4) PLT;
5) CCT;
6) *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT);
7) CTT-2.

2.2.2.10. Pengaturan/*setting* MPB di kantor Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN dilaksanakan di bawah pengawasan oleh fungsi transaksi energi listrik dengan melakukan *setting* seluruh MPB pada meja/papan *setting* prabayar dengan memasukkan 6 (enam) urutan Token prabayar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membuka *cover* terminal MPB yang akan di-*setting*;

b. Memasang MPB pada meja/papan *setting* MPB serta sambungkan kabel phasa dan netral ke terminal MPB, dengan melakukan *setting* MPB sesuai urutan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.2.9 huruf h angka 1) sampai dengan angka 6) (tanpa CTT-2) untuk semua MPB;

c. Menutup *cover* terminal MPB;

d. Menyalakan MCB pada meja/papan *setting* MPB hingga semua MPB menyala dengan indikator:

   1) 2 (dua) lampu indikator menyala (merah dan kuning);

   2) Layar MPB tampil "Periksa".

e. Tekan *Short Code* 75 "*enter*" pada MPB untuk melihat nomor MPB, dan pastikan nomor MPB tersebut sama dengan nomor yang tertera pada *barcode* MPB maupun pada cetakan Token prabayar Aplikasi Pelayanan Konsumen;

f. Masukkan KCT-1 untuk menghapus *Tariff Index* dari pabrikan MPB, hingga di layar MPB tampil "Benar";

g. Masukkan KCT-2 untuk pengisian *Tariff Index* baru, hingga di layar MPB tampil "Benar";

h. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 05 "*enter*", lalu pastikan hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan *Tariff Index* baru yang tertera pada hasil cetak Token prabayar dari Aplikasi Pelayanan Konsumen, sesuai ketentuan *Tariff Index* yang tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

i. Masukkan CTT-1 hingga di layar MPB tampil "Benar" untuk mengaktifkan *tampering* pada MPB dan lampu indikator warna kuning tidak menyala, tampilan "Periksa" akan hilang dan pada layar MPB tampil nilai 5 (lima) kWh;

j. Masukkan PLT untuk membatasi daya pada MPB sesuai dengan daya kontrak;

k. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 07 *"enter"* hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh) sesuai Tabel

Load Limit/Power Limit pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

l. Masukkan CCT untuk menghapus kWh *default* (5 kWh) dari pabrikan MPB yang ada pada setiap MPB baru;

m. Tekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk memastikan kWh *default* sudah terhapus, di layar MPB tampil 0 (nol) kWh;

n. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala maka dapat diindikasi *rele* rusak dan MPB harus diganti;

o. Masukkan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) hingga pada layar MPB tampil "Benar";

p. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk mengetahui nilai kWh yang dibeli Konsumen sesuai saat mengajukan permohonan PB/PD;

q. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala dapat terindikasi MPB normal, namun jika tidak menyala/kabel putus, maka terindikasi *rele* rusak dan MPB harus diganti; dan

r. Matikan MCB, lepas terminal lalu tutup kembali *cover* terminalnya.

2.2.2.11. Fungsi administrasi Konsumen pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menyerahkan PK dan hasil cetak Token dari Aplikasi Pelayanan Konsumen kepada petugas penyambungan untuk segera dilaksanakan pemasangan MPB ke lokasi Konsumen dan melakukan pengawasan dan monitoring hari layanan penyambungan.

2.2.2.12. Dalam hal penyambungan belum dapat dilaksanakan karena alasan operasional, maka:

a. PLN Unit setempat wajib memberikan jawaban dengan mencantumkan penjelasan atas permohonan yang tidak disetujui dan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran Biaya Penyambungan.

b. PLN akan melakukan Restitusi biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud butir 2.2.2.8.

2.2.2.13. Pelaksanaan penyambungan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA penyambungan;

b. Pelaksanaan penyambungan listrik terdiri dari:

1) Penarikan JTL;

2) Pemasangan APP;

3) Penginputan CTT-2 ke MPB;

4) Pemeriksaan pada MPB:

i. *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

ii. *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

iii. *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

iv. *Short Code* 37 "*enter*" harus sama dengan jumlah kWh pada hasil cetak *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) (dalam hal terdapat selisih 5 (lima) kWh, maka belum dilaksanakan CCT 5 (lima) kWh).

5) Foto APP;

6) Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen; dan

7) Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen.

c. Penandatanganan BA penyambungan oleh PLN dan Konsumen.

2.2.2.14. Fungsi pelayanan pelanggan Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan Aktivasi DIL dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA penyambungan, dibuat PDK sebagai dasar pembaruan DIL pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama saat Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyalaan tenaga listrik.

2.2.3. Perlakuan atas permohonan yang tidak dapat dilanjutkan

2.2.3.1. Dalam hal calon Konsumen telah melaksanakan pembayaran Biaya Penyambungan dan kemudian membatalkan pengajuan pendaftarannya, maka Biaya Penyambungan yang telah dibayarkan tersebut dapat dikembalikan dengan memperhitungkan biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk kepentingan penyambungan.

2.2.3.2. Atas permohonan yang tidak dapat dilanjutkan baik karena alasan operasional sebagaimana butir 2.2.2.12, pembatalan pengajuan pendaftaran melalui kanal sebagaimana butir 2.2.3.1 atau pembayaran yang melewati masa kedaluwarsa, maka permohonan masuk ke dalam daftar potensi.

2.3. Perubahan Daya

2.3.1. Syarat dan ketentuan PD meliputi:

2.3.1.1. Konsumen tidak memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan sepenuhnya.

2.3.1.2. Dalam hal Konsumen memiliki kewajiban pembayaran, maka Konsumen harus membayar kewajiban tersebut secara lunas.

2.3.1.3. Dalam hal Konsumen mengajukan permohonan pembayaran kewajiban secara angsuran, permohonan tersebut hanya dapat dilayani melalui Layanan Pascabayar.

2.3.1.4. Konsumen yang masih memiliki sisa kWh pada daya sebelumnya, sisa kWh tersebut akan diperhitungkan kembali sebagai Token listrik pada daya yang baru.

2.3.1.5. Token listrik sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1.4 diberikan kepada Konsumen berupa Token terpisah dan diberikan bersamaan pada saat pembelian Token berikutnya.

2.3.1.6. Konsumen wajib memiliki SLO sebelum dilaksanakannya Penyalaan tenaga listrik.

2.3.1.7. Dalam hal Konsumen belum memiliki SLO, maka Penyalaan tenaga listrik ditunda sampai dengan Konsumen memiliki SLO.

2.3.1.8. Hari layanan penyambungan mengikuti ketentuan TMP yang berlaku.

2.3.2. Mekanisme PD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

2.3.2.1. Konsumen mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123; atau

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN.

2.3.2.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan penyambungan disampaikan kepada Konsumen pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.3.2.3. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan penyambungan.

2.3.2.4. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL/Nomor Meter;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email*;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. NPWP Konsumen bagi yang memiliki;

g. nomor Kartu Keluarga Pemohon dan/atau pemilik/penghuni apabila sambungan listrik yang dimohon merupakan golongan tarif listrik bersubsidi;

h. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual;

i. pilihan jenis layanan;

j. daya yang dibutuhkan;

k. peruntukan penggunaan listrik;

l. besaran Token Perdana sesuai penetapan tarif dan daya Konsumen; dan

m. SLO.

2.3.2.5. Segala data dan informasi mengenai Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan penyambungan.

2.3.2.6. Penerbitan jawaban atas pendaftaran PD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan penyambungan.

b. Dalam hal penerbitan jawaban permohonan penyambungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka diterbitkan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran Biaya Penyambungan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan penyambungan sebagaimana huruf b, berisi biaya yang harus dibayar oleh Konsumen, yaitu:

1) Biaya Penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN;

2) biaya pembelian Token Perdana untuk Konsumen Prabayar; dan

3) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kalender apabila Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

2.3.2.7. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum dilakukan pembayaran Biaya Penyambungan.

2.3.2.8. Pembayaran Biaya Penyambungan dan biaya lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Konsumen dikenakan Biaya Penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN dan harus dibayar lunas.

b. Biaya JTL yang diperlukan untuk PD merupakan JTL standar PLN.

c. Dalam hal Konsumen menghendaki TMP, keandalan, dan/atau estetika tertentu dalam pelaksanaan penyambungan atau terdapat ketentuan pemerintah daerah setempat sehingga dibutuhkan JTL khusus,

Konsumen dikenakan biaya tambahan atas kegiatan tersebut.

d. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

e. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah Konsumen melakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan biaya lainnya.

2.3.2.9. Setelah Konsumen melakukan pembayaran Biaya Penyambungan, apabila diperlukan penggantian meter selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:

a. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak daftar Konsumen yang sudah membayar Biaya Penyambungan pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengajukan permintaan MPB melalui nota dinas ke fungsi konstruksi untuk Unit Pelaksana atau fungsi distribusi untuk Unit Layanan dengan melampirkan daftar Konsumen yang sudah membayar Biaya Penyambungan.

c. Fungsi konstruksi/distribusi pada Unit Pelaksana atau fungsi distribusi di Unit Layanan menindaklanjuti nota dinas dengan menerbitkan TUG yang berlaku dengan melampirkan daftar nomor MPB sesuai jumlah yang diminta oleh fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan.

d. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana atau fungsi distribusi Unit Layanan mengambil MPB dan aksesoris ke gudang Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan membawa berkas permintaan barang mengikuti ketentuan TUG yang berlaku.

e. Dalam hal jumlah dan fisik MPB sudah sesuai dengan nota dinas permintaan barang, maka fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan menandatangani bukti penerimaan barang.

f. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan aktivasi nomor MPB tersebut di Aplikasi Pelayanan Konsumen.

g. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak PK dan BA pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

h. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) pada Aplikasi Pelayanan Konsumen, yang masing-masing Token terdiri atas 20 (dua puluh) digit angka, yaitu:

1) KCT-1;

2) KCT-2;

3) CTT-1;

4) PLT;

5) CCT;

6) *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT);

7) CTT-2.

2.3.2.10. Dalam hal tidak terdapat perubahan phasa atau penggantian meter, selanjutnya PLN Unit melakukan proses sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.9 huruf g sampai dengan huruf h.

2.3.2.11. Pengaturan/*setting* MPB di kantor Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN dilaksanakan di bawah pengawasan oleh fungsi transaksi energi listrik dengan melakukan *setting* seluruh MPB pada meja/papan *setting* prabayar dengan memasukkan 6 (enam) urutan Token prabayar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membuka *cover* terminal MPB yang akan di-*setting*;

b. Memasang MPB pada meja/papan *setting* MPB serta sambungkan kabel phasa dan netral ke terminal MPB, dengan melakukan *setting* MPB sesuai urutan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.9 huruf h angka 1) sampai dengan angka 6) (tanpa CTT-2) untuk semua MPB;

c. Menutup *cover* terminal MPB;

d. Menyalakan MCB pada meja/papan *setting* MPB hingga semua MPB menyala dengan indikator:

1) 2 (dua) lampu indikator menyala (merah dan kuning); dan

2) Layar MPB tampil "Periksa".

e. Tekan *Short Code* 75 "*enter*" pada MPB untuk melihat nomor MPB, dan pastikan nomor MPB tersebut sama dengan nomor yang tertera pada *barcode* MPB maupun pada cetakan Token prabayar Aplikasi Pelayanan Konsumen;

f. Masukkan KCT-1 untuk menghapus *Tariff Index* dari pabrikan MPB, hingga di layar MPB tampil "Benar";

g. Masukkan KCT-2 untuk pengisian *Tariff Index* baru, hingga di layar MPB tampil "Benar";

h. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 05 "*enter*", lalu pastikan hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan *Tariff Index* baru yang tertera pada hasil cetak Token prabayar dari Aplikasi Pelayanan Konsumen, sesuai ketentuan mengenai *Tariff Index* yang tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

i. Masukkan CTT-1 hingga di layar MPB tampil "Benar" untuk mengaktifkan *tampering* pada MPB dan lampu indikator warna kuning tidak menyala, tampilan "Periksa" akan hilang dan pada layar MPB tampil nilai 5 (lima) kWh;

j. Masukkan PLT untuk membatasi daya pada MPB sesuai dengan daya kontrak;

k. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 07 "*enter*" hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh) sesuai Tabel *Load Limit/Power Limit* yang tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

l. Masukkan CCT untuk menghapus kWh *default* (5 (lima) kWh) dari pabrikan MPB yang ada pada setiap MPB baru;

m. Tekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk memastikan kWh *default* sudah terhapus, di layar MPB tampil 0 (nol) kWh;

n. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala maka dapat diindikasi *rele* rusak dan MPB harus diganti;

o. Masukkan *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) hingga pada Layar MPB tampil "Benar";

p. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk mengetahui nilai kWh yang dibeli Konsumen sesuai saat mengajukan permohonan PB/PD;

q. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala dapat terindikasi MPB normal, namun jika tidak menyala/kabel putus, maka terindikasi *rele* rusak dan MPB harus diganti; dan

r. Matikan MCB, lepas terminal lalu tutup kembali *cover* terminalnya.

2.3.2.12. Fungsi administrasi Konsumen pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menyerahkan PK dan hasil cetak Token dari Aplikasi Pelayanan Konsumen kepada petugas penyambungan untuk segera dilaksanakan pemasangan MPB ke lokasi Konsumen, serta melakukan pengawasan dan monitoring hari layanan penyambungan.

2.3.2.13. Dalam hal penyambungan belum dapat dilaksanakan karena alasan operasional, maka:

a. PLN Unit setempat wajib memberikan jawaban dengan mencantumkan penjelasan atas permohonan yang tidak disetujui dan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran Biaya Penyambungan.

b. PLN akan melakukan Restitusi biaya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.8.

2.3.2.14. Pelaksanaan penyambungan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA penyambungan;

b. Pemeriksaan fisik awal PD meliputi:

1) Pemeriksaan SR;

2) Pemeriksaan pembatas daya;

3) Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

4) Pemeriksaan *keypad* dan *display* MPB;

5) Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED);

6) Pemeriksaan segel APP; dan

7) *Short Code* 08 "*enter*" pengecekan status *tampering.*

c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan huruf b, maka petugas dapat menangguhkan penyambungan dan ditindaklanjuti dengan P3TL atau P2TL;

d. Dalam hal Konsumen memiliki TS atas pelaksanaan P3TL dan/atau P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Konsumen wajib membayar TS secara lunas;

e. Dalam hal Konsumen mengajukan permohonan pembayaran TS secara angsuran, permohonan tersebut hanya dapat dilayani melalui Layanan Pascabayar;

f. Pencatatan dan pengambilan gambar/foto sisa kWh lama pada form BA;

g. Penggantian MCB dan/atau MPB sesuai dengan daya baru;

h. Penginputan KCT (KCT-1 dan KCT-2), *Management Token*, dan *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) ke MPB jika tidak terdapat penggantian meter;

i. Penginputan CTT-2 jika terdapat penggantian meter;

j. Pemeriksaan pada MPB:

1) *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

2) *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

3) *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

4) *Short Code* 37 "*enter*" harus sama dengan jumlah kWh pada hasil cetak *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) (dalam hal terdapat selisih 5 (lima) kWh, maka belum dilaksanakan CCT 5 (lima) kWh).

k. Foto APP;

l. Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

m. Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen; dan

n. Penandatanganan BA penyambungan oleh PLN dan Konsumen.

2.3.2.15. Fungsi pelayanan pelanggan Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan Aktivasi DIL dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA penyambungan, dibuat PDK sebagai dasar pembaruan DIL pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama saat Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyalaan tenaga listrik.

2.3.2.16. Setelah dilaksanakan Aktivasi DIL, PLN harus menyampaikan kepada Konsumen sisa Token di MPB lama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sisa Token Konsumen akan dikonversi sesuai dengan tarif baru dengan penjelasan perhitungan konversi sisa Token, dimana formula konversi kWh baru yaitu sisa Token lama dikali tarif lama dibagi tarif baru.

b. KWh hasil konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a akan ditambahkan pada kWh meter tarif daya baru.

2.3.3. Perlakuan atas permohonan yang tidak dapat dilanjutkan

2.3.3.1. Dalam hal calon Konsumen telah melaksanakan pembayaran Biaya Penyambungan dan kemudian membatalkan pengajuan pendaftarannya, Biaya Penyambungan yang telah dibayarkan tersebut dapat dikembalikan dengan memperhitungkan biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk kepentingan penyambungan.

2.3.3.2. Atas permohonan yang tidak dapat dilanjutkan baik karena alasan operasional sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.13, pembatalan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.3.1 atau pembayaran yang melewati masa kedaluwarsa, maka permohonan masuk ke dalam daftar potensi.

2.4. Penyambungan Sementara

2.4.1. PS ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang, termasuk kebutuhan energi dalam waktu tertentu (*intermittent-usage, spot-demand*) untuk Pemohon yang memerlukan daya lebih besar dari daya kontrak.

2.4.2. PS diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.4.2.1. Permohonan PS dilayani sesuai dengan daya permohonan Pemohon.

2.4.2.2. Konsumen wajib memiliki SLO sebelum dilaksanakannya Penyalaan tenaga listrik.

2.4.2.3. Dalam hal Konsumen belum memiliki SLO, maka penyalaan tenaga listrik ditunda sampai dengan Konsumen memiliki SLO.

2.4.2.4. Permohonan PS sampai dengan daya 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA dengan ketentuan lama pemakaian sebagai berikut:

a. Sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dilayani menggunakan alat pembatas tanpa alat pengukur.

b. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dilayani menggunakan MPB Siaga.

2.4.2.5. Permohonan PS dengan daya di atas 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA dilayani dengan menggunakan meter pascabayar siaga yang memiliki fitur pemutusan jarak jauh dengan mekanisme mengikuti ketentuan Layanan Pascabayar.

2.4.3. Ketentuan hari layanan PS

2.4.3.1. PS dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

2.4.3.2. Dalam hal Pemohon menginginkan perpanjangan layanan PS, maka Pemohon harus mengajukan ulang permohonan PS.

2.4.3.3. Perhitungan hari layanan PS adalah sebagai berikut:

a. Permohonan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari dihitung 5 (lima) hari.

b. Permohonan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari dihitung 10 (sepuluh) hari.

c. Permohonan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dihitung 20 (dua puluh) hari.

d. Permohonan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung 30 (tiga puluh) hari.

e. Permohonan lebih dari 30 (tiga puluh) hari menggunakan perhitungan kelipatan 30 (tiga puluh) hari.

2.4.4. Ketentuan biaya layanan PS

2.4.4.1. Pada prinsipnya, biaya yang dibebankan kepada Pemohon PS merupakan biaya pemakaian energi listrik.

2.4.4.2. Dalam hal PS memerlukan perluasan jaringan dan tambahan peralatan, maka perluasan jaringan dan tambahan peralatan tersebut disediakan dan dibangun oleh Pemohon.

2.4.4.3. Dalam hal PLN memiliki material retur yang dapat dipakai ulang seperti: tiang, konduktor, trafo atau peralatan *mobile* seperti UGB, UCKB, *mobile generator-set*, UPS, dan lainnya, maka PLN dapat menyediakan kebutuhan perluasan jaringan dan tambahan peralatan kepada Pemohon dengan perhitungan biaya sebagai berikut:

a. Biaya material/peralatan yang dapat dipakai ulang sebesar biaya penyusutan tahunan dari nilai perolehan material/peralatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Jasa pemasangan dan pembongkaran serta material yang bersifat sekali pakai diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai KHS atau harga jasa dan material unit setempat.

2.4.4.4. Dalam hal Pemohon menginginkan tingkat keandalan tertentu, maka kebutuhan biaya tambahan jaringan atau peralatan untuk keandalan tersebut dibebankan kepada Pemohon.

2.4.4.5. Ketentuan tarif untuk biaya pemakaian energi listrik adalah sebagai berikut:

a. Pemohon PS dikenakan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus (L) dengan faktor pengali N yang disesuaikan berdasarkan pasokan tegangan listrik dan segmentasi target *market* yang ditetapkan oleh Direksi PLN.

b. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus (L) yang diberlakukan untuk layanan PS mengikuti ketentuan terkait *tariff adjustment* yang berlaku.

c. Dalam layanan PS diberlakukan pembayaran minimum sebesar nilai energi awal.

d. Pengaturan energi awal sebagaimana huruf c, dengan lama pemakaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebagai berikut:

   Nilai energi awal = daya x 20 (dua puluh) jam x jumlah hari.

e. Pada layanan PS daya sampai dengan 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA dan lama pemakaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, maka energi awal merupakan energi minimum (e-min).

f. Pada layanan PS daya sampai dengan 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA dan lama pemakaian lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka:

   1) Dalam hal kebutuhan energi lebih besar dari energi awal, maka Pemohon dapat membeli Token sesuai kebutuhan sampai akhir periode PS.

   2) Dalam hal sampai dengan akhir periode PS masih terdapat sisa kWh, maka sisa kWh dikembalikan ke Pemohon.

g. Ketentuan perhitungan kWh untuk permohonan layanan daya di atas 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA sebagai berikut:

   1) Lama pemakaian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari:

      i. Dalam hal pemakaian energi kurang dari energi awal, maka sisa pemakaian energi tersebut dikembalikan ke Pemohon.

      ii. Dalam hal pada akhir periode PS pemakaian energi lebih besar dari kWh yang sudah dibayar, maka selisih kWh tersebut ditagihkan ke Pemohon.

   2) Lama pemakaian lebih dari 30 (tiga puluh) hari:

      i. Energi awal sebagai kWh penetapan dihitung dengan formula:

         kWh penetapan = daya x 20 (dua puluh) jam x 30 (tiga puluh) hari.

Revisi ke : 0	Paraf :

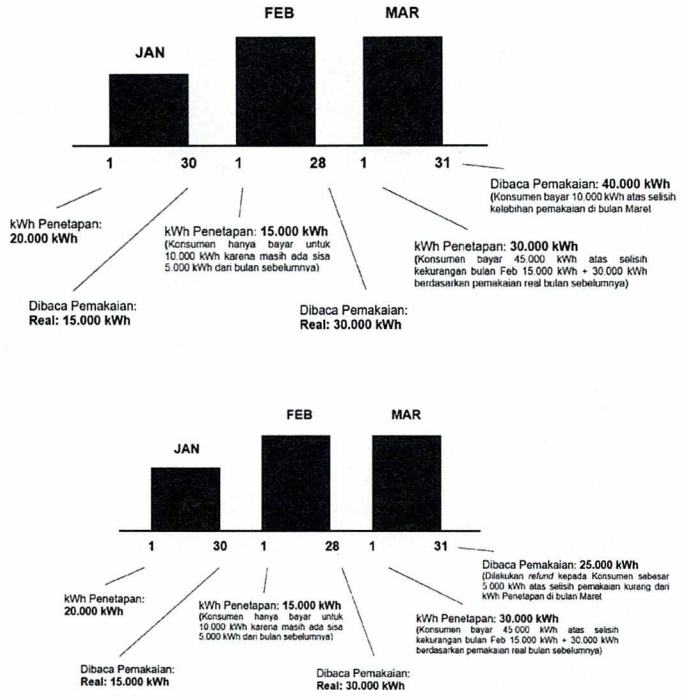
ii. Untuk bulan berikutnya, jumlah kWh ditetapkan berdasarkan realisasi pemakaian kWh bulan N-1 sesuai simulasi perhitungan pada Gambar Simulasi Perhitungan kWh Penetapan Penyambungan Sementara Daya Lebih Dari 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA, Lama Pemakaian Lebih dari 30 (tiga puluh) Hari.

iii. Dalam hal pada akhir periode PS total kWh yang dibayar lebih besar dari total kWh yang digunakan, maka selisih kWh tersebut dikembalikan ke Pemohon.

iv. Dalam hal pada akhir periode PS pemakaian energi lebih besar dari kWh yang sudah dibayar, maka selisih kWh tersebut ditagihkan ke Pemohon.

v. Dalam hal Pemohon mengajukan permintaan pengakhiran masa PS sebelum akhir periode PS dan pemakaian energi lebih kecil dari energi yang sudah dibayar, maka selisih kWh tidak dapat dikembalikan ke Pemohon.

Revisi ke : 0	Paraf



Gambar Simulasi Perhitungan kWh Penetapan Penyambungan Sementara Daya Lebih Dari 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA, Lama Pemakaian Lebih dari 30 (tiga puluh) Hari

2.4.5. Mekanisme PS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

2.4.5.1. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123;

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN; atau

d. surat yang ditujukan kepada PLN Unit setempat.

2.4.5.2. Data, dokumen, dan informasi Pemakai Tenaga Listrik yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL (untuk Konsumen); dan

b. salinan identitas Pemohon, antara lain:

1) NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni untuk seluruh permohonan golongan tarif;

2) NPWP untuk seluruh permohonan golongan tarif bagi yang memiliki; dan/atau

3) NIB untuk permohonan golongan tarif S komersial, Traksi, B, dan tarif I khusus permohonan daya 6.600 (enam ribu enam ratus) VA ke atas.

2.4.5.3. Segala data dan informasi terkait Pemohon dicatat dalam formulir digital.

2.4.5.4. Ketentuan dan syarat untuk PS dituangkan dalam PJBTL.

2.4.5.5. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Pemohon melalui aplikasi yang tersedia paling lambat sebelum pelaksanaan penyambungan.

2.4.5.6. Pembayaran biaya pemakaian energi listrik, biaya material, dan biaya jasa dibayar lunas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemohon dikenakan Biaya Penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

b. Biaya JTL yang diperlukan untuk PS merupakan JTL standar PLN.

c. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

d. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah Pemohon melakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan biaya lainnya.

2.4.5.7. Pelaksanaan PS dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA penyambungan;

b. Pemeriksaan fisik awal sebelum pemasangan MPB Siaga meliputi:

1) Pemeriksaan SR;

2) Pemeriksaan pembatas daya;

3) Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

4) Pemeriksaan *keypad* dan *display* MPB;

5) Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED); dan

6) Pemeriksaan segel APP.

c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka petugas dapat menangguhkan penyambungan dan ditindaklanjuti dengan P3TL atau P2TL;

d. Dalam hal Konsumen memiliki TS atas pelaksanaan P3TL dan/atau P2TL sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Konsumen wajib membayar TS secara lunas sebelum pelaksanaan PS;

e. Dalam hal Konsumen mengajukan permohonan pembayaran TS secara angsuran, permohonan tersebut hanya dapat dilayani melalui Layanan Pascabayar, sehingga PS dilakukan setelah pelaksanaan perubahan layanan ke Layanan Pascabayar; dan

f. Tahapan pemasangan MPB Siaga terdiri dari:

1) Pemasangan JTL dan MPB Siaga;

2) Penginputan CTT;

3) Penginputan CCT;

4) Pemeriksaan pada MPB Siaga:

i. *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

ii. *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

iii. *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

iv. *Short Code* 37 "*enter*" kredit kWh harus 0 (nol).

5) Penginputan *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT);

6) Foto APP;

7) Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

8) Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen; dan

9) Penandatanganan BA penyambungan oleh PLN dan Konsumen.

2.4.6. Pelaksanaan pembongkaran PS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

2.4.6.1. Pembongkaran dilaksanakan setelah masa layanan PS berakhir;

2.4.6.2. Pada saat berakhirnya jangka waktu PS, penyambungan listrik harus dikembalikan pada keadaan semula;

2.4.6.3. Pada saat melaksanakan pengembalian pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.6.2, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA pembongkaran;

b. Pengecekan MPB Siaga;

c. Pencatatan sisa kWh;

d. Penginputan CCT pada MPB Siaga;

e. Pembongkaran MPB Siaga; dan

f. Penandatanganan BA pembongkaran oleh PLN dan Konsumen.

2.4.6.4. Dalam hal masih terdapat sisa kWh pada MPB Siaga setelah masa PS berakhir, maka sisa kWh PS dikembalikan sesuai dengan tarif dan daya Konsumen dalam bentuk Token bagi Konsumen atau Restitusi bagi non Konsumen dengan formula perhitungan nilai kWh sisa:

a. kWh sisa = sisa kWh yang tercatat dalam MPB Siaga PS.

b. Rupiah kWh sisa = kWh sisa x Tarif Tenaga Listrik PS (tarif L).

c. Token *free issue* kWh sisa PS = rupiah kWh sisa/Tarif Tenaga Listrik sesuai tarif dan daya Konsumen.

2.4.7. Mekanisme pengelolaan MPB Siaga PS

Pengelolaan terhadap MPB Siaga PS dilakukan oleh fungsi pelayanan pelanggan pada masing-masing Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.4.7.1. Pengawasan terhadap penggunaan MPB Siaga PS dan kesesuaian Stok menjadi tanggung jawab fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.4.7.2. Pembuatan KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) khusus untuk

penanganan MPB Siaga PS dilakukan oleh fungsi pelayanan pelanggan Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.4.7.3. MPB Siaga PS harus terdata serta termonitor secara digital dan *real time* sebagai bentuk kegiatan monitoring dan tidak terbatas pada:

a. rincian data meter;

b. jumlah total meter;

c. jumlah meter yang terpasang di Konsumen;

d. jumlah Stok sisa meter;

e. status kondisi meter;

f. rincian Konsumen yang sedang terpasang MPB Siaga PS; dan

g. *history* penerbitan Token.

2.5. Perubahan dari Layanan Pascabayar ke Layanan Prabayar

2.5.1. Perubahan Layanan Pascabayar ke Layanan Prabayar dapat dilaksanakan atas dasar:

2.5.1.1. permohonan Konsumen;

2.5.1.2. kondisi tertentu yang disetujui oleh General Manager UID/UIW dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan; atau

2.5.1.3. perintah pengadilan.

2.5.2. Syarat dan ketentuan perubahan layanan meliputi:

2.5.2.1. Konsumen harus memastikan kesesuaian IDPEL sebelum pelaksanaan perubahan dari Layanan Pascabayar ke Layanan Prabayar.

2.5.2.2. Dalam hal terdapat Tagihan Listrik dan/atau kewajiban lainnya yang belum diselesaikan, maka Konsumen harus membayar Tagihan Listrik dan/atau kewajiban lainnya secara lunas terlebih dahulu sebelum pendaftaran perubahan dari Layanan Pascabayar ke Layanan Prabayar.

2.5.2.3. Permohonan perubahan layanan atas dasar permohonan Konsumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.1.1 dapat dilaksanakan setelah Konsumen berlangganan minimal 1 (satu) tahun.

2.5.2.4. Dalam hal Konsumen berlangganan kurang dari 1 (satu) tahun, maka dikenakan biaya material dan jasa.

2.5.2.5. Bagi Konsumen kolektif untuk perumahan, ruko, hunian, dan lain sebagainya yang tidak langsung menggunakan tenaga listrik, apabila ingin mengajukan perubahan Layanan ke Prabayar, maka dalam 3 (tiga) bulan terakhir pemakaian listriknya diupayakan sudah di atas 40 (empat puluh) JN.

2.5.3. Mekanisme pelaksanaan perubahan layanan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, meliputi:

2.5.3.1. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123; atau

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN.

2.5.3.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan penyambungan disampaikan kepada calon Konsumen pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.5.3.3. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan perubahan layanan.

2.5.3.4. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email*;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual;

g. pilihan jenis layanan; dan

h. besaran Token Perdana sesuai penetapan tarif dan daya Konsumen.

2.5.3.5. Segala data dan informasi terkait Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan perubahan layanan.

2.5.3.6. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan perubahan layanan.

b. Dalam hal jawaban permohonan perubahan layanan sebagaimana huruf a disetujui, maka diterbitkan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran biaya pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan perubahan layanan sebagaimana huruf b, berisi biaya yang harus dibayar oleh Konsumen, sebagai berikut:

   1) biaya pembelian Token Perdana untuk Konsumen Prabayar; dan

   2) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kalender apabila Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

2.5.3.7. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan perubahan layanan.

2.5.3.8. Pembayaran biaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

b. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah Konsumen melakukan pembayaran biaya.

2.5.3.9. Setelah Konsumen melakukan pembayaran, selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:

a. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak daftar Konsumen yang sudah membayar biaya pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengajukan permintaan MPB melalui nota dinas ke fungsi konstruksi di Unit Pelaksana dan ke fungsi distribusi di Unit Layanan dengan melampirkan daftar Konsumen yang sudah membayar biaya.

c. Fungsi konstruksi/distribusi di Unit Pelaksana/Unit Layanan menindaklanjuti nota dinas dengan menerbitkan TUG yang berlaku dengan melampirkan daftar nomor MPB sesuai jumlah yang diminta oleh fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan.

d. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengambil MPB ke gudang Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan membawa berkas permintaan barang mengikuti ketentuan TUG yang berlaku.

e. Dalam hal jumlah dan fisik MPB sudah sesuai dengan nota dinas permintaan barang, maka fungsi administrasi Konsumen menandatangani bukti penerimaan barang.

f. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan aktivasi nomor MPB tersebut pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

g. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak PK dan BA pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

h. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) pada Aplikasi Pelayanan Konsumen, yang masing-masing Token terdiri atas 20 (dua puluh) digit angka, yaitu:

1) KCT-1;

2) KCT-2;

3) CTT-1;

4) PLT;

5) CCT;

6) *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT);

7) CTT-2.

2.5.3.10. Pengaturan/*setting* MPB di kantor Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN dilaksanakan di bawah pengawasan oleh fungsi transaksi energi listrik dengan melakukan *setting* seluruh MPB pada meja/papan *setting* prabayar dengan memasukkan 6 (enam) urutan Token prabayar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membuka *cover* terminal MPB yang akan di-*setting*;

b. Memasang MPB pada meja/papan *setting* MPB dan sambungkan kabel phasa dan netral ke terminal MPB, dengan melakukan *setting* sesuai urutan sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.3.9 huruf h angka 1) sampai dengan angka 6) (tanpa CTT-2) untuk semua MPB;

c. Menutup *cover* terminal MPB;

d. Menyalakan MCB pada meja/papan *setting* MPB hingga semua MPB menyala dengan indikator:

   1) 2 (dua) lampu indikator menyala (merah dan kuning); dan

   2) Layar MPB tampil "Periksa".

e. Tekan *Short Code* 75 "*enter*" pada MPB untuk melihat nomor MPB dan pastikan bahwa nomor MPB tersebut sama dengan nomor yang tertera pada *barcode* MPB maupun pada cetakan Token prabayar dari Aplikasi Pelayanan Konsumen;

f. Masukkan KCT-1 untuk menghapus *Tariff Index* dari pabrikan MPB, hingga di layar MPB tampil "Benar";

g. Masukkan KCT-2 untuk pengisian *Tariff Index* baru, hingga di layar MPB tampil "Benar";

h. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 05 "*enter*" dan hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan *Tariff Index* baru yang tertera pada hasil cetak Token prabayar dari Aplikasi Pelayanan Konsumen, sesuai ketentuan mengenai *Tariff Index* yang tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

i. Masukkan CTT-1 hingga di layar MPB tampil "Benar" untuk mengaktifkan *tampering* pada MPB dan lampu indikator warna kuning tidak menyala, tampilan "Periksa" akan hilang dan pada layar MPB tampil nilai 5 (lima) kWh;

j. Masukkan *Set Max Power Load/Load Limit Token* untuk membatasi daya pada MPB sesuai dengan daya kontrak;

k. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 07 "*enter*" dan hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh) sesuai Tabel *Load Limit/Power Limit* yang tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

l. Masukkan CCT untuk menghapus kWh *default* (5 kWh) dari pabrikan MPB yang ada pada setiap MPB baru;

m. Tekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk memastikan kWh *default* sudah terhapus, di layar MPB tampil 0 (nol) kWh;

n. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala dapat diindikasi *rele* rusak, maka MPB harus diganti;

o. Masukkan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) hingga pada layar MPB tampil "Benar";

p. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk mengetahui nilai kWh yang dibeli Konsumen sesuai saat mengajukan permohonan PB/PD;

q. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala dapat terindikasi MPB normal, namun jika tidak menyala/kabel putus, maka terindikasi *rele* rusak dan MPB harus diganti; dan

r. Matikan MCB, lepas terminal lalu tutup kembali *cover* terminalnya.

2.5.3.11. Fungsi administrasi Konsumen menyerahkan PK dan hasil cetak Token dari Aplikasi Pelayanan Konsumen kepada petugas penyambungan untuk segera dilaksanakan pemasangan MPB ke lokasi Konsumen dan melakukan pengawasan dan monitoring hari layanan penyambungan.

2.5.3.12. Pelaksanaan perubahan layanan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA perubahan layanan;

b. Pemeriksaan fisik awal perubahan layanan meliputi:

1) Pemeriksaan SR;

2) Pemeriksaan pembatas daya;

3) Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

4) Pemeriksaan piringan; dan

5) Pemeriksaan segel APP.

c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka petugas dapat menangguhkan penyambungan dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan P3TL atau P2TL;

d. Dalam hal Konsumen memiliki TS atas pelaksanaan P3TL dan/atau P2TL sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Konsumen wajib membayar TS secara lunas;

e. Dalam hal Konsumen tidak dapat membayar TS secara lunas, maka permohonan Konsumen akan ditangguhkan;

f. Pemasangan meter baru di lokasi Konsumen:

1) Petugas mencatat Stan Meter bongkar kWh meter lama dan mendokumentasikannya pada form BA sebelum pemasangan kWh meter baru.

2) Penginputan CTT-2 ke MPB.

3) Pemeriksaan daya/tegangan pada MPB.

4) Penyalaan listrik.

g. Pengambilan foto MPB dan melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen; dan

h. Penandatanganan BA perubahan layanan oleh PLN dan Konsumen/kuasa Konsumen.

2.5.3.13. Dalam hal terdapat Tagihan Listrik dari stan akhir pemakaian, maka diperhitungkan dengan nilai JL Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal nilai JL lebih besar dari Tagihan Listrik atas stan akhir pemakaian, maka kelebihan JL dapat dilakukan:

1) Konversi menjadi Token kWh dengan jumlah maksimum setara 720 (tujuh ratus dua puluh) JN.

2) Jika setelah dikonversi sesuai angka 1) masih terdapat sisa JL, maka atas sisa JL tersebut dilakukan Restitusi.

3) Token kWh sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan kepada Konsumen berupa Token terpisah bersamaan pada saat pembelian Token berikutnya.

b. Dalam hal nilai JL lebih kecil dari Tagihan Listrik atas stan akhir pemakaian, maka sisa kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Konsumen sejak terbit register selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender, melalui mekanisme sebagai berikut:

1) Pembayaran sisa kewajiban secara tunai sesuai dengan Nomor Register yang diterbitkan untuk permohonan perubahan layanan yang didasari oleh permohonan Konsumen, ketentuan PLN, dan perintah pengadilan.

2) Dalam hal pembayaran sisa kewajiban tidak diselesaikan oleh Konsumen, PLN dapat melaksanakan:

i. Pemutusan Sementara sejak Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.3.13 huruf b; dan

ii. Pembongkaran Rampung 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan Pemutusan Sementara.

2.5.3.14. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA perubahan layanan, dibuat PDK sebagai dasar pembaruan DIL pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama saat Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyalaan tenaga listrik.

2.6. Perubahan dari Layanan Prabayar ke Layanan Pascabayar

2.6.1. Syarat dan ketentuan perubahan layanan yang diperlukan untuk memenuhi permohonan Konsumen Prabayar yang ingin beralih ke Layanan Pascabayar, sebagai berikut:

2.6.1.1. Membayar JL dan melunasi seluruh kewajiban sebelum pendaftaran perubahan Layanan Prabayar ke Layanan Pascabayar.

2.6.1.2. Melakukan pembacaan meter mandiri setiap bulan pada periode baca meter sesuai ketentuan PLN setelah menjadi Konsumen pascabayar.

2.6.2. Mekanisme pelaksanaan perubahan layanan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, meliputi:

2.6.2.1. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123; atau

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN.

2.6.2.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan penyambungan disampaikan kepada Konsumen pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.6.2.3. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan perubahan layanan.

2.6.2.4. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email*;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual; dan

g. pilihan jenis layanan.

2.6.2.5. Segala data dan informasi terkait Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan perubahan layanan.

2.6.2.6. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan perubahan layanan.

b. Dalam hal jawaban permohonan perubahan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka diterbitkan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran biaya pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan perubahan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi biaya yang harus dibayar oleh Konsumen, yaitu:

1) biaya JL; dan

2) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kalender apabila Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

e. Dalam hal perubahan layanan belum dapat dilaksanakan karena alasan operasional, maka PLN Unit setempat wajib memberikan jawaban dengan mencantumkan penjelasan atas permohonan yang tidak disetujui dan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran Biaya Penyambungan.

2.6.2.7. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan perubahan layanan.

2.6.2.8. Pembayaran biaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

b. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah Konsumen melakukan pembayaran biaya.

2.6.2.9. Pelaksanaan perubahan layanan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak daftar Konsumen yang sudah membayar biaya pada Aplikasi Pelayanan Konsumen;

b. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengajukan permintaan meter pascabayar kepada fungsi konstruksi di Unit Pelaksana atau fungsi distribusi di Unit Layanan, atau penyedia layanan *Managed Service*;

c. Fungsi konstruksi di Unit Pelaksana atau fungsi distribusi di Unit Layanan menindaklanjuti nota dinas dengan menerbitkan TUG yang berlaku dengan melampirkan daftar Nomor Meter pascabayar sesuai jumlah yang diminta oleh fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan;

d. Fungsi konstruksi di Unit Pelaksana atau fungsi distribusi di Unit Layanan mengambil meter pascabayar dan aksesoris ke gudang Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan membawa berkas permintaan barang mengacu pada ketentuan TUG yang berlaku;

e. Dalam hal jumlah dan fisik meter pascabayar sudah sesuai dengan nota dinas permintaan barang, maka fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan menandatangani bukti penerimaan barang;

f. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak PK dan BA pada Aplikasi Pelayanan Konsumen;

g. Pemeriksaan fisik awal perubahan layanan meliputi:

   1) Pemeriksaan SR;

   2) Pemeriksaan pembatas daya;

   3) Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

   4) Pemeriksaan *keypad* dan *display* MPB;

   5) Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED);

   6) Pemeriksaan segel MPB; dan

   7) *Short Code* 08 "*enter*" pengecekan status *tampering.*

h. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka petugas dapat menangguhkan penyambungan dan ditindaklanjuti dengan P3TL atau P2TL;

i. Pemasangan meter baru di lokasi Konsumen dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

   1) Petugas mencatat sisa kWh pada MPB;

   2) Petugas mendokumentasikan sisa kWh sebelum pemasangan kWh meter baru pada form BA;

3) Pemeriksaan daya/tegangan pada APP;

4) Penyalaan listrik.

j. Pengambilan foto APP dan melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen; dan

k. Penandatanganan BA perubahan layanan oleh PLN dan Konsumen/kuasa Konsumen.

2.6.2.10. Dalam hal Konsumen memiliki TS atas pelaksanaan P3TL dan/atau P2TL sebagaimana dimaksud pada butir 2.6.2.9 huruf h, maka Konsumen wajib melunasi seluruh tagihan yang sudah Jatuh Tempo.

2.6.2.11. Sisa angsuran TS dimasukkan ke dalam tagihan rekening listrik bulan berikutnya sesuai dengan tanggal Jatuh Tempo.

2.6.2.12. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh, maka sisa kWh tersebut dijadikan Kompensasi pada tagihan rekening listrik bulan berikutnya sesuai tarif daya listrik terakhir.

2.6.2.13. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA perubahan layanan, dibuat PDK sebagai dasar pembaruan DIL pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama saat Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyalaan tenaga listrik.

2.7. Perubahan Golongan Tarif Tenaga Listrik pada Daya yang Sama

2.7.1. Perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik dapat dilaksanakan berdasarkan:

2.7.1.1. permohonan Konsumen;

2.7.1.2. perubahan peraturan mengenai Tarif Tenaga Listrik; atau

2.7.1.3. hasil penyisiran tarif karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

2.7.2. Perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik berdasarkan permohonan Konsumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1.1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.7.2.1. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN setempat; atau

b. surat yang ditujukan kepada PLN Unit setempat.

2.7.2.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan penyambungan disampaikan kepada Konsumen pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.7.2.3. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.2.4. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email*;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual; dan

g. besaran Token Perdana sesuai ketentuan tarif dan daya Konsumen.

2.7.2.5. Segala data dan informasi terkait Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.2.6. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan dalam hal terdapat kewajiban lainnya yang belum diselesaikan, maka Konsumen harus melunasi pembayaran kewajiban lainnya sebelum pendaftaran perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.2.7. Pemeriksaan peruntukan penggunaan listrik untuk penetapan golongan tarif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat dokumen pendukung dan/atau kondisi di lapangan untuk memperoleh kepastian atas peruntukan penggunaan listrik pada lokasi Konsumen.

b. Pengisian dan penandatanganan dokumen BA pemeriksaan peruntukan tenaga listrik.

c. Penetapan golongan tarif listrik mengacu pada ketentuan terkait Tarif Tenaga Listrik.

2.7.2.8. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

b. Dalam hal jawaban permohonan perubahan golongan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka diterbitkan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran biaya pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan perubahan golongan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi biaya yang harus dibayar oleh Konsumen, yaitu:

1) biaya pembelian Token Perdana; dan

2) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kalender apabila Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

e. Dalam hal jawaban permohonan perubahan golongan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui, maka PLN wajib mencantumkan penjelasan atas permohonan yang tidak disetujui dan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dilaksanakannya pemeriksaan peruntukan penggunaan listrik.

2.7.2.9. Persetujuan perubahan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.2.10. Pembayaran biaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

b. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah Konsumen melakukan pembayaran biaya.

2.7.2.11. Setelah Konsumen melakukan pembayaran biaya, selanjutnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak PK dan BA di Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) pada Aplikasi Pelayanan Konsumen, yang masing-masing Token terdiri atas 20 (dua puluh) digit angka, yaitu:

1) KCT-1;

2) KCT-2;

3) CTT-1;

4) PLT;

5) CCT;

6) *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT);

7) CTT-2.

2.7.2.12. Pembelian Token Perdana pada golongan Tarif Tenaga Listrik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

2.7.2.13. Pemberitahuan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik dilaksanakan melalui penyampaian surat pemberitahuan dari Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak Aktivasi DIL.

2.7.2.14. Penyampaian Amendemen PJBTL kepada Konsumen terhadap klausul perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik di PJBTL.

2.7.2.15. Pelaksanaan perubahan golongan tarif dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA perubahan golongan tarif;

b. Pelaksanaan perubahan golongan tarif terdiri dari:

1) Pengambilan gambar/foto sisa kWh lama pada Stan Meter yang selanjutnya dicatat pada form BA perubahan golongan tarif;

2) Penginputan KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) ke MPB, jika tidak terdapat penggantian meter;

3) Pemeriksaan pada MPB:

   i. *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

   ii. *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

   iii. *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

   iv. *Short Code* 37 "*enter*" harus sama dengan jumlah kWh pada hasil cetak *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) (dalam hal terdapat selisih 5 (lima) kWh, maka belum dilaksanakan CCT 5 (lima) kWh).

4) Foto APP; dan

5) Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen.

c. Penandatanganan BA perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik oleh PLN dan Konsumen/kuasa Konsumen.

2.7.2.16. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan fisik awal, maka petugas dapat menangguhkan perubahan golongan tarif dan ditindaklanjuti dengan P3TL atau P2TL.

2.7.2.17. Dalam hal Konsumen memiliki TS atas pelaksanaan P3TL dan/atau P2TL sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.2.16, maka Konsumen wajib melunasi seluruh tagihan yang sudah Jatuh Tempo.

2.7.2.18. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh pada golongan Tarif Tenaga Listrik lama, maka sisa kWh tersebut diperhitungkan kembali sebagai Token listrik pada golongan Tarif Tenaga Listrik baru dan diinputkan kembali ke MPB setelah perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.2.19. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDK dilaksanakan berdasarkan penandatanganan Amendemen PJBTL oleh PLN dan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama saat Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum perubahan golongan tarif.

2.7.3. Perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik berdasarkan perubahan peraturan mengenai Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1.2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.7.3.1. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan dalam hal terdapat kewajiban lainnya yang belum diselesaikan, Konsumen harus membayar kewajiban lainnya tersebut terlebih dahulu sebelum dilaksanakan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.3.2. Pemberitahuan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik dilaksanakan melalui penyampaian surat pemberitahuan dari Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan peraturan berlaku.

2.7.3.3. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.3.4. Penyampaian Amendemen PJBTL kepada Konsumen terhadap klausul perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik di PJBTL.

2.7.3.5. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh pada golongan Tarif Tenaga Listrik lama, maka sisa kWh tersebut diperhitungkan kembali sebagai Token listrik pada golongan Tarif Tenaga Listrik baru dan diinputkan kembali ke MPB setelah perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.3.6. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDK dilaksanakan berdasarkan penandatanganan Amendemen PJBTL oleh PLN dan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL wajib dilaksanakan setelah huruf a dan huruf b terpenuhi.

2.7.4. Perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik berdasarkan hasil penyisiran Tarif Tenaga Listrik karena tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada butir 2.7.1.3 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.7.4.1. Pemeriksaan peruntukan penggunaan listrik di Persil/bangunan Konsumen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan peruntukan penggunaan listrik dilaksanakan guna memperoleh kepastian atas peruntukan penggunaan listrik pada lokasi Konsumen.

b. Pengisian dan penandatanganan dokumen BA perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.4.2. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan dalam hal terdapat kewajiban lainnya yang belum diselesaikan, maka pelunasan kewajiban lainnya dapat diberikan angsuran maksimal 12 (dua belas) bulan dengan menggunakan *user role* Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.7.4.3. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.4.4. Penyampaian Amendemen PJBTL kepada Konsumen terhadap klausul perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik di PJBTL.

2.7.4.5. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh pada golongan Tarif Tenaga Listrik lama, maka sisa kWh tersebut diperhitungkan kembali sebagai Token listrik pada golongan Tarif Tenaga Listrik baru dan diinputkan kembali ke MPB setelah perubahan golongan Tarif Tenaga Listrik.

2.7.4.6. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDK dilaksanakan berdasarkan penandatanganan Amendemen PJBTL oleh PLN dan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL wajib dilaksanakan setelah huruf a dan huruf b di atas terpenuhi.

2.8. Kode Golongan

Dalam rangka pengelompokan Konsumen berdasarkan penanggung jawab atau sumber pendanaan, maka ditetapkan kode golongan sebagai berikut:

2.8.1. Kode 0 : untuk Konsumen golongan umum, yang pembiayaannya menggunakan dana anggaran perorangan dan/atau instansi secara mandiri.

2.8.2. Kode 1 : untuk Konsumen golongan TNI/POLRI, yang pembiayaannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemhan/POLRI melalui Pembayaran Terpusat atau pembayaran tidak terpusat.

2.8.3. Kode 2 : untuk Konsumen golongan Instansi Vertikal, yang pembiayaannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) non Kemhan/POLRI melalui Pembayaran Terpusat.

2.8.4. Kode 3 : untuk Konsumen golongan pemerintah daerah, yang pembiayaannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.8.5. Kode 4 : untuk Konsumen golongan BUMN/BUMD, yang pembiayaannya dilakukan langsung oleh perusahaan BUMN/BUMD.

2.9. Perubahan Kode Golongan

2.9.1. Perubahan kode golongan dilaksanakan berdasarkan permohonan Konsumen maupun dari hasil pemeriksaan PLN Unit dengan ketentuan sebagai berikut:

2.9.1.1. Perubahan kode golongan untuk Konsumen yang pembayarannya dilakukan secara terpusat dilaksanakan atas dasar permohonan dari U.O./satuan kerja instansi yang berwenang.

2.9.1.2. Perubahan kode golongan untuk Konsumen yang pembayarannya tidak dilakukan secara terpusat dilaksanakan atas dasar permohonan dari U.O./satuan kerja instansi yang berwenang atau atas hasil pemeriksaan PLN Unit setempat.

2.9.2. Perubahan kode golongan sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.1.1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.9.2.1. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN setempat; atau

b. surat permohonan perubahan kode golongan yang ditujukan kepada PLN Unit setempat.

2.9.2.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan perubahan kode golongan disampaikan kepada Konsumen pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.9.2.3. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email*;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. surat persetujuan yang dikeluarkan oleh U.O./satuan kerja Instansi Vertikal;

g. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual; dan

h. besaran Token Perdana sesuai ketentuan tarif dan daya Konsumen.

2.9.2.4. Segala data dan informasi mengenai Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan perubahan kode golongan.

2.9.2.5. Dalam hal perubahan dari dan ke kode golongan 1 atau kode golongan yang pembayaran dilakukan secara terpusat, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Fungsi niaga UID/UIW mempersiapkan berkas dan persyaratan perubahan kode golongan disampaikan ke satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi perbendaharaan maksimal tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan.

b. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi perbendaharaan melakukan verifikasi berkas dan persyaratan perubahan kode golongan dan mengirim nota dinas hasil verifikasi ke satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengelola data Konsumen dan pelaporan penjualan tenaga listrik untuk dilaksanakan perubahan DIL dan DPK pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

c. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengelola data Konsumen dan pelaporan penjualan tenaga listrik menyetujui dan mengirimkan *email* ke *service desk* terkait perubahan kode golongan (DIL dan DPK) pada Aplikasi Pelayanan Konsumen setelah dilakukan koordinasi bersama satuan kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi pengamanan pendapatan.

2.9.2.6. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan apabila terdapat kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.

2.9.2.7. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan perubahan kode golongan.

b. Dalam penerbitan jawaban permohonan perubahan kode golongan, Konsumen diberikan nomor agenda.

2.9.2.8. Pemberitahuan perubahan kode golongan dilaksanakan melalui penyampaian surat pemberitahuan dari Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak Aktivasi DIL.

2.9.2.9. Pelaksanaan perubahan kode golongan untuk non kode golongan 1 dilaksanakan berdasarkan surat persetujuan perubahan kode golongan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perubahan kode golongan pada DIL dapat dilakukan di Unit Pelaksana/Unit Layanan.

b. Perubahan kode golongan pada DPK diinput oleh Unit Pelaksana/Unit Layanan dan disetujui oleh UID/UIW.

2.9.2.10. Pelaksanaan koreksi perubahan kode golongan dilaksanakan pada bulan berjalan.

2.9.2.11. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan fisik awal, maka petugas dapat menangguhkan penyambungan dan ditindaklanjuti dengan P3TL atau P2TL.

2.9.2.12. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDK dilaksanakan berdasarkan penandatanganan Amendemen PJBTL oleh PLN dan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan secara digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan perubahan kode golongan.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum perubahan kode golongan.

2.9.3. Pengajuan perubahan kode golongan sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.1.2 yang berasal dari permohonan Konsumen dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.9.3.1. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN setempat; atau

b. surat permohonan perubahan kode golongan yang ditujukan kepada PLN Unit setempat.

2.9.3.2. Konsumen diberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan perubahan kode golongan pada saat mengajukan pendaftaran.

2.9.3.3. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email*;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. surat persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau atas dasar hasil pemeriksaan PLN Unit setempat;

g. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual; dan

h. besaran Token Perdana sesuai ketentuan tarif dan daya Konsumen.

2.9.3.4. Segala data dan informasi mengenai Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan perubahan kode golongan.

2.9.3.5. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan perubahan kode golongan.

b. Dalam penerbitan jawaban permohonan perubahan kode golongan, Konsumen diberikan nomor agenda.

2.9.3.6. Pelaksanaan perubahan kode golongan dilaksanakan berdasarkan surat persetujuan perubahan kode golongan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Fungsi niaga Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan perubahan kode golongan pada DIL sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi niaga; dan

b. Fungsi niaga Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan perubahan kode golongan pada DPK sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi niaga.

2.9.3.7. Pelaksanaan koreksi kode golongan dilaksanakan di bulan berjalan.

2.9.3.8. Dalam hal pelaksanaan perubahan kode golongan sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.3.7 bertepatan dengan hari libur, maka penetapan tanggal akan dimajukan sesuai dengan kebutuhan.

2.9.3.9. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan fisik awal, maka petugas dapat menangguhkan penyambungan dan ditindaklanjuti dengan P3TL atau P2TL.

2.9.3.10. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh pada kode golongan lama, maka sisa kWh tersebut diperhitungkan kembali sebagai Token listrik pada kode golongan tarif baru dan diinputkan kembali ke MPB setelah perubahan kode golongan.

2.9.3.11. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PDK dilaksanakan berdasarkan penandatanganan Amendemen PJBTL oleh PLN dan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan secara digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama saat perubahan kode golongan.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum perubahan kode golongan.

2.9.4. Perubahan kode golongan sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.1.2 yang dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan PLN Unit mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.2.4 sampai dengan butir 2.9.2.11.

2.10. Perubahan Data Konsumen

2.10.1. PDK dilakukan sebagai penyesuaian administrasi yang terdiri dari:

2.10.1.1. Ganti nama, yaitu perubahan nama Konsumen yang tidak mengakibatkan pemindahan alas hak sebagai Konsumen;

2.10.1.2. Balik nama, yaitu perubahan nama Konsumen yang mengakibatkan pemindahan alas hak sebagai Konsumen; dan

2.10.1.3. Ubah data Konsumen, yaitu PDK antara lain alamat, nomor telepon, email, NIK, NPWP.

2.10.2. Alasan pelaksanaan PDK adalah sebagai berikut:

2.10.2.1. permohonan PDK;

2.10.2.2. perubahan administrasi kependudukan; atau

2.10.2.3. Bencana Alam atau Kondisi Darurat (*Force Majeure)* yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tanpa adanya perubahan lokasi.

2.10.3. PDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.10.3.1. Konsumen/Pemohon dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile;*

b. *Contact Center* PLN 123;

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN setempat; atau

d. surat yang ditujukan kepada PLN Unit setempat.

2.10.3.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan PDK disampaikan kepada Konsumen/Pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.10.3.3. Konsumen/Pemohon dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan PDK.

2.10.3.4. Informasi data dan dokumen Konsumen/Pemohon yang diperlukan meliputi:

a. IDPEL;

b. identitas, antara lain NIK/NPWP/Paspor;

c. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

d. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

e. alamat *email*;

f. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

g. salinan bukti pengalihan hak atau penguasaan atas Persil/bangunan khusus untuk balik nama Konsumen;

h. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual; dan

i. dasar perubahan alamat tanpa merubah lokasi kedudukan Konsumen.

2.10.3.5. Segala data dan informasi mengenai Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan PDK.

2.10.3.6. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan dalam hal terdapat kewajiban lainnya yang belum diselesaikan, maka Konsumen harus membayar kewajiban lainnya tersebut terlebih dahulu sebelum pendaftaran PDK.

2.10.3.7. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan PDK.

b. Dalam hal jawaban permohonan PDK sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka diterbitkan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran biaya pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan PDK sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi biaya yang harus dibayar oleh Konsumen, yaitu biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang

selama 14 (empat belas) hari kalender apabila Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

e. Dalam hal jawaban permohonan PDK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disetujui, maka PLN wajib mencantumkan penjelasan atas permohonan yang tidak disetujui dan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran.

2.10.3.8. Persetujuan perubahan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan secara digital oleh PLN dan Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan perubahan layanan.

2.10.3.9. Dalam pelaksanaan PDK, Konsumen dikenakan kewajiban untuk membayar sejumlah biaya sebagaimana dimaksud pada butir 2.10.3.7 huruf b, antara lain:

a. biaya meterai;

b. biaya pembelian Token Perdana; dan/atau

c. kewajiban lainnya yang belum dibayarkan.

2.10.3.10. Pembayaran biaya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

b. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PLN setelah Konsumen melakukan pembayaran biaya.

2.10.3.11. Pemberitahuan PDK dilaksanakan melalui penyampaian surat pemberitahuan dari Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak Aktivasi DIL.

2.10.3.12. Penyampaian Amendemen PJBTL kepada Konsumen terhadap klausul PDK di PJBTL.

2.10.3.13. Pelaksanaan PDK dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA PDK; dan

b. Penandatanganan BA PDK oleh PLN dan Konsumen/kuasa Konsumen.

2.10.3.14. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA PDK, dilakukan perubahan data pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan PDK.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum PDK.

2.11. Pemberhentian Sebagai Konsumen

2.11.1. Pemberhentian sebagai Konsumen meliputi:

2.11.1.1. pemberhentian atas permohonan Konsumen;

2.11.1.2. pemberhentian atas sebab khusus berdasarkan perintah pengadilan yang mengharuskan sambungan listrik pada Konsumen dibongkar; atau

2.11.1.3. pemberhentian atas keterlambatan Konsumen dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

2.11.2. Pemberhentian sebagai Konsumen berdasarkan atas permohonan Konsumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.1.1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.11.2.1. Permohonan pemberhentian sebagai Konsumen Prabayar atas permintaan Konsumen sendiri dapat didaftarkan melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123;

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan; atau

d. surat yang ditujukan kepada PLN Unit setempat.

2.11.2.2. Konsumen diberikan Informasi mengenai syarat dan ketentuan pemberhentian sebagai Konsumen disampaikan kepada Konsumen/Pemohon pada saat mengajukan pendaftaran.

2.11.2.3. Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan pemberhentian sebagai Konsumen.

2.11.2.4. Informasi data dan dokumen Konsumen yang diperlukan meliputi antara lain:

a. IDPEL;

b. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

c. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

d. alamat *email* Pemohon/pemilik/penghuni;

e. salinan identitas Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

f. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan Konsumen yang bersangkutan; dan

g. bukti kepemilikian atau kewenangan atas Persil.

2.11.2.5. Segala data dan informasi terkait Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan pemberhentian sebagai Konsumen.

2.11.2.6. PLN memeriksa kewajiban Konsumen yang harus diselesaikan.

2.11.2.7. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan surat jawaban permohonan pemberhentian sebagai Konsumen.

b. Surat jawaban persetujuan pemberhentian sebagai Konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:

1) nomor agenda;

2) kode pembayaran/nomor register sebagai kode bayar pada kanal pembayaran PLN yang tersedia;

3) kewajiban-kewajiban yang masih ada dan harus dibayarkan secara lunas terlebih dahulu oleh Konsumen; dan

4) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

c. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kalender apabila Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

2.11.2.8. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh, nilai rupiah sisa kWh tersebut dikembalikan kepada Konsumen setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan.

2.11.2.9. Pembayaran biaya dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia sesuai dengan nomor register yang diterbikan.

2.11.2.10. Pelaksanaan pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA pembongkaran;

b. Pemeriksaan fisik meliputi:

1) Pemeriksaan SR;

2) Pemeriksaan pembatas daya;

3) Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

4) Pemeriksaan *display* layar MPB;

5) Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED); dan

6) Pemeriksaan segel MPB.

c. Pencatatan sisa kWh pada MPB yang telah dibongkar meliputi:

1) Petugas mencatat sisa kWh pada MPB; dan

2) Petugas mendokumentasikan sisa kWh pada form BA.

d. Pengambilan foto MPB dan melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

e. Melaksanakan pembongkaran JTL dan APP milik PLN; dan

f. Penandatanganan BA pembongkaran oleh PLN dan Konsumen/kuasa Konsumen.

2.11.2.11. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.2.10 huruf b, maka petugas dapat menangguhkan permohonan pemberhentian menjadi Konsumen dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan P3TL atau P2TL.

2.11.2.12. Pemberhentian sebagai Konsumen hanya dapat dijalankan atas persetujuan Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.11.2.13. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan berdasarkan BA pembongkaran.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan pembongkaran JTL dan APP milik PLN.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum dilakukan pembongkaran JTL dan APP milik PLN.

2.11.2.14. Pemberitahuan pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan melalui penyampaian surat pemberitahuan dan Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) han kerja sejak Aktivasi DIL.

2.11.2.15. Pengakhiran PJBTL dilaksanakan setelah Konsumen membayar kewajiban lainnya.

2.11.3. Pemberhentian sebagai Konsumen berdasarkan sebab khusus sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.1.2 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.11.3.1. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan dalam hal terdapat kewajiban yang belum diselesaikan.

2.11.3.2. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh, nilai rupiah sisa kWh tersebut dikembalikan kepada Konsumen setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan.

2.11.3.3. Pembayaran biaya dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia sesuai dengan nomor register yang diterbitkan.

2.11.3.4. Pelaksanaan pemberhentian dilakukan berdasarkan sebab khusus, maka PLN:

a. Menyiapkan PK dan BA pembongkaran;

b. Melakukan pengambilan foto MPB dan melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

c. Melaksanakan pembongkaran JTL dan APP milik PLN; dan

d. Melakukan penandatanganan BA pembongkaran oleh PLN dan Konsumen/kuasa Konsumen.

2.11.3.5. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan berdasarkan BA pembongkaran.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan pembongkaran JTL dan APP milik PLN.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum pembongkaran JTL dan APP milik PLN.

2.11.3.6. Pengakhiran PJBTL dilaksanakan dengan Aktivasi DIL.

2.11.3.7. Pemberitahuan pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan melalui penyampaian surat dari Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan pemberitahuan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak Aktivasi DIL.

2.11.4. Pemberhentian sebagai Konsumen berdasarkan atas keterlambatan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.1.3 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.11.4.1. Pengecekan kewajiban lainnya dilaksanakan dalam hal terdapat kewajiban lainnya yang belum diselesaikan.

2.11.4.2. Dalam hal Konsumen masih memiliki sisa kWh, nilai rupiah sisa kWh tersebut dikembalikan kepada Konsumen setelah diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan.

2.11.4.3. Dalam hal nilai rupiah sisa kWh sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.4.2 lebih kecil daripada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Konsumen, maka kekurangan pembayaran kewajiban tersebut dibayarkan secara lunas pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

2.11.4.4. Pembayaran biaya dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia sesuai dengan nomor register yang diterbitkan.

2.11.4.5. Melaksanakan Pemutusan Sementara, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberitahuan kepada Konsumen bahwa PLN melakukan Pemutusan Sementara disertai surat pemberitahuan dalam hal Konsumen belum membayar kewajiban lainnya sampai dengan batas akhir tanggal Jatuh Tempo periode pembayaran.

b. Pemutusan Sementara dilaksanakan oleh PLN bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan penghentian penyaluran tenaga listrik ke instalasi milik Konsumen sampai Konsumen membayar kewajibannya.

2.11.4.6. Pemantauan Pemutusan Sementara dilaksanakan dengan membuat daftar pemantauan pelaksanaan Pemutusan Sementara yang digunakan untuk melaksanakan Penyambungan Kembali atau Pembongkaran Rampung.

2.11.4.7. Dalam hal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 2.11.4.5 Konsumen belum membayar kewajibannya, maka dilaksanakan Pembongkaran Rampung dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Menyiapkan PK dan BA pembongkaran;

b. Melakukan pengambilan foto MPB dan melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

c. Melaksanakan pembongkaran JTL dan APP milik PLN; dan

d. Melakukan penandatanganan BA pembongkaran oleh PLN dan Konsumen.

2.11.4.8. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan berdasarkan BA pembongkaran.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan pembongkaran JTL dan APP milik PLN.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum pembongkaran JTL dan APP milik PLN.

2.11.4.9. Pengakhiran PJBTL dilaksanakan dengan Aktivasi DIL.

2.11.4.10. Pemberitahuan pemberhentian sebagai Konsumen dilaksanakan melalui penyampaian surat dari Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan pemberitahuan kepada Konsumen dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak Aktivasi DIL.

2.11.4.11. Pelaksanaan pengalihan ke PRR melalui:

a. Membuat Daftar Usulan Piutang Ragu-Ragu (DU-PRR) berdasarkan alat bukti berupa BA pembongkaran dan pengembalian material serta PDK.

b. Membuat Daftar Piutang Ragu-Ragu (DPRR) berdasarkan Berita Acara Penelitian Piutang Ragu-Ragu (BAP-PRR) oleh tim peneliti PRR PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Membuat daftar usulan penghapusan.

2.11.4.12. Mekanisme pelaksanaan PRR mengacu pada ketentuan pedoman tata usaha Konsumen pascabayar yang berlaku.

2.12. Penyambungan Kembali

2.12.1. Syarat dan ketentuan Penyambungan Kembali meliputi:

2.12.1.1. Penyambungan Kembali dilaksanakan setelah calon Konsumen membayar semua kewajiban dan Biaya Penyambungan secara lunas.

2.12.1.2. Biaya Penyambungan akan terbit setelah Aktivasi DIL pemberhentian Konsumen sudah dilakukan dan BA pembongkaran sudah diinput pada sistem Aplikasi Pelayanan Konsumen.

2.12.1.3. Calon Konsumen wajib memiliki SLO sebelum dilaksanakannya Penyalaan tenaga listrik.

2.12.1.4. Dalam hal calon Konsumen belum memiliki SLO, Penyalaan tenaga listrik ditunda sampai dengan calon Konsumen memiliki SLO.

2.12.1.5. Hari layanan penyambungan mengikuti ketentuan peraturan TMP yang berlaku.

2.12.2. Mekanisme Penyambungan Kembali dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

2.12.2.1. Calon Konsumen dapat mengajukan pendaftaran melalui:

a. PLN *Mobile*;

b. *Contact Center* PLN 123; atau

c. Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.12.2.2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan Penyambungan Kembali disampaikan kepada calon Konsumen/Pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran.

2.12.2.3. Calon Konsumen dapat mengajukan pendaftaran, setelah memahami serta menyetujui syarat dan ketentuan penyambungan.

2.12.2.4. Informasi data dan dokumen calon Konsumen yang diperlukan meliputi:

a. nama Pemohon/pemilik/penghuni;

b. nomor telepon Pemohon/pemilik/penghuni;

c. alamat *email*;

d. salinan identitas calon Konsumen, yaitu NIK Pemohon dan/atau pemilik/penghuni;

e. NPWP calon Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi yang memiliki;

f. surat kuasa dalam hal Pemohon bukan calon Konsumen yang bersangkutan, untuk permohonan yang dilaksanakan secara manual;

g. alamat lengkap Persil/bangunan yang akan dilaksanakan penyambungan;

h. bukti kepemilikan/kewenangan yang sah atas Persil;

i. titik koordinat Persil/bangunan yang akan dilaksanakan penyambungan;

j. pilihan jenis layanan;

k. daya yang dibutuhkan;

l. peruntukan penggunaan listrik;

m. besaran Token Perdana sama dengan pemakaian rata-rata perbulan dari bulan Januari sampai dengan bulan November pada tahun lalu untuk tarif dan daya Konsumen;

n. Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI); dan

o. SLO.

2.12.2.5. Segala data dan informasi mengenai calon Konsumen dicatat dalam formulir digital pengajuan penyambungan.

2.12.2.6. Penerbitan jawaban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap pengajuan pendaftaran oleh calon Konsumen wajib dilayani dan diterbitkan jawaban permohonan penyambungan.

b. Dalam hal jawaban permohonan penyambungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka diterbitkan nomor agenda atau kode/nomor register untuk digunakan sebagai kode pembayaran Biaya Penyambungan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

c. Jawaban permohonan penyambungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi biaya yang harus dibayar oleh calon Konsumen, yaitu:

1) Biaya Penyambungan dibayar secara lunas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN;

2) biaya pembelian Token Perdana untuk calon Konsumen Prabayar;

3) biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

d. Masa berlaku surat jawaban persetujuan adalah 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kalender apabila calon Konsumen mengajukan permohonan perpanjangan.

2.12.2.7. Persetujuan PJBTL dilaksanakan melalui penandatanganan digital PJBTL oleh PLN dan calon Konsumen paling lambat sebelum pelaksanaan penyambungan.

2.12.2.8. Pembayaran Biaya Penyambungan dan biaya lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Calon Konsumen dikenakan Biaya Penyambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN.

b. Biaya JTL yang diperlukan untuk Penyambungan Kembali merupakan JTL standar PLN.

c. Dalam hal calon Konsumen menghendaki TMP, keandalan, dan/atau estetika tertentu dalam pelaksanaan penyambungan atau terdapat ketentuan pemerintah daerah setempat sehingga dibutuhkan JTL khusus, calon Konsumen dikenakan biaya tambahan atas kegiatan tersebut.

d. Calon Konsumen yang telah melaksanakan pembayaran Biaya Penyambungan, namun penyambungan belum dapat dilaksanakan karena alasan operasional, maka Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan pengembalian

Biaya Penyambungan dan biaya lainnya yang telah dibayarkan.

e. Dalam hal calon Konsumen telah melaksanakan pembayaran Biaya Penyambungan dan kemudian membatalkan pengajuan pendaftarannya, Biaya Penyambungan yang telah dibayarkan tersebut dapat dikembalikan dengan memperhitungkan biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk kepentingan penyambungan.

f. Pembayaran dapat dilaksanakan pada kanal pembayaran PLN yang tersedia.

g. Bukti pembayaran diterbitkan bank atau pihak lain selain bank yang bekerja sama dengan PLN setelah calon Konsumen melakukan pembayaran Biaya Penyambungan dan biaya lainnya.

2.12.2.9. Setelah calon Konsumen melakukan pembayaran Biaya Penyambungan, selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:

a. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak daftar Konsumen yang sudah membayar Biaya Penyambungan di Aplikasi Pelayanan Konsumen;

b. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengajukan permintaan MPB dan aksesoris melalui nota dinas ke fungsi konstruksi untuk Unit Pelaksana dan ke fungsi distribusi untuk Unit Layanan dengan melampirkan daftar Konsumen yang sudah membayar Biaya Penyambungan;

c. Fungsi konstruksi/distribusi di Unit Pelaksana/Unit Layanan menindaklanjuti nota dinas dengan menerbitkan TUG yang berlaku dengan melampirkan daftar nomor MPB sesuai jumlah yang diminta oleh fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan;

d. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mengambil MPB dan aksesoris ke gudang Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan membawa berkas permintaan barang mengikuti ketentuan TUG yang berlaku;

e. Dalam hal jumlah dan fisik MPB sudah sesuai dengan nota dinas permintaan barang, maka fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan menandatangani bukti penerimaan barang;

f. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak SIP di Aplikasi Pelayanan Konsumen pada menu pelayanan pelanggan rekening survei cetak SIP;

g. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan aktivasi nomor MPB tersebut di Aplikasi Pelayanan Konsumen;

h. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak PK dan BA di Aplikasi Pelayanan Konsumen;

i. Fungsi administrasi Konsumen di Unit Pelaksana/Unit Layanan mencetak KCT, *Management Token,* dan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) di Aplikasi Pelayanan Konsumen, yang masing-masing Token terdiri atas 20 (dua puluh) digit angka, yaitu:

   1) KCT-1;

   2) KCT-2;

   3) CTT-1;

   4) PLT;

   5) CCT;

   6) *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT);

   7) CTT-2.

2.12.2.10. Pengaturan/*setting* MPB di kantor Unit Pelaksana/Unit Layanan PLN dilaksanakan di bawah pengawasan oleh fungsi transaksi energi listrik dengan melakukan *setting* seluruh MPB pada meja/papan *setting* prabayar dengan memasukkan 6 (enam) urutan Token prabayar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membuka *cover* terminal MPB yang akan di-*setting;*

b. Memasang MPB pada meja/papan *setting* MPB dan sambungkan kabel phasa dan netral ke terminal MPB. Lakukan *setting* sesuai urutan sebagaimana dimaksud pada butir 2.12.2.9. huruf i angka 1) sampai dengan 6) (tanpa CTT-2) untuk semua MPB;

c. Menutup *cover* terminal MPB;

d. Menyalakan MCB pada meja/papan *setting* MPB hingga semua MPB menyala dengan indikator:

   1) 2 (dua) lampu indikator menyala (merah dan kuning); dan

   2) Layar MPB tampil "Periksa".

e. Tekan *Short Code* 75 "*enter*" pada MPB untuk melihat nomor MPB. Pastikan bahwa nomor MPB tersebut sama dengan nomor yang tertera pada *barcode* MPB maupun pada cetakan Token prabayar Aplikasi Pelayanan Konsumen;

f. Masukkan KCT-1 untuk menghapus *Tariff Index* dari pabrikan MPB, hingga di layar MPB tampil "Benar";

g. Masukkan KCT-2 untuk pengisian *Tariff Index* baru, hingga di layar MPB tampil "Benar";

h. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 05 "*enter*". Hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan *Tariff Index* baru yang tertera pada hasil cetak Token prabayar dari Aplikasi Pelayanan Konsumen. Ketentuan mengenai *Tariff Index* tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

i. Masukkan CTT-1 hingga di layar MPB tampil "Benar" untuk mengaktifkan *tampering* pada MPB dan lampu indikator warna kuning tidak menyala, tampilan "Periksa" akan hilang dan pada layar MPB tampil nilai 5 kWh;

j. Masukkan *Set Max Power Load/Load Limit Token* untuk membatasi daya pada MPB sesuai dengan daya kontrak;

k. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 07 "*enter*" hasil yang tertera di layar MPB harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh) tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini;

l. Masukkan CCT untuk menghapus kWh *default* (5 kWh) dari pabrikan MPB yang ada pada setiap MPB baru;

m. Tekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk memastikan kWh *default* sudah terhapus, di layar MPB tampil 0 kWh;

n. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala dapat diindikasi *rele* rusak, maka MPB harus diganti;

o. Masukkan *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) hingga pada layar MPB tampil "Benar";

p. Cek hasilnya dengan menekan *Short Code* 37 "*enter*" untuk mengetahui nilai kWh yang dibeli Konsumen sesuai saat mengajukan permohonan PB/PD;

q. Cek terminal 2 (dua) dengan alat uji, jika menyala dapat terindikasi MPB normal, namun jika tidak menyala/kabel putus, maka terindikasi *rele* rusak dan MPB harus diganti; dan

r. Matikan MCB, lepas terminal lalu tutup kembali *cover* terminalnya.

2.12.2.11. Fungsi administrasi Konsumen menyerahkan PK dan hasil cetak Token dari Aplikasi Pelayanan Konsumen kepada petugas penyambungan untuk segera dilaksanakan pemasangan MPB ke lokasi Konsumen dan melakukan pengawasan dan monitoring hari layanan penyambungan.

2.12.2.12. Dalam hal penyambungan belum dapat dilaksanakan karena alasan operasional, maka:

a. PLN Unit setempat wajib memberikan jawaban dengan mencantumkan penjelasan atas permohonan yang tidak disetujui dan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran Biaya Penyambungan.

b. PLN akan melakukan Restitusi Biaya Penyambungan serta biaya lainnya yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.12.2.8.

2.12.2.13. Pelaksanaan penyambungan dilaksanakan berdasarkan bukti pembayaran yang telah diterbitkan, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penerbitan PK dan BA penyambungan;

b. Pelaksanaan penyambungan listrik terdiri dari:

1) Penarikan JTL;

2) Pemasangan APP;

3) Penginputan CTT-2 ke MPB;

4) Pemeriksaan pada MPB:

i. *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

ii. *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

iii. *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

iv. *Short Code* 37 "*enter*" harus sama dengan jumlah kWh pada hasil cetak *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) (dalam hal terdapat selisih 5 (lima) kWh, maka belum dilaksanakan CCT 5 (lima) kWh).

5) Foto APP;

6) Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen; dan

7) Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen.

c. Penandatanganan BA penyambungan oleh PLN dan Konsumen.

2.12.2.14. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA penyambungan, dibuat PDK sebagai dasar pembaruan DIL pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyalaan tenaga listrik.

2.12.3. Perlakuan atas permohonan yang tidak dapat dilanjutkan

Dalam hal calon Konsumen telah melaksanakan pembayaran Biaya Penyambungan dan kemudian membatalkan pengajuan pendaftarannya, maka Biaya Penyambungan yang telah dibayarkan tersebut dapat dikembalikan dengan memperhitungkan biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh PLN untuk kepentingan penyambungan.

2.13. Kegiatan Pengaduan Konsumen

2.13.1. Kegiatan pengaduan Konsumen meliputi:

2.13.1.1. pengaduan gangguan; dan

2.13.1.2. pengaduan keluhan.

2.13.2. Konsumen mengajukan pengaduan melalui:

2.13.2.1. PLN *Mobile*;

2.13.2.2. *Contact Center* PLN 123; atau

2.13.2.3. PLN Unit.

2.13.3. Data, dokumen, dan informasi Konsumen yang diperlukan meliputi:

2.13.3.1. IDPEL/Nomor Meter;

2.13.3.2. nama pelapor/Konsumen;

2.13.3.3. nomor telepon pelapor/Konsumen;

2.13.3.4. alamat lokasi kejadian; dan

2.13.3.5. jenis pengaduan.

2.13.4. Konsumen yang mengajukan pengaduan akan diberikan nomor pengaduan gangguan/keluhan.

2.13.5. Nomor pengaduan gangguan/keluhan merupakan nomor yang dikeluarkan melalui sistem Aplikasi Pengaduan.

2.13.6. Pengaduan gangguan meliputi dan tidak terbatas pada:

2.13.6.1. gangguan instalasi PLN; dan

2.13.6.2. gangguan MPB.

2.13.7. Pengaduan keluhan meliputi dan tidak terbatas pada:

2.13.7.1. Konsumen/pelapor tidak dapat membeli Token karena Nomor Meter tidak terdaftar.

2.13.7.2. Konsumen/pelapor tidak dapat melakukan transaksi pembelian Token.

2.13.7.3. Konsumen/pelapor berhasil melakukan transaksi pembelian, namun nomor Token tidak terbit.

2.13.7.4. Konsumen/pelapor mendapatkan Token tidak jelas, buram, tidak lengkap atau terpotong.

2.13.7.5. Konsumen/pelapor mendapatkan Token tetapi setelah diinputkan kWh tidak bertambah.

2.13.7.6. Konsumen/pelapor mendapatkan Token tetapi nomor Token ditolak meter.

2.13.7.7. Konsumen/pelapor menginput Token pada MPB namun tampil notifikasi "USANG".

2.13.7.8. MPB tampil notifikasi "Periksa".

2.13.7.9. Keluhan percepatan layanan penyambungan.

2.13.8. Penanganan pengaduan keluhan sebagaimana dimaksud pada butir 2.13.7 dilakukan sebagai berikut:

2.13.8.1. Dalam hal Konsumen/pelapor tidak dapat membeli Token karena Nomor Meter tidak terdaftar, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan tidak dapat membeli Token karena Nomor Meter tidak terdaftar;

b. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, tanggal/jam transaksi, tempat/alamat transaksi, dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

c. Operator melakukan pengecekan pada sistem P2APST untuk mengetahui apakah Nomor Meter yang diberikan Konsumen/pelapor valid atau tidak; dan

d. Operator menghubungi dan memberitahukan kepada Konsumen/pelapor melakukan pemeriksaan Nomor Meter yang tertera pada fisik meter atau pada struk pembelian, kemudian melakukan transaksi ulang dengan menggunakan Nomor Meter yang benar.

2.13.8.2. Dalam hal Konsumen/pelapor tidak dapat melakukan transaksi pembelian Token, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan tidak dapat melakukan transaksi pembelian Token;

b. Operator menanyakan terkait kondisi setempat, meliputi:

1) gangguan jaringan listrik padam.

2) gangguan jaringan komunikasi.

c. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi terkait kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, tanggal/jam

transaksi, tempat/alamat transaksi dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

e. Operator melakukan eskalasi atas keluhan yang masuk ke bidang terkait untuk mengonfirmasi dan mendapatkan cara penyelesaian keluhan tersebut; dan

f. Operator menyampaikan informasi/notifikasi kepada Konsumen agar melakukan transaksi pembelian Token melalui PLN *Mobile* atau di kanal pembelian lainnya.

2.13.8.3. Dalam hal Konsumen/pelapor berhasil melakukan transaksi pembelian namun nomor Token tidak terbit, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan tidak mendapatkan Token pada saat transaksi pembelian Token;

b. Operator menanyakan kepada Konsumen/pelapor jenis keluhannya yang meliputi:

1) Konsumen/pelapor tidak mendapatkan bukti pembelian Token; atau

2) Konsumen/pelapor mendapatkan bukti pembelian Token tetapi tidak tercantum nomor Token.

c. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, tanggal/jam transaksi, nomor referensi bukti pembelian Token, nama bank, kanal transaksi, dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

d. Operator melakukan pengecekan pada sistem P2APST untuk mengetahui apakah Token ter-*generate* atau tidak; dan

e. Operator menginformasikan kepada Konsumen/pelapor dengan memberitahukan:

1) Nomor Token, jika Token ter-*generate*.

2) Dalam hal Token belum ter-*generate*, maka bank akan mengkredit/mengembalikan saldo pembelian Token ke rekening Konsumen, dan Konsumen/pelapor diinformasikan untuk melakukan pembelian Token listrik kembali.

2.13.8.4. Dalam hal Konsumen/pelapor mendapatkan Token tidak jelas, buram, tidak lengkap atau terpotong, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan Token yang tercetak pada bukti pembelian tidak jelas, buram, tidak lengkap atau terpotong;

b. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, tanggal/jam transaksi, kanal transaksi dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor; dan

c. Operator melakukan pengecekan nomor Token tersebut melalui sistem P2APST, kemudian memberikan nomor Token tersebut kepada Konsumen/pelapor.

2.13.8.5. Dalam hal Konsumen/pelapor mendapatkan Token, namun setelah diinputkan kWh tidak bertambah, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan jumlah kWh di MPB tidak bertambah setelah Token diinput;

b. Operator menanyakan terkait cara input Token yang dilakukan Konsumen/pelapor, meliputi:

1) Penginputan 20 (dua puluh) digit nomor Token dilakukan dengan benar dan diakhiri dengan menekan tombol *enter.*

2) Pesan "BENAR" tampil pada layar LCD meter setelah menekan tombol *enter*.

3) Nomor Token terakhir yang berhasil diinput dengan menekan *Short Code* 54 "*enter*" atau jumlah kredit kWh terakhir yang diterima meter dengan menekan *Short Code* 59 "*enter*".

4) Total pengisian kredit (kWh) dengan menekan *Short Code* 38 "*enter*".

c. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, nomor Token terakhir yang sudah diinput, total pengisian kredit (kWh), tanggal/jam transaksi, kanal transaksi dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

d. Operator melakukan pengecekan melalui sistem P2APST untuk memastikan bahwa nomor Token yang

diberikan Konsumen/pelapor sudah sesuai dengan nomor Token yang tampil pada sistem P2APST;

e. Dalam hal nomor Token yang diberikan Konsumen/pelapor tidak sesuai dengan nomor Token yang tampil pada sistem P2APST, maka Operator memberikan nomor Token tersebut kepada Konsumen/pelapor; dan

f. Dalam hal nomor Token yang diberikan Konsumen/pelapor sudah sesuai dengan nomor Token yang tampil pada sistem P2APST, maka operator mengarahkan Konsumen/pelapor untuk mendatangi Kantor PLN setempat.

2.13.8.6. Dalam hal Konsumen/pelapor mendapatkan Token, namun nomor Token ditolak meter, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan nomor Token ditolak meter;

b. Operator menanyakan tampilan di layar LCD pada saat dilakukan input Token, meliputi:

1) tampil pesan “GAGAL”; atau

2) tampil pesan “PERIKSA”.

c. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, nomor Token, dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

d. Operator melakukan pengecekan pada sistem P2APST untuk memastikan bahwa nomor Token yang diberikan Konsumen/pelapor sudah sesuai, dengan ketentuan senagai berikut:

1) Dalam hal nomor Token yang diberikan sudah sesuai, maka Konsumen diarahkan untuk menginput ulang.

2) Dalam hal nomor Token yang diberikan tidak sesuai, maka operator memberikan nomor Token yang sesuai kepada Konsumen/pelapor.

e. Dalam hal nomor Token yang diberikan Konsumen/pelapor sudah sesuai, namun tetap tidak dapat diinput, maka operator melakukan eskalasi ke Petugas Yantek untuk kemudian mendatangi lokasi Konsumen/pelapor.

2.13.8.7. Dalam hal Konsumen/pelapor menginput Token pada MPB namun tampil notifikasi "USANG", maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan tentang keluhan input Token pada MPB, namun tampil notifikasi "USANG";

b. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, tanggal/jam transaksi, dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

c. Petugas Yantek mendatangi Konsumen untuk memverifikasi notifikasi "USANG". Dalam hal setelah Token diinput ulang tampil notifikasi "USANG", maka petugas mendokumentasikan notifikasi "USANG" tersebut untuk selanjutnya dibuatkan Token pengganti melalui *free issue* Token; dan

d. Operator menyampaikan informasi/notifikasi kepada Konsumen/pelapor agar melakukan transaksi pembelian Token melalui PLN *Mobile* atau di kanal pembelian lainnya.

2.13.8.8. Dalam hal MPB tampil notifikasi "PERIKSA", maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan keluhan tentang MPB tampil notifikasi "PERIKSA";

b. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, tanggal/jam transaksi, tempat/alamat transaksi, dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

c. Untuk keluhan yang disampaikan melalui *Contact Center* PLN 123, Konsumen akan dipandu untuk memasukkan *Short Code* sebagai berikut:

1) 08 *enter* = Mengetahui penyebab periksa
2) 70 enter = Mengetahui berapa kali *open* terminal
3) 71 enter = Mengetahui berapa kali *open* cover
4) 41 enter = Mengetahui tegangan di meter
5) 44 enter = Mengetahui Arus RMS
6) 45 enter = Mengetahui Arus Phasa
7) 46 enter = Mengetahui Arus Netral

8) 37 enter = Mengetahui sisa pulsa

9) *Short Code* di atas dapat dilaksanakan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan PLN

d. Selanjutnya keluhan dieskalasi ke *Command Center* untuk dilakukan validasi dan *approval*;

e. *Command Center* akan menerbitkan CTT bagi keluhan yang disampaikan melalui *Contact Center* PLN 123 dengan ketentuan:

1) Dalam hal diagnosis tidak menunjukkan anomali, maka *Command Center* menghubungi Konsumen untuk menyampaikan CTT. Dalam hal Konsumen gagal input CTT, maka *Command Center* akan mengirimkan Petugas Yantek untuk mendatangi lokasi Konsumen.

2) Dalam hal diagnosis menunjukkan anomali, maka *Command Center* akan mengirimkan Petugas Yantek untuk mendatangi lokasi Konsumen.

f. Dalam hal laporan keluhan Konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf e belum dapat diselesaikan, maka selanjutnya ditindaklanjuti melalui mekanisme meter rusak;

g. Untuk keluhan yang disampaikan melalui PLN *Mobile*, maka Konsumen melakukan *self diagnosis* pada aplikasi PLN *Mobile;*

h. Selanjutnya keluhan dieskalasi ke *Command Center* untuk dilakukan validasi dan *approval*;

i. *Command Center* akan menerbitkan CTT bagi keluhan yang disampaikan PLN *Mobile* dengan ketentuan:

1) Dalam hal diagnosis tidak menunjukkan anomali, maka Konsumen akan menerima notifikasi CTT. Dalam hal Konsumen gagal input CTT, maka Petugas Yantek untuk mendatangi lokasi Konsumen.

2) Dalam hal diagnosis menunjukkan anomali, maka Petugas Yantek untuk mendatangi lokasi Konsumen.

j. Dalam hal laporan keluhan Konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf i belum dapat diselesaikan, maka

selanjutnya ditindaklanjuti melalui mekanisme meter rusak.

2.13.8.9. Dalam hal keluhan percepatan layanan, maka dilakukan tahapan sebagai berikut:

a. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan keluhan tentang hari layanan PB, PD, PS, perubahan layanan, perubahan golongan tarif, dan PDK;

b. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, IDPEL/nomor agenda, alamat dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor;

c. Operator melakukan pengecekan ke sistem Aplikasi Pelayanan Konsumen atau unit terkait untuk memastikan progres dan kendala; dan

d. Operator menghubungi dan memberitahukan kepada Konsumen/pelapor tentang progres dan estimasi penyelesaian pekerjaan.

2.13.9. Penanganan pengaduan gangguan instalasi PLN sebagaimana dimaksud pada butir 2.13.6.1 dilakukan sebagai berikut:

2.13.9.1. Konsumen/pelapor menyampaikan aduan gangguan ke PLN *Mobile* atau *Contact Center* 123 tentang gangguan instalasi PLN.

2.13.9.2. Konsumen/pelapor menyampaikan informasi meliputi dan tidak terbatas pada Nomor Meter, IDPEL/nomor agenda, alamat, dan nomor telepon/HP Konsumen/pelapor.

2.13.9.3. Operator memproses laporan gangguan instalasi PLN pada Aplikasi Pengaduan.

2.13.9.4. Petugas Yantek menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan gangguan instalasi PLN dengan mendatangi lokasi dan/atau menghubungi Konsumen.

2.13.9.5. Petugas Yantek menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan Konsumen.

2.13.9.6. Petugas Yantek menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan gangguan instalasi PLN dengan mendatangi lokasi dan/atau menghubungi Konsumen selain laporan gangguan padam meluas.

2.13.9.7. Dalam hal laporan gangguan instalasi PLN termasuk ke dalam gangguan padam meluas, maka operator melakukan

marking padam meluas dan Petugas Yantek tidak datang ke lokasi Konsumen.

2.13.10. Penanganan pengaduan gangguan MPB sebagaimana dimaksud pada butir 2.13.6.2 meliputi dan tidak terbatas pada:

2.13.10.1. MPB nyala, listrik pada Persil Konsumen padam

a. Kredit kWh habis

1) Cek *display* untuk melihat status kWh yang menunjukkan 0 (nol) kWh.

2) Konsumen/pelapor disarankan untuk membeli Token/*stroom* melalui PLN *Mobile* atau di kanal pembelian lainnya.

b. Kelebihan pemakaian dari daya tersambung cek *display*, untuk:

1) 4 (empat) terminal, akan tampil "OVER PO".

2) 5 (lima) terminal, akan tampil "DY LEBIH".

Petugas Yantek menginformasikan ke Konsumen/pelapor bahwa terdapat pemakaian listrik yang lebih besar dari daya tersambung dengan kriteria sebagai berikut:

1) Beban yang melebihi daya terpasang, maka MPB akan mengeluarkan bunyi alarm;

2) Dalam hal beban lebih berlangsung kontinu selama 45 (empat puluh lima) detik, listrik akan padam dan tampil "DY LEBIH" pada display. Listrik akan menyala kembali secara otomatis setelah 150 (seratus lima puluh) detik;

3) Dalam hal selama 30 (tiga puluh) menit terjadi beban lebih tidak kontinu beberapa kali dengan akumulasi waktu 45 (empat puluh lima) detik, listrik akan padam dan tampil "DY LEBIH" pada *display*. Listrik akan kembali secara otomatis setelah 150 (seratus lima puluh) detik;

4) Dalam hal selama 30 (tiga puluh) menit terjadi listrik padam akibat beban lebih sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut, listrik akan padam dan tampil "TERPUTUS" pada *display*. Listrik akan menyala kembali secara otomatis setelah 45 (empat puluh lima) menit;

5) Petugas Yantek dapat menunjukkan kepada Konsumen data jumlah *trip* karena beban lebih dengan menekan *Short Code* 68 "*enter*".

Petugas Yantek memberikan saran agar Konsumen/pelapor melakukan penambahan daya atau mengurangi beban pemakaian listriknya.

c. *Tampering*

1) Dalam hal terdapat status *tampering* dan ditemukan kelainan pada segel APP, Petugas Yantek melaporkan ke koordinator Yantek di kantor untuk diteruskan ke tim P2TL, dan listrik Konsumen dibiarkan padam.

2) Dalam hal ditemukan status *tampering* namun segel APP normal, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tutup terminal MPB terpasang dengan benar dengan cara sebagai berikut:

i. 4 (empat) terminal:

a) ESTAT1, perbaiki kedudukan/posisi tutup terminal MPB dan tekan *Short Code* 08 "*enter*" lagi sampai tampil ESTAT0.

b) Setelah perbaikan, masukkan CTT dan penyegelan tutup terminal MPB.

c) Aktivitas pembukaan, perbaikan, dan penutupan serta penyegelan kembali pada tutup terminal MPB dilakukan pendokumentasian kegiatan pada Aplikasi Pengaduan.

d) Setelah memasukkan CTT MPB belum normal, maka perlu penggantian MPB.

Petugas Yantek melaporkan "MPB rusak" ke fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan untuk dilakukan penggantian MPB oleh Petugas Harmet.

ii. 5 (lima) Terminal:

a) Tekan *Short Code* 08 "*enter*" untuk mengetahui status *tampering* dengan uraian dan tindak lanjut sebagaimana status *tampering* pada SPLN yang berlaku.

b) Setelah perbaikan kedudukan/posisi tutup terminal MPB, masukkan CTT dan pastikan MPB menyala normal sebelum dilakukan penyegelan tutup terminal MPB.

c) Setelah memasukkan CTT MPB belum normal, maka perlu penggantian MPB.

Petugas Yantek melaporkan MPB rusak ke fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan untuk dilakukan penggantian MPB oleh Petugas Harmet.

d. Rele rusak

1) 4 (empat) terminal atau 5 (lima) terminal tekan *Short Code* 01 "*enter*".

2) Dalam hal MPB terdengar bunyi *rele* dan listrik nyala sesaat berarti *rele* dalam kondisi normal, tetapi jika tidak bunyi dan tidak nyala berarti *rele* dalam kondisi rusak. Petugas Yantek melaporkan MPB rusak ke fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan untuk dilakukan penggantian MPB oleh Petugas Harmet.

e. Permasalahan instalasi milik Konsumen

1) Cek kondisi MCB apakah masih dalam kondisi baik atau dalam keadaan "*on*".

2) Dalam hal kondisi MCB normal, cek kondisi MPB dengan memasukkan STS *test* Token (5649-3153-7254-5031-3471) untuk memastikan MPB tidak rusak.

3) Dalam hal tidak ada kerusakan pada MPB, maka penyebab gangguan ada pada instalasi Konsumen dan disarankan kepada Konsumen untuk memperbaiki instalasi melalui kontraktor pembangunan pemasangan instalasi listrik (bangsang) yang terdaftar di Direktorat Jendral Ketenagalistrikan.

2.13.10.2. MPB padam, listrik pada Persil Konsumen padam

a. Petugas Yantek melakukan pengecekan kondisi MPB untuk memastikan ada atau tidaknya aliran tegangan listrik pada MPB tersebut.

b. Dalam hal MPB tidak teraliri tegangan listrik, maka petugas melakukan pengecekan kabel SR dari MPB hingga tiang dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kelainan.

c. Selanjutnya petugas melakukan pengecekan kembali MPB dalam kondisi baik atau tidak, jika MPB masih belum normal, periksa sambungan ke terminal MPB dan periksa tegangan pada kabel SR yang menyambung ke MPB.

d. Perbaiki sambungan sampai MPB menyala, kemudian masukkan CTT dan pastikan MPB menyala normal sebelum dilakukan penyegelan tutup terminal MPB.

e. Dalam hal MPB masih tidak nyala, maka selanjutnya dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 2.13.9.

2.13.11. Pengaduan gangguan/keluhan diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di PLN.

2.13.12. Penyelesaian pengaduan gangguan/keluhan harus disampaikan kepada Konsumen sebagai informasi bahwa pengaduan gangguan/keluhan telah diselesaikan.

2.13.13. Perubahan status pengaduan gangguan/keluhan pada Aplikasi Pengaduan dilaksanakan berdasarkan status pelaksanaan penyelesaian pengaduan gangguan/keluhan.

2.14. Meter Rusak

Gangguan meter rusak merupakan gangguan MPB yang berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang diperlukan penggantian meter.

2.14.1. Penanganan gangguan meter rusak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.14.1.1. Tidak boleh melakukan sambung langsung dan hanya menggunakan MPB.

2.14.1.2. Meter rusak yang sudah dibongkar wajib dikembalikan ke gudang mengikuti ketentuan TUG yang berlaku.

2.14.1.3. Prioritas awal dilakukan penggantian secara langsung dengan MPB baru sesuai dengan tarif dan daya Konsumen.

2.14.1.4. Dalam hal penggantian secara langsung sebagaimana dimaksud pada butir 2.14.1.3 tidak bisa dilakukan, maka dapat menggunakan MPB Siaga sesuai dengan tarif dan

daya Konsumen dan batas penggunaan MPB Siaga tersebut maksimal 5 (lima) hari kalender.

2.14.1.5. Atas sisa kWh di MPB lama akan diterbitkan *free issue* Token senilai yang tertera pada layar.

2.14.1.6. Dalam hal sisa kWh tidak dapat terbaca, maka sementara diterbitkan *free issue* Token sebesar 5 (lima) kWh untuk dimasukkan pada MPB Siaga dan diperhitungkan sebagai kewajiban yang kemudian dilakukan pemotongan pada saat pembelian Token berikutnya pada MPB baru.

2.14.1.7. Atas kondisi MPB dengan layar tidak dapat dibaca, maka dapat dilakukan tindakan lanjutan sebagai berikut:

a. Pengambilan data diupayakan melalui *Optical Probe* atau melalui memori MPB.

b. Dalam hal dari huruf a angka sisa kWh lama tidak bisa didapatkan, maka dilakukan perhitungan dengan cara:

1) Sisa kWh = Pembelian *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) (kWh) terakhir – (rata-rata pemakaian harian x (tanggal kejadian – tanggal pembelian Token terakhir)).

2) Rata-rata pemakaian harian = total pembelian kWh selama 6 (enam) bulan dibagi jumlah hari selama 6 (enam) bulan terakhir.

3) Dalam hal Konsumen berlangganan belum sampai 6 (enam) bulan, maka rata-rata pemakaian harian menggunakan laporan penjualan tenaga Listrik Prabayar pada PLN Unit tersebut di golongan tarif dan daya yang sama.

2.14.1.8. Dalam hal pada layar MPB menampilkan kWh *Minus*, maka sejumlah kWh *Minus* tersebut ditagihkan kepada Konsumen melalui mekanisme TS kWh.

2.14.1.9. Setiap Unit Pelaksana/Unit Layanan agar menyediakan MPB baru dan MPB Siaga sesuai dengan profil volume gangguan meter.

2.14.1.10. Penggantian meter rusak dengan pemasangan MPB Siaga atau MPB baru dilakukan oleh Petugas Harmet yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang APP.

2.14.1.11. Setiap Unit Pelaksana/Unit Layanan agar menyiapkan petugas siaga 24 (dua puluh empat) jam terdiri dari:

a. Petugas Harmet untuk penggantian meter rusak; dan

b. Petugas fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan untuk aktifasi dan *create* KCT, *Management Token,* dan *free issue Token*.

2.14.1.12. Penanggung jawab petugas siaga atas kegiatan yang dilakukan petugas sebagaimana dimaksud pada butir 2.14.1.11 adalah Manager Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.14.1.13. Konsumen membeli *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) sesuai Nomor Meter MPB Siaga, dan sisa kWh pada MPB Siaga yang telah dibongkar ditambahkan ke dalam MPB baru yang akan dipasang.

2.14.2. Mekanisme penanganan meter rusak dengan pemasangan MPB baru

Penggantian MPB baru dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

2.14.2.1. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menyiapkan MPB baru dan melakukan aktivasi MPB, menerbitkan KCT*, Management Token*, *free issue Token* meter rusak dan melakukan *setting* MPB baru selanjutnya disampaikan ke Petugas Harmet;

2.14.2.2. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menerbitkan PK dan BA penyambungan;

2.14.2.3. Pemeriksaan fisik awal sebelum pemasangan MPB baru meliputi:

a. Pemeriksaan SR;

b. Pemeriksaan pembatas daya;

c. Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

d. Pemeriksaan *keypad* dan *display* MPB;

e. Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED);

f. Pemeriksaan segel APP;

g. *Short Code* 08 "*enter*" pengecekan status *tampering*; dan

h. Pencatatan dan pengambilan gambar/foto sisa kWh lama pada form BA pemeriksaan APP.

2.14.2.4. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan butir 2.14.2.3, maka petugas dapat menangguhkan penggantian MPB baru dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan P3TL atau P2TL.

2.14.2.5. Petugas Harmet melakukan penggantian MPB dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembongkaran MPB lama dan pemasangan MPB baru;

b. Penginputan CTT;

c. Pemeriksaan *default* 5 (lima) kWh untuk memastikan CCT sudah diinput dengan menekan *Short Code* 37 "*enter*" dan pada layar MPB nilai kredit kWh harus 0 (nol); dan

d. Penginputan *free issue Token* meter rusak.

2.14.2.6. Pemeriksaan pada MPB baru:

a. *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

b. *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

c. *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

d. *Short Code* 37 "*enter*" kredit kWh harus sama dengan *free issue Token* meter rusak.

2.14.2.7. Foto APP;

2.14.2.8. Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

2.14.2.9. Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen; dan

2.14.2.10. Penandatanganan BA penggantian MPB baru oleh PLN dan Konsumen.

2.14.3. Mekanisme penanganan meter rusak dengan pemasangan MPB Siaga

Pelaksanaan penggantian MPB rusak dengan menggunakan MPB Siaga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

2.14.3.1. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menerbitkan Token dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal *Tariff Index* MPB Siaga sudah sama dengan *Tariff Index* Konsumen, maka Token yang diterbitkan adalah CTT, CCT, dan *free issue Token.*

b. Dalam hal *Tariff Index* MPB Siaga tidak sama dengan *Tariff Index* Konsumen, maka Token yang diterbitkan adalah KCT, *Management Token,* dan *free issue Token,*

agar *Tariff Index* MPB Siaga sesuai dengan *Tariff Index* Konsumen.

c. Petugas transaksi energi listrik melakukan *setting* MPB Siaga.

d. Selanjutnya MPB Siaga diserahkan ke Petugas Harmet.

2.14.3.2. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menerbitkan *working order* (WO) ke Petugas Harmet;

2.14.3.3. Pemeriksaan fisik awal sebelum pemasangan MPB Siaga meliputi:

a. Pemeriksaan SR;

b. Pemeriksaan pembatas daya;

c. Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

d. Pemeriksaan *keypad* dan *display* MPB;

e. Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED);

f. Pemeriksaan segel APP; dan

g. *Short Code* 08 "*enter*" pengecekan status *tampering*.

2.14.3.4. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan butir 2.14.3.3, maka petugas dapat menangguhkan penggantian meter sementara dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan P3TL atau P2TL;

2.14.3.5. Pencatatan dan pengambilan gambar/foto sisa kWh pada MPB lama yang rusak pada form BA pemeriksaan APP;

2.14.3.6. Petugas Harmet melakukan pemasangan MPB Siaga dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembongkaran MPB lama dan pemasangan MPB Siaga;

b. Penginputan CTT;

c. Pemeriksaan pada MPB Siaga:

1) *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

2) *Short Code 05 "enter"* harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

3) *Short Code 07 "enter"* harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

4) *Short Code 37 "enter"* kredit kWh harus 0 (nol).

2.14.3.7. Penginputan *Credit Token (CT)/Electricity Credit Token (ECT)* (*free issue Token*) MPB Siaga disesuaikan dengan golongan tarif dan peruntukan serta diperhitungkan sebagai kewajiban yang selanjutnya akan dilakukan pemotongan pada saat pembelian Token berikutnya pada MPB baru;

2.14.3.8. Foto APP;

2.14.3.9. Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen;

2.14.3.10. Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen; dan

2.14.3.11. Penandatanganan BA penggantian MPB Siaga dan penggantian *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) (*free issue Token*) oleh PLN dan Konsumen.

2.14.4. Mekanisme penormalan

Penormalan penggantian MPB Siaga dilaksanakan pada saat MPB baru tersedia dengan tahapan sebagai berikut:

2.14.4.1. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menyiapkan MPB baru dan melakukan aktivasi MPB, menerbitkan KCT, *Management Token*, *free issue Token* sisa kWh dari MPB lama dan melakukan *setting* MPB baru selanjutnya disampaikan ke Petugas Harmet.

2.14.4.2. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menerbitkan PK dan BA penggantian meter.

2.14.4.3. Pemeriksaan fisik awal sebelum penormalan meliputi:

a. Pemeriksaan SR;

b. Pemeriksaan pembatas daya;

c. Pemeriksaan tutup terminal dan tutup meter;

d. Pemeriksaan *keypad* dan *display* MPB;

e. Pemeriksaan indikasi *tampering* (*display* maupun di lampu LED);

f. Pemeriksaan segel APP; dan

g. *Short Code* 08 "*enter*" pengecekan status *tampering*.

2.14.4.4. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dari hasil pemeriksaan butir 2.14.4.3, maka petugas dapat menangguhkan penggantian MPB baru dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan P3TL atau P2TL.

2.14.4.5. Pencatatan dan pengambilan gambar/foto sisa kWh pada MPB Siaga pada form BA pemeriksaan APP.

2.14.4.6. Pemasangan MPB baru, terdiri dari:

a. Pembongkaran MPB Siaga dan pemasangan MPB baru;

b. Penginputan CTT ke MPB;

c. Penginputan sisa kWh dari MPB lama;

d. Pemeriksaan pada MPB:

1) *Short Code* 41 "*enter*" nilai tegangan tidak sama dengan 0 (nol).

2) *Short Code* 05 "*enter*" harus sama dengan *Tariff Index* Konsumen.

3) *Short Code* 07 "*enter*" harus sama dengan daya kontrak (kVA) x 1,7 (satu koma tujuh).

4) *Short Code* 37 "*enter*" harus sama dengan jumlah kWh pada hasil cetak *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) (dalam hal terdapat selisih 5 (lima) kWh dan belum dilakukan CCT 5 (lima) kWh, maka selanjutnya akan dilakukan pemotongan pada pembelian Token berikutnya).

e. Foto APP;

f. Melakukan penandaan titik koordinat lokasi Konsumen; dan

g. Penyalaan sambungan listrik di Persil/bangunan Konsumen.

2.14.4.7. Penandatanganan BA penggantian meter oleh PLN dan Konsumen.

2.14.4.8. Aktivasi DIL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan BA penggantian meter, dibuat PDK sebagai dasar pembaruan DIL pada Aplikasi Pelayanan Konsumen.

b. Seluruh data, dokumen, dan informasi terkait dengan Konsumen disimpan dalam AIL digital.

c. Aktivasi DIL dilaksanakan pada hari yang sama dengan Penyalaan tenaga listrik.

d. Aktivasi DIL tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyalaan tenaga listrik.

2.14.5. Mekanisme pengembalian sisa kWh

2.14.5.1. Dalam hal Konsumen memiliki sisa kWh pada MPB lama atau MPB Siaga, maka sisa kWh diberikan kepada Konsumen.

2.14.5.2. Token listrik sisa kWh sebagaimana dimaksud pada butir 2.14.5.1 diberikan kepada Konsumen berupa Token terpisah bersamaan pada saat pembelian Token berikutnya.

2.14.6. Mekanisme pengelolaan MPB Siaga dan MPB pengganti meter rusak

Pengelolaan terhadap MPB Siaga dan MPB pengganti meter rusak dilakukan oleh fungsi yang menangani Yantek pada masing-masing Unit Pelaksana/Unit Layanan dengan ketentuan sebagai berikut:

2.14.6.1. Dalam upaya optimalisasi jumlah MPB Siaga di unit, maka UID/UIW dapat melakukan perubahan golongan tarif dan daya (*Tariff Index*) sesuai kebutuhan.

2.14.6.2. MPB Siaga harus terdaftar sebagai Konsumen atas nama PLN Unit Pelaksana/Unit Layanan setempat dan diberikan penanda khusus berupa label yang dipasang pada fisik meter.

Format nama meter: [KODE UNIT UP 5 DIGIT]_SIAGA_[NOMOR URUT 4 DIGIT]

Contoh: 54321_SIAGA_0001

2.14.6.3. Aktivasi MPB Siaga dilayani dengan BP Rp0,-.

2.14.6.4. Pengawasan terhadap penggunaan MPB pengganti meter rusak, MPB Siaga dan kesesuaian Stok menjadi tanggung jawab fungsi teknik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.14.6.5. Pembuatan KCT, *Management Token,* dan *free issue Token* khusus untuk penanganan meter rusak dilakukan oleh fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.14.6.6. MPB Siaga dan MPB pengganti meter rusak harus terdata serta termonitor secara digital dan *real time* sebagai bentuk kegiatan monitoring penanganan gangguan meter rusak terdiri dari dan tidak terbatas pada:

a. rincian data meter;

b. jumlah total meter;

c. jumlah meter yang terpasang di Konsumen;

d. jumlah Stok sisa meter;

e. status kondisi meter; dan

f. rincian Konsumen yang sedang terpasang meter siaga.

2.14.6.7. Pemeriksaan kesesuaian data jumlah meter dengan kondisi fisik yang dilakukan secara periodik setiap bulan.

2.14.6.8. Dalam hal terdapat MPB Siaga rusak, maka segera diganti dengan MPB Siaga yang baru sesuai mekanisme penggantian meter rusak.

2.15. Klaim Garansi Meter Prabayar Rusak

Klaim garansi MPB rusak diatur berdasarkan *layer* UID/UIW yaitu 3 (tiga) *layer* dan 2 (dua) *layer*.

2.15.1. Uraian prosedur klaim garansi

2.15.1.1. Klaim garansi berasal dari pekerjaan penanganan pengaduan gangguan ataupun pemeliharaan MPB di Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.15.1.2. Petugas Harmet sebagai pelaksana pekerjaan penggantian MPB mengembalikan MPB rusak hasil penggantian ke fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan.

2.15.1.3. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan memeriksa fisik MPB rusak, membuat monitoring dan rekap MPB rusak serta mengelompokkan dan mengemas berdasarkan merek, tahun pembuatan, dan masa garansi.

2.15.1.4. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan menyimpan ke gudang, sesuai dengan merek, tahun pembuatan, dan masa garansi.

2.15.1.5. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan mengembalikan MPB rusak dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Untuk UID/UIW dengan 2 (dua) *layer*

1) fungsi transaksi energi listrik Unit Layanan mengembalikan MPB rusak ke gudang Unit Pelaksana dengan menyertakan bon pengembalian non SAP.

2) Bon pengembalian sebagaimana dimakud pada angka 1) ditandatangani fungsi transaksi energi listrik Unit Layanan, Manager Unit Layanan, fungsi logistik Unit Pelaksana dan disetujui oleh Assistant Manager fungsi konstruksi Unit Pelaksana.

b. Untuk UID/UIW dengan 3 (tiga) *layer*

1) fungsi transaksi energi listrik Unit Pelaksana mengembalikan ke gudang Unit Pelaksana, sesuai dengan merek, tahun pembuatan, dan masa garansi dengan menyertakan bon pengembalian non SAP.
2) Bon pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani fungsi transaksi energi listrik Unit Pelaksana, fungsi logistik Unit Pelaksana dan disetujui oleh Assistant Manager fungsi konstruksi Unit Pelaksana.

2.15.1.6. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana menyimpan MPB rusak dengan pemilahan sebagai berikut:

a. MPB rusak masih masa garansi; dan

b. MPB rusak habis masa garansi dan dikategorikan sebagai limbah, yang secara berkala diusulkan untuk dilakukan penghapusan limbah ke UID/UIW.

2.15.1.7. Dalam hal MPB rusak masih memiliki garansi, maka:

a. Melakukan proses pemindahan material secara *virtual* (*transfer posting*) dari *warehouse* Unit Pelaksana ke *plant in-transit* di SAP, kemudian ditandatangani fungsi logistik pada Unit Pelaksana.

b. Melakukan proses permintaan perbaikan barang ke pabrikan di SAP yang ditandatangani fungsi logistik pada Unit Pelaksana dan disetujui oleh Manager bagian konstruksi minimal memuat Nomor Meter, tahun produksi, merek, tipe, dan jenis kerusakan, disertai dengan surat klaim yang ditandatangani oleh Manager Unit Pelaksana, dengan tembusan General Manager UID/UIW.

2.15.1.8. Unit Pelaksana menyimpan MPB yang akan diklaim garansi pada tempat khusus yang disediakan oleh Unit Pelaksana.

2.15.1.9. Unit Pelaksana bersama dengan pabrikan melakukan pemeriksaan visual sebagai verifikasi awal, antara lain pemeriksaan tahun produksi dan kondisi awal meter.

2.15.1.10. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana menerbitkan surat pengantar barang/surat jalan dari gudang, yang ditandatangani fungsi logistik pada Unit Pelaksana, *security* (satuan pengamanan gudang), dan kemudian pabrikan mengambil MPB rusak yang masih garansi.

2.15.1.11. Pabrikan memeriksa dan memverifikasi MPB rusak yang masih dalam masa garansi, kemudian atas hasil pemeriksaan dan verifikasi tersebut apabila masuk dalam kriteria klaim garansi, pabrikan harus mengganti dengan material MPB baru, serta mengirimkan ke gudang Unit Pelaksana termasuk MPB yang tidak berhasil dilakukan klaim.

2.15.1.12. Pabrikan harus memberikan klarifikasi pada setiap MPB yang dilakukan klaim, baik berhasil klaim maupun yang gagal klaim dengan keterangan lengkap (alasan berhasil/tidak berhasil klaim).

2.15.1.13. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana menerima MPB pengganti di gudang.

2.15.1.14. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana melakukan proses pemindahan material secara *virtual* (*transfer posting*) ke *plant in-transit* di SAP, selanjutnya dari *plant in-transit* ke *warehouse* Unit Pelaksana di SAP kemudian menandatanganinya dan disetujui oleh Manager fungsi konstruksi.

2.15.1.15. Tim pemeriksa melakukan Pemeriksaan MPB pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal MPB pengganti yang diterima kondisi tidak baik dan tidak sesuai, maka harus dikembalikan lagi ke pabrikan.

b. Dalam hal MPB pengganti kondisi baik dan sudah sesuai, maka selanjutnya dilakukan proses penerimaan di gudang Unit Pelaksana.

2.15.1.16. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana menerbitkan BA pemeriksaan barang/*spare part* di SAP, kemudian ditandatangani oleh tim pemeriksa dan disetujui oleh Manager Unit Pelaksana.

2.15.1.17. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana melakukan proses penerimaan dengan menerbitkan bon penerimaan di SAP, kemudian menandatanganinya dan disetujui oleh Manager fungsi konstruksi.

2.15.1.18. Fungsi logistik pada Unit Pelaksana melakukan penyimpanan dan penataan MPB pengganti di gudang dan membuat laporan penerimaan material atas klaim MPB garansi dari pabrikan.

2.15.1.19. Assistant Manager fungsi konstruksi dan Assistant Manager fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan mengevaluasi laporan monitoring klaim MPB garansi dan mengirimkannya ke UID/UIW.

2.15.1.20. Fungsi logistik dan fungsi pengendalian sistem meter tiap UID/UIW melakukan evaluasi dan monitoring MPB garansi secara berkala (mingguan dan bulanan).

2.15.2. Jenis Kerusakan

Jenis kerusakan meter 1 (satu) phasa dan 3 (tiga) phasa yang tidak dapat diklaim adalah:

2.15.2.1. CTT gagal masuk.

2.15.2.2. eks P2TL.

2.15.2.3. MPB pecah.

2.15.2.4. MPB rusak kena benda selain binatang.

2.15.2.5. MPB rusak kena petir.

2.15.2.6. hasil bongkar rampung.

2.15.2.7. hasil migrasi/mutasi PD.

2.15.2.8. terbakar karena tegangan jaringan listrik PLN tidak stabil atau *drop* tegangan.

2.15.2.9. muncul tulisan "INS CEK" dan "GND CEK" (akibat kondisi instalasi listrik milik Konsumen mengalami gangguan/kerusakan/kelainan).

2.15.2.10. karena indikasi penyalahgunaan/P2TL.

2.15.2.11. *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) gagal masuk.

2.15.2.12. karena pemeliharaan/penggantian KRN.

2.15.2.13. kesalahan aktivasi oleh petugas PLN.

2.15.2.14. meter hilang/berpindah tempat.

2.15.2.15. rusak dikarenakan sebab kahar/*Force Majeure.*

2.15.2.16. kerusakan lain hasil verifikasi pabrikan setelah meter rusak tersebut diinvestigasi oleh pabrikan.

2.16. Penangguhan Penyambungan

2.16.1. Penangguhan PB, PD, PS, dan Penyambungan Kembali atas permohonan yang telah dibayar dapat dilakukan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:

2.16.1.1. Terdapat kendala teknik antara lain:

a. tanpa perluasan JTR/JTM namun material belum tersedia;

b. perlu perluasan JTR;

c. perlu perluasan JTM;

d. perlu penambahan gardu distribusi; dan

e. daya mampu pembangkit terbatas.

2.16.1.2. Belum terjangkau instalasi ketenagalistrikan PLN.

2.16.1.3. Terdapat sebab khusus antara lain:

a. bangunan belum ada;

b. instalasi milik Konsumen belum tersedia;

c. konsumen membatalkan permohonan;

d. terdapat ketidaksesuaian atau pelanggaran;

e. kesalahan permohonan; dan

f. belum memiliki SLO.

2.16.2. Dalam hal terjadi penangguhan sebagaimana dimaksud pada butir 2.16.1, PLN wajib menyampaikan pemberitahuan penangguhan penyambungan kepada Konsumen/calon Konsumen dengan mencantumkan penjelasan atas penangguhan tersebut dalam waktu maksimal 5 (hari) kerja sejak ditangguhkan.

2.17. Restitusi Biaya Penyambungan

2.17.1. Pelaksanaan Restitusi Biaya Penyambungan dilakukan atas dasar:

2.17.1.1. Penangguhan penyambungan sebagaimana dimaksud pada butir 2.16; atau

2.17.1.2. Pembatalan permohonan dari Konsumen/calon Konsumen.

2.17.2. Restitusi Biaya Penyambungan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

2.17.2.1. Kosumen/calon Konsumen mengajukan permohonan Restitusi Biaya Penyambungan dengan melampirkan dokumen pendukung, antara lain:

a. bukti pembayaran Biaya Penyambungan atau rekening koran/histori transaksi dari lembaga keuangan yang terdaftar di OJK;

b. NIK sesuai identitas Pemohon;

c. surat kuasa dari Konsumen (bila diwakilkan); dan

d. nomor rekening bank sebagai rekening tujuan Restitusi.

2.17.2.2. Biaya Penyambungan dan Token atas permohonan PB/PD yang telah direstitusi tidak dapat diaktifkan kembali, dan Konsumen/calon Konsumen harus membayar Biaya Penyambungan dan Token saat mengajukan PB/PD kembali.

2.17.2.3. Restitusi Biaya Penyambungan bukan atas permohonan Konsumen/calon Konsumen mengikuti ketentuan yang berlaku.

Revisi ke : 0	Paraf

BAB III
PEMERIKSAAN METER PRABAYAR

3.1. Tujuan dari Pemeriksaan Meter Prabayar sebagai berikut:

3.1.1. Memastikan bahwa penggunaan tenaga listrik oleh Konsumen sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.1.2. Memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Konsumen seperti penggunaan listrik yang berlebihan, atau anomali pada kWh meter.

3.1.3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memperbaiki atau mengganti kWh meter, serta menindaklanjuti ketidaksesuaian atau pelanggaran secara periodik.

3.2. Periode Pemeriksaan Meter Prabayar

3.2.1. Pemeriksaan MPB minimal 1 (satu) kali dalam periode 6 (enam) bulan.

3.2.2. Pemeriksaan MPB oleh petugas dilakukan maksimal selama 9 (sembilan) hari pemeriksaan dimulai dari tanggal 11 (sebelas) setiap bulan.

3.2.3. Frekuensi dan durasi hari pelaksanaan pemeriksaan dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:

3.2.3.1. jumlah populasi Konsumen prabayar pada Unit; dan

3.2.3.2. ketersediaan pagu anggaran pembacaan meter.

3.3. Perencanaan Pembentukan Rute Pemeriksaan Prabayar

3.3.1. Pembentukan RPP

3.3.1.1. RPP harus dibuat secara terpisah dari rute baca meter (RBM) pascabayar.

3.3.1.2. Data koordinat Konsumen Prabayar harus lengkap dan toleransi *error* terhadap akurasi koordinat maksimal 15 (lima belas) meter dari lokasi Konsumen.

3.3.1.3. Pengelompokan Konsumen Prabayar pada satu RPP dibentuk berdasarkan posisi dalam satu gardu yang sama atau berdasarkan letak geografis yang berdekatan.

3.3.1.4. Jumlah Konsumen Prabayar yang akan dilakukan pemeriksaan ditetapkan berdasarkan kerapatan Konsumen.

3.3.1.5. Jumlah hari pemeriksaan Konsumen Prabayar disesuaikan dengan jumlah petugas baca meter eksisting pada Layanan Pascabayar.

3.3.1.6. Penyesuaian RPP dilaksanakan melalui mekanisme penyisipan, pemindahan, penggabungan, serta pemecahan Konsumen ke dalam suatu RPP.

3.3.2. Pembentukan RPP dituangkan dalam bentuk peta RPP dengan manfaat dan fungsi sebagai berikut:

3.3.2.1. memudahkan pelaksanaan Pemeriksaan MPB;

3.3.2.2. memudahkan rotasi/penggantian petugas Pemeriksaan MPB;

3.3.2.3. memudahkan pengawasan petugas Pemeriksaan MPB;

3.3.2.4. memudahkan pembuatan, perbaikan dan pemeliharaan RPP;

3.3.2.5. memudahkan penetapan KDDK baik untuk Konsumen baru maupun perubahan KDDK Konsumen lama; dan

3.3.2.6. meningkatkan layanan purnajual pada Konsumen Prabayar dan performa MPB.

3.3.3. Metode pembentukan peta RPP

Pembentukan peta RPP dapat dibuat dengan menggunakan referensi letak geografis maupun dengan referensi peta jaringan.

3.3.2.1. Pembentukan peta RPP dengan referensi letak geografis dilakukan melalui *clustering* lokasi Konsumen dengan rincian sebagai berikut:

a. KDDK Konsumen, artinya kode sekelompok Konsumen dalam lokasi tertentu;

b. Jarak terpendek, artinya Konsumen yang paling dekat dengan Konsumen yang lain;

c. Koordinat, artinya Konsumen yang memiliki koordinat yang paling dekat Konsumen yang lain;

d. Kemudahan akses, artinya kemudahan petugas mengakses Konsumen untuk diperiksa seperti jalan, gang, jembatan;

e. Waktu tersingkat, artinya waktu terpendek yang dibutuhkan oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan meter;

f. Batas wilayah, artinya batas lokasi pemeriksaan yang dilakukan secara harian;

g. Titik akhir RPP diusahakan selalu mendekati dengan titik awal RPP; dan

h. Pembaruan RPP dilakukan dengan cara menyisipkan KDDK Konsumen baru pada KDDK terdekat dengan Konsumen tersebut dan/atau dengan cara mempertimbangkan huruf a sampai dengan huruf g untuk efektivitas dan efisiensi pemeriksaan meter yang dilakukan setiap bulan.

3.3.2.2. Pembentukan peta RPP dengan referensi peta jaringan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penyusunan RPP dilakukan berdasarkan kelompok SR, kelompok jurusan JTR, dan kelompok gardu;

b. Penyusunan RPP menggunakan urutan referensi sebagai berikut:

1) titik koordinat gardu;

2) titik koordinat jurusan JTR;

3) titik koordinat tiang;

4) titik koordinat seri dan paralel SR; dan

5) titik koordinat APP pada Persil Konsumen.

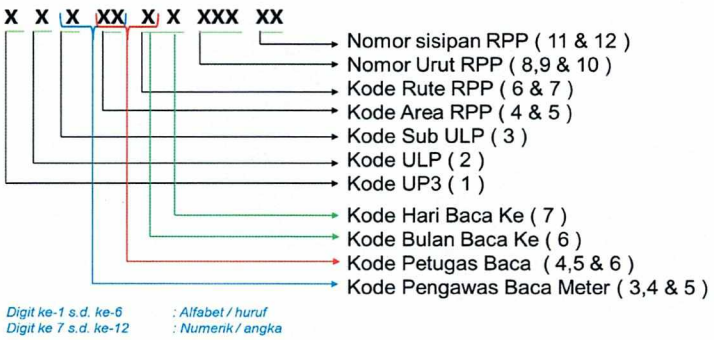
c. Penambahan/penyisipan, pemecahan, penggabungan Konsumen dalam satu RPP dilakukan sesuai dengan pengelompokan pada huruf a;

d. Pembaruan RPP dilakukan sesuai dengan proses pada huruf b dan c setiap bulan; dan

e. Proses pembaruan data untuk RPP dan gardu harus dilakukan secara disiplin setiap ada perubahan pada jaringan distribusi dan penambahan Konsumen dengan memanfaatkan teknologi untuk mengintegrasikan titik koordinat masing-masing Konsumen dengan titik koordinat jaringan distribusi.

3.3.4. Ketentuan penulisan RPP

3.3.4.1. Penulisan RPP terdiri dari 12 (dua belas) digit huruf dan angka dengan ketentuan sebagai berikut:



3.3.4.2. Penulisan RPP sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.4.1 dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PLN.

3.3.5. RPP yang dibentuk harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

3.3.5.1. Urutan pemeriksaan wajib disusun berdasarkan langkah yang paling praktis di lapangan, yaitu urutan Konsumen pada Daftar Pemeriksaan Meter (DPM) harus sama dengan urutan langkah/jalannya petugas di lapangan yang paling praktis dan efisien.

3.3.5.2. Jumlah hari pemeriksaan Konsumen Prabayar disesuaikan dengan ketersediaan petugas dan jumlah RPP.

3.3.6. Untuk menjamin efektivitas pemeriksaan oleh petugas, standar kapasitas periksa untuk 8 (delapan) jam kerja per hari disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.3.6.1. Klasifikasi daerah kepadatan Konsumen berdasarkan pemerintahan yaitu:

a. pusat pemerintahan provinsi;

b. pusat pemerintahan kabupaten/kota;

c. pusat pemerintahan kecamatan/kelurahan; dan

d. desa/perkampungan/pedalaman/tertinggal, terdepan, terluar (3T).

3.3.6.2. Klasifikasi jumlah Konsumen per petugas per hari

a. daerah padat (180-210 Konsumen per hari, rata-rata 1,93 menit per Konsumen) 1,93 menit x 218 = 420 menit.

b. daerah sedang (140-180 Konsumen per hari, rata-rata 2,32 menit per Konsumen) 2,32 menit x 181 = 420 menit.

c. daerah jarang (75-140 Konsumen per hari, rata-rata

2,9 menit per Konsumen) 2,9 menit x 145 = 420 menit.

3.3.6.3. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan kurang dari 75 (tujuh puluh lima) Konsumen per hari dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi berikut ini:

a. moda transportasi petugas menuju lokasi pemeriksaan meter.

b. lamanya waktu pemeriksaan dalam satu hari per periode.

c. jarak antar Konsumen.

3.3.6.4. Klasifikasi jumlah Konsumen per petugas sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.6.2 dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada masing-masing Unit.

3.4. Mekanisme Pemeriksaan Meter Prabayar

3.4.1. Setiap MPB harus dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.

3.4.2. Penyusunan jadwal, penetapan periode, dan penetapan hari pemeriksaan

3.4.2.1. Jadwal pemeriksaan meter disusun sesuai dengan kode kelompok dan RPP sebelum pelaksanaan pemeriksaan meter.

3.4.2.2. Penetapan periode pemeriksaan prabayar merupakan proses pengaturan periode pemeriksaan meter yang akan digunakan, yang dilakukan oleh fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana/Unit Layanan sebelum pelaksanaan jadwal pemeriksaan dimulai.

3.4.2.3. Penetapan hari pemeriksaan prabayar berfungsi untuk melakukan *setting* hari pemeriksaan dan mengirimkan *working order* (WO) kepada petugas.

3.4.3. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1 dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

3.4.3.1. Prioritas utama meliputi:

a. Pemeriksaan SR MPB;

b. Pemeriksaan pembatas daya MPB;

c. Pemeriksaan tutup MPB dan segel; dan

d. Pemeriksaan *display* LCD.

3.4.3.2. Prioritas penunjang meliputi:

a. Pemeriksaan *cover* terminal MPB;

b. Pemeriksaan *keypad* MPB; dan

c. Pemeriksaan *wire grounding* MPB.

3.4.4. Perekaman Data MPB Konsumen Prabayar dilakukan dengan menekan *Short Code* sebagai berikut:

3.4.4.1. *Short Code* prioritas utama meliputi:

a. 08 "*enter*": menampilkan penyebab periksa;

b. 05 "*enter*": menampilkan *Tariff Index* meter;

c. 07 "*enter*": menampilkan daya kontrak x 1,7 (satu koma tujuh) kW;

d. 70 "*enter*": menampilkan jumlah tutup terminal dibuka (kali); dan

e. 71 "*enter*": menampilkan jumlah tutup meter dibuka (kali).

3.4.4.2. *Short Code prioritas* penunjang meliputi:

a. 41 "*enter*": menampilkan tegangan yang memasok meter;

b. 44 "*enter*": menampilkan Arus RMS;

c. 45 "*enter*": menampilkan Arus Phasa;

d. 46 "*enter*": menampilkan Arus Netral;

e. 37 "*enter*": menampilkan sisa kWh;

f. 39 "*enter*": menampilkan faktor daya (*cos Φ*); dan

g. 47 "*enter*": menampilkan daya sesaat (W).

3.4.4.3. Untuk kebutuhan *Short Code* Pemeriksaan MPB mengacu pada ketentuan SPLN yang berlaku dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan PLN.

3.4.5. LBKP disusun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik meliputi:

3.4.5.1. Pemeriksaan SR MPB;

3.4.5.2. Pemeriksaan pembatas daya MPB;

3.4.5.3. Pemeriksaan tutup MPB;

3.4.5.4. Pemeriksaan *display* MPB; dan

3.4.5.5. Hasil input *Short Code*.

3.4.6. DLPPD disusun berdasarkan hasil pemeriksaan data, jumlah penerbitan CTT, dan transaksi pembelian/pemakaian Token

3.4.6.1. DLPPD - pemeriksaan data:

a. Indikasi keterangan *Tamper*;

b. *Setting power limit*;

c. Jumlah kali tutup meter dibuka;

d. Jumlah *clear Tamper*; dan/atau

e. Tegangan efektif MPB dari tegangan nominal.

3.4.6.2. DLPPD – jumlah penerbitan CTT:

a. Dalam 1 (satu) bulan terbit CT;

b. Dalam 2 (dua) s.d 3 (tiga) bulan berturut-turut terbit CT;

c. Dalam 4 (empat) s.d 6 (enam) bulan berturut-turut terbit CT; atau

d. Dalam lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dan seterusnya terbit CT.

3.4.6.3. DLPPD – pembelian/pemakaian Token:

a. Tidak melakukan pembelian Token sejak berlangganan;

b. Tidak melakukan pembelian Token selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, 6 (enam) bulan berturut-turut, 9 (sembilan) bulan berturut, 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih;

c. Pemakaian Token dengan JN di atas 360 (tiga ratus enam puluh) JN;

d. Pemakaian Token dengan nilai Token lebih kecil dari 40 (empat puluh) JN selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

e. Pemakaian Token turun lebih besar 21% (dua puluh satu persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari pemakaian dengan JN 1 (satu) *shift* (240 (dua ratus empat puluh) jam); atau

f. Pemakaian Token naik lebih besar 21% (dua puluh satu persen) sampai 50% (lima puluh persen) dari pemakaian dengan JN 1 (satu) *shift* (240 (dua ratus empat puluh) jam).

3.5. Tindak lanjut Pemeriksaan MPB

3.5.1. Memperbarui RPP yang dilakukan setiap triwulan.

3.5.2. Hasil Pemeriksaan MPB tersebut dibuat dalam bentuk LBKP.

3.5.3. Tindak lanjut LBKP berupa pemeliharaan, pelaksanaan P3TL atau P2TL yang harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan.

3.5.4. Perekaman data MPB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) bulan dengan sistem komunikasi data 2 (dua) arah yang dibuat dalam bentuk laporan DLPPD.

3.5.5. Tindak lanjut DLPPD berupa pemeliharaan, pelaksanaan P3TL atau P2TL yang harus dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.

3.5.6. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan LBKP dan DLPPD sebagaimana dimaksud pada butir 3.5.2 dan 3.5.5, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan P3TL atau P2TL yang berlaku.

3.5.7. Dalam hal terdapat indikasi Konsumen tidak melakukan pembelian Token sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.6.3 huruf a dan huruf b, maka PLN menyarankan agar Konsumen melakukan perubahan layanan dari prabayar ke Layanan Pascabayar.

3.5.8. Prioritas pemeriksaan kelainan MPB berdasarkan kriteria sebagai berikut:

3.5.8.1. berdampak terhadap penjualan;

3.5.8.2. berdampak terhadap layanan; dan/atau

3.5.8.3. berdampak terhadap K3.

3.5.9. Pemeriksaan kelainan MPB dilaksanakan menggunakan aplikasi pembacaan meter terpusat.

Revisi ke : 0	Paraf

BAB IV
PENGELOLAAN METER PRABAYAR

4.1. Pengelolaan Meter Prabayar

4.1.1. Pengelolaan MPB dilakukan secara terpusat, berskala korporat, dengan mengoptimalkan aspek seluruh infrastruktur prabayar (perangkat *hardware, software,* dan *design system*), proses bisnis, dan prosedur yang ada.

4.1.2. Perangkat yang digunakan untuk pengelolaan MPB sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 menggunakan *server* dan *Vending System* yang telah dimiliki PLN serta dikelola oleh Satuan Kerja pada Kantor Pusat yang mengelola fungsi sistem teknologi informasi.

4.1.3. Batasan daya pada MPB untuk tarif S, R, B, I, P, dan L 1 (satu) phasa sampai dengan 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) VA dan 3 (tiga) phasa sampai dengan daya 33.000 (tiga puluh tiga ribu) VA.

4.2. Mekanisme Pengelolaan Meter Prabayar

4.2.1. Penerimaan MPB terdiri dari:

4.2.1.1. penerimaan fisik MPB di fungsi logistik Unit Pelaksana; dan

4.2.1.2. penerimaan *file* NEDISYS di fungsi niaga UID/UIW.

4.2.2. Pelaksanaan penerimaan MPB

4.2.2.1. Penerimaan MPB dari penyedia barang ke Unit Pelaksana termasuk aksesoris MPB, *Optical Probe*, *software*, dan *file* NEDISYS.

4.2.2.2. Fungsi logistik dan fungsi niaga di Unit Pelaksana harus memastikan bahwa perangkat sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.2.1, diterima secara lengkap dan dilakukan verifikasi MPB yang diterima dengan data pada *file* NEDISYS.

4.2.3. Pengelolaan *file* NEDISYS

4.2.3.1. *National Electricity Dispenser Information System* (NEDISYS) dalam STS merupakan *file* yang secara otomatis dihasilkan pada saat pembuatan meter oleh penyedia barang dan harus di-*upload* pada Aplikasi Pelayanan Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Spesifikasi teknis *file* NEDISYS yang meliputi penyeragaman format nama *file*, struktur *file,* dan struktur data maupun konten data yang terkandung di

dalamnya, sehingga dapat menambah informasi yang dibutuhkan PLN.

b. Standar yang digunakan mengacu pada standar yang dikeluarkan STS *association* tentang *specification for information on prepayment meters dispatched*.

c. Standar format nama *file* yang dikirim ke PLN adalah sebagai berikut:

Format nama *file*:

KodePabrikan_YYYYMMDD_HHMMSS_KodeUnit_NoUrutPengiriman.txt

Contoh: 32_20111027_091011_53_066.txt

d. Format *file* sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PLN.

4.2.3.2. Struktur data

a. Struktur data yang digunakan sesuai *dataset* B dari STS *association* dan beberapa konten data disesuaikan dengan kebutuhan PLN, meliputi:

1) *Header record line 1*;

2) *Header record line 2*;

3) *Data record*; dan

4) *Trailer record*.

b. Struktur data sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan PLN.

c. Detail informasi mengenai struktur data tertuang pada Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini.

4.2.4. Daftar kode distribusi/wilayah/anak perusahaan

4.2.4.1. Daftar kode distribusi/wilayah/anak perusahaan untuk kebutuhan informasi pada format nama *file* NEDISYS sebagai berikut:

a. Distribusi Aceh : 11
b. Distribusi Sumatera Utara : 12
c. Distribusi Sumatera Barat : 13
d. Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu : 14
e. Wilayah Bangka Belitung : 16
f. Distribusi Lampung : 17

g. Distribusi Riau dan Kepulauan Riau : 18
h. Distribusi Kalimantan Barat : 21
i. Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah : 22
j. Distribusi Kalimantan Timur dan Utara : 23
k. Distribusi Sulawesi Utara dan Gorontalo : 31
l. Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat : 32
m. Wilayah Maluku dan Maluku Utara : 41
n. Wilayah Papua dan Papua Barat : 42
o. Wilayah Nusa Tenggara Timur : 43
p. Wilayah Nusa Tenggara Barat : 44
q. Distribusi Jawa Timur : 51
r. Distribusi Jawa Tengah : 52
s. Distribusi Jawa Barat : 53
t. Distribusi Jakarta Raya : 54
u. Distribusi Bali : 55
v. Distribusi Banten : 56
w. Distribusi Yogyakarta : 57
x. PLN Batam : 15

4.2.4.2. Daftar kode distribusi/wilayah/anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.4.1 dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PLN.

4.2.5. Kegiatan *file* NEDISYS meliputi:

4.2.5.1. *upload file* NEDISYS;

4.2.5.2. *monitoring file* NEDISYS; dan

4.2.5.3. pembaruan *file* NEDISYS.

4.2.6. *Upload file* NEDISYS

Pelaksanaan *upload file* NEDISYS dilakukan dengan meregistrasikan seluruh MPB yang dikirim oleh penyedia barang ke dalam sistem Aplikasi Pelayanan Konsumen dengan tahapan sebagai berikut:

4.2.6.1. MPB beserta perlengkapannya harus dinyatakan lengkap melalui tahapan verifikasi dan *file* NEDISYS telah tersedia;

4.2.6.2. Fungsi niaga UID/UIW melakukan *upload file* NEDISYS sesuai dengan peruntukan Unit; dan

4.2.6.3. *Upload file* NEDISYS tidak dapat dilakukan lintas UID/UIW.

4.2.7. Monitoring NEDISYS dilakukan untuk:

4.2.7.1. memastikan bahwa *file* NEDISYS berhasil di-*upload*;

4.2.7.2. mengetahui jumlah MPB sudah sesuai dengan yang telah dikirim dari penyedia barang ke Unit Pelaksana; dan

4.2.7.3. mengetahui nomor MPB sudah sesuai dengan yang telah dikirim dari penyedia barang ke Unit Pelaksana.

4.2.8. Pembaruan *file* NEDISYS

4.2.8.1. Pembaruan *file* NEDISYS dilakukan untuk mengubah kode UID/UIW di dalam *file* NEDISYS dari UID/UIW asal ke UID/UIW tujuan agar bisa digunakan dan diproses aktivasi pada UID/UIW tujuan.

4.2.8.2. Pembaruan *file* NEDISYS dilaksanakan oleh UID/UIW asal di sistem Aplikasi Pelayanan Konsumen.

4.2.9. Ketentuan teknis Token MPB

MPB terdiri dari beberapa Token yang di-*create* oleh Generator Token diantaranya sebagai berikut:

4.2.9.1. KCT (KCT-1 dan KCT-2) yang berfungsi untuk melakukan perubahan "*key*" pada MPB, antara lain SGC, KRN, *Tariff Index*.

4.2.9.2. *Management Token* yang berfungsi untuk melakukan pengaturan MPB di luar KCT sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.9.1, terdiri dari:

a. CTT;

b. PLT;

c. CCT; dan

d. ULT.

4.2.9.3. *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) berfungsi untuk menambah *credit* kWh ke dalam MPB.

4.2.9.4. Komponen Pembentuk 20 (dua puluh) digit *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT) terdiri atas:

a. Material Serial Number;

b. SGC;

c. KRN;

d. *Tariff Index*;

e. Tanggal dan jam pembuatan; dan

f. *Units of Electricity* (besaran kWh).

4.2.9.5. TID terdiri 24 (dua puluh empat) *bit field* yang terkandung di dalam Token yang mengidentifikasi tanggal dan waktu dari siklus/generasi Token.

4.2.9.6. Ketentuan detail menggenai TID *rollover* tercantum dalam Format I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini.

4.2.9.7. Acuan terkait *Load Limit/Power Limit* dan *Tariff Index* MPB ditetapkan dengan formula sebagai berikut:

Load Limit/Power Limit = 1,7 (satu koma tujuh) x daya tersambung

Daftar *Load Limit/Power Limit* dan *Tariff Index* MPB dimuat dalam Format II sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini.

4.2.10. Ketentuan Khusus MPB

4.2.10.1. MPB yang batal digunakan, MPB retur dari layanan pemberhentian sebagai Konsumen, atau migrasi ke pascabayar dikembalikan ke gudang dan menjadi ATTB Siaga.

4.2.10.2. MPB yang batal digunakan dan sudah menjadi ATTB Siaga, dapat dikategorikan kedalam kategori khusus dan dapat dimanfaatkan kembali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. MPB dalam kondisi baik dan masih dalam masa garansi pabrikan; dan

b. Stok MPB di Unit Pelaksana/Unit Layanan tidak tersedia.

4.2.10.3. Mekanisme pemanfaatan meter kategori khusus:

a. Fungsi transaksi energi listrik pada Unit Pelaksana mengumpulkan MPB kategori khusus dan mengirimkan surat permohonan re-aktivasi MPB kategori khusus beserta fisik meter ke UID/UIW.

b. Fungsi niaga pada UID/UIW melakukan re-aktivasi MPB melalui Aplikasi Pelayanan Konsumen.

c. MPB yang berhasil maupun yang gagal teraktivasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dikembalikan kepada Unit Pelaksana.

d. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan dengan mengikuti tata laksana gudang, keuangan, niaga dan retail yang berlaku di PLN.

4.2.10.4. PLN Unit tidak boleh menggunakan MPB bekas tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.10.2 dan butir 4.2.10.3.

4.2.11. Pelaksanaan Listrik Prabayar

4.2.11.1. Pelaksanaan Listrik Prabayar di PLN Unit harus memenuhi standar internasional STS atau standar yang dikembangkan oleh PLN.

4.2.11.2. Konsumen Listrik Prabayar tercatat sebagai Konsumen yang memiliki IDPEL dan Nomor Meter.

4.2.12. Pengelolaan Token Listrik Prabayar

4.2.12.1. Setiap permohonan layanan Listrik Prabayar dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar biaya Token listrik dan/atau kewajiban lainnya jika ada.

4.2.12.2. Token listrik terdiri dari Token Perdana dan/atau Token Denominasi pemakaian per tarif daya.

4.2.12.3. Pengelolaan Denominasi Token

a. Nominal Denominasi Token pemakaian untuk Konsumen Prabayar sebagai berikut:

1) Rp. 5.000,-
2) Rp. 20.000,-
3) Rp. 50.000,-
4) Rp. 100.000,-
5) Rp. 150.000,-
6) Rp. 200.000,-
7) Rp. 300.000,-
8) Rp. 400.000,-
9) Rp. 500.000,-
10) Rp. 750.000,-
11) Rp. 1.000.000,-
12) Rp. 1.500.000,-
13) Rp. 2.000.000,-
14) Rp. 5.000.000,-
15) Rp. 10.000.000,-
16) Rp. 30.000.000,- (opsional)

b. Nominal Denominasi Token pemakaian dimaksud pada huruf a dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PLN.

c. Penetapan nominal Token Perdana 1 (satu) phasa dan 3 (tiga) phasa dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata per golongan tarif daya nasional pada periode bulan Januari sampai dengan bulan November serta ditetapkan pada bulan Desember oleh Direktur yang mengelola fungsi niaga untuk diberlakukan pada tahun N+1.

d. Pembelian Token Denominasi dapat dilakukan melalui seluruh kanal pembayaran yang tersedia dengan menggunakan IDPEL atau Nomor Meter sebagai data identitas Konsumen.

4.3. Data Laporan dan Informasi Listrik Prabayar

Data laporan dan informasi Listrik Prabayar, meliputi:

4.3.1. Data laporan pembelian *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT), meliputi:

4.3.1.1. Denominasi Token;

4.3.1.2. Rupiah Token per denominasi;

4.3.1.3. jumlah kali pembelian Token per denominasi;

4.3.1.4. tanggal pembelian Token per denominasi.

4.3.2. Data rekapitulasi mutasi pembelian *Credit Token* (CT)*/Electricity Credit Token* (ECT) antarunit, meliputi:

4.3.2.1. jumlah Konsumen mutasi pembelian Token antarunit;

4.3.2.2. jumlah rupiah mutasi pembelian Token antarunit;

4.3.2.3. jumlah kWh mutasi pembelian Token.

4.3.3. Data laporan penerimaan dan penjualan Token, meliputi:

4.3.3.1. jumlah Token yang terjual pada periode tertentu dalam bentuk kWh;

4.3.3.2. Jumlah Token yang terjual pada periode tertentu dalam bentuk rupiah;

4.3.3.3. Informasi sisa saldo kWh yang dimiliki oleh setiap Konsumen.

4.3.4. Data monitoring penggunaan energi, meliputi:

4.3.4.1. laporan penggunaan energi oleh Konsumen Prabayar dengan periode tertentu dalam bentuk kWh;

4.3.4.2. laporan kebocoran penggunaan energi dalam bentuk kWh.

4.3.5. Data laporan pembelian Token Prabayar setiap Konsumen, meliputi:

4.3.5.1. informasi nominal total pembelian Token bulanan oleh Konsumen;

4.3.5.2. informasi frekuensi pembelian Token bulanan setiap Konsumen.

4.3.6. Data laporan dan historis pembelian setiap Konsumen, meliputi:

4.3.6.1. histori transaksi dan pembelian setiap Konsumen Prabayar;

4.3.6.2. laporan sisa saldo cicilan yang dimiliki oleh setiap Konsumen Prabayar.

4.3.7. Data laporan kinerja sistem MPB, meliputi:

4.3.7.1. laporan hasil pemeriksaan Konsumen Prabayar;

4.3.7.2. laporan progres pemeliharaan atau penggantian meter;

4.3.7.3. daftar Konsumen lebih dari 6 (enam) bulan tidak dilakukan pemeriksaan.

4.3.8. Data laporan pengaduan Konsumen Prabayar, meliputi:

4.3.8.1. laporan keluhan dan waktu penyelesaian;

4.3.8.2. laporan gangguan dan waktu penyelesaian.

4.4. Evaluasi Meter Prabayar

Evaluasi MPB dilakukan untuk mengetahui jenis dan penyebab kerusakan meter guna meningkatkan kualitas serta kinerja MPB meliputi dan tidak terbatas pada:

4.4.1. Jenis kerusakan meter, meliputi:

4.4.1.1. *cover* meter buram/rusak/pecah;

4.4.1.2. *display* meter buram/*blank*/cacat/mati;

4.4.1.3. *display error*/tidak normal;

4.4.1.4. meter di luar kelas akurasi;

4.4.1.5. KCT tidak dapat masuk;

4.4.1.6. kerusakan fisik meter;

4.4.1.7. *keypad* tidak berfungsi (rusak);

4.4.1.8. kredit kWh berkurang tanpa beban;

4.4.1.9. kredit kWh bernilai minus;

4.4.1.10. kredit kWh lebih besar dari kumulatif pembelian Token;

4.4.1.11. kredit kWh menjadi nol (*reset)*;

4.4.1.12. kredit kWh tidak berkurang;

4.4.1.13. meter dianggap boros;

4.4.1.14. meter eks P2TL;

4.4.1.15. meter hilang bukan karena Konsumen;

4.4.1.16. meter terminal netral keluar arus;

4.4.1.17. program pemeliharaan meter (kasus khusus);

4.4.1.18. *rele* rusak;

4.4.1.19. saklar/*switch Tamper* rusak.

4.4.2. Penyebab kerusakan meter, meliputi:

4.4.2.1. gangguan *firmware*;

4.4.2.2. gangguan eksternal;

4.4.2.3. meter rusak karena serangga/hewan;

4.4.2.4. meter rusak karena Bencana Alam;

4.4.2.5. meter terbakar/tersambar petir;

4.4.2.6. permasalahan instalasi milik Konsumen;

4.4.2.7. *port* komunikasi meter rusak;

4.4.2.8. terminal meter terbakar;

4.4.2.9. siklus/generasi Token (KRN);

4.4.2.10. program meter tua.

4.4.3. Evaluasi kerusakan meter

Pelaksanaan evaluasi kerusakan meter dilakukan dengan membuat analisis data meliputi dan tidak terbatas pada:

4.4.3.1. data kerusakan per merek/tipe, per bulan, dan per tahun;

4.4.3.2. tahun produksi meter dibandingkan tahun rusak;

4.4.3.3. tahun pasang dibandingkan tahun rusak.

4.4.4. Pengendalian kualitas MPB

4.4.4.1. Dalam rangka peningkatan kualitas MPB perlu disusun level kualitas MPB yang terpasang pada Konsumen.

4.4.4.2. Level kualitas MPB sebagaimana dimaksud pada butir 4.4.4.1 dibuat setiap tahun pada bulan Desember dengan pengelompokan level kualitas MPB per merek/tipe.

4.4.4.3. Level kualitas MPB yang dihasilkan pada butir 4.4.4.2 digunakan sebagai pedoman mutu dalam proses pengadaan meter berikutnya.

4.4.4.4. Penyusunan level kualitas MPB dilakukan oleh fungsi manajemen rantai pasok bersama fungsi distribusi pada Kantor Pusat.

Revisi ke : 0	Paraf

BAB V
MEKANISME PEMBELIAN TOKEN DENOMINASI DAN TOKEN PERDANA

5.1. Konsumen melakukan pembelian Token Denominasi dan Token Perdana pada kanal pembayaran PLN sebagai pihak penyelenggara penjualan Token Denominasi dan Token Perdana.

5.2. Kanal pembayaran PLN menerima dana pembelian Token Denominasi dan Token Perdana dari Konsumen dan sistem P2APST mencatat transaksi serta menerbitkan Token Denominasi dan Token Perdana sesuai besaran nominal Denominasi Token yang dibeli berupa 20 (dua puluh) digit kode/angka unik.

5.3. Kanal pembayaran PLN memberikan bukti pelunasan dalam bentuk fisik atau elektronik untuk pembelian Token Denominasi dan Token Perdana yang berisi kode Token Denominasi dan Token Perdana sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 kepada Konsumen.

5.4. Konsumen menginput 20 (dua puluh) digit kode/angka unik Token Denominasi dan Token Perdana yang tercantum pada bukti pelunasan tersebut ke MPB.

5.5. Kanal pembayaran PLN melakukan transfer dana hasil penjualan Token Denominasi dan Token Perdana dari Konsumen ke rekening *receipt* PLN.

5.6. Fungsi administrasi Konsumen pada Unit Pelaksana/Unit Layanan melakukan monitoring bulanan atas transaksi pembelian Token Denominasi dan Token Perdana.

BAB VI
PERHITUNGAN PEMAKAIAN LISTRIK PRABAYAR

6.1. Perhitungan pemakaian kWh Listrik Prabayar dilakukan terhadap pembelian Token Denominasi, Token Perdana, dan Token Non Reguler dalam periode 1 (satu) bulan berjalan.

6.2. Syarat dan ketentuan perhitungan pemakaian Listrik Prabayar sebagai berikut:

6.2.1. Jumlah hari dalam setiap bulan dihitung sesuai hari kalender.

6.2.2. Besaran Token Perdana dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

6.2.3. Perhitungan Token dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

6.2.3.1. Dasar penghitungan Token ditetapkan berdasarkan Token yang berasal dari pembelian Token Perdana, Token Denominasi, dan penerbitan Token Non Reguler.

6.2.3.2. Jumlah Token yang dapat diterbitkan bagi setiap golongan Konsumen Prabayar ditetapkan maksimal setara dengan 720 (tujuh ratus dua puluh) JN.

6.2.3.3. Dengan pembatasan penerbitan Token maksimal setara 720 (tujuh ratus dua puluh) JN sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.3.2, maka asumsi pemakaian energi listrik yang digunakan oleh Konsumen senilai penerbitan Token pada periode bulan berjalan.

6.2.4. Nilai rupiah atas pembelian Token Perdana, Token Denominasi, dan penerbitan Token Non Reguler sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.3.1 dicatat sebagai penerimaan di muka rekening Listrik Prabayar, dan selanjutnya nilai pemakaian atas Token tersebut dicatat sebagai pendapatan penjualan tenaga Listrik Prabayar pada akhir periode.

6.2.5. Total perhitungan Token sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.3 dan nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.4, dituangkan dalam laporan penjualan tenaga listrik bulanan.

6.2.6. Simulasi perhitungan pelaporan penjualan tenaga Listrik Prabayar tertuang pada Tabel Simulasi Perhitungan Pelaporan Penjualan Tenaga Listrik Prabayar, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pelaksana ini.

6.2.7. Perlakuan akuntansi untuk perhitungan pemakaian Listrik Prabayar mengacu pada ketentuan akuntansi yang berlaku.

Revisi ke : 0	Paraf

BAB VII
PEMBUKUAN PENDAPATAN DAN PIUTANG

7.1. Pembukuan pendapatan dan Piutang Layanan Prabayar, mengacu pada ketentuan akuntansi yang berlaku.

7.2. Satuan kerja pada Kantor Pusat yang melaksanakan fungsi pengamanan pendapatan melaksanakan pengawasan terhadap Piutang Konsumen Prabayar guna memastikan pemantauan Piutang Konsumen Prabayar yang terdiri dari:

7.2.1. Daftar Piutang lancar antara lain:

7.2.1.1. saldo TS P3TL dan/atau P2TL;

7.2.1.2. saldo TS perpindahan layanan dari pascabayar ke prabayar;

7.2.1.3. saldo angsuran transaksi Biaya Penyambungan PB/PD/PS;

7.2.1.4. saldo angsuran transaksi PRR.

7.2.2. Daftar PRR

Daftar PRR merupakan DPK yang sudah dilakukan aktivasi pemberhentian sebagai Konsumen pada DIL dan bongkar rampung.

Revisi ke : 0	Paraf

BAB VIII
DOKUMENTASI, ADMINISTRASI, DAN PELAPORAN

Segala bentuk dokumentasi, administrasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan layanan Listrik Prabayar dilaksanakan secara digital dan tersistem melalui Aplikasi Pelayanan Konsumen sesuai dengan fungsi masing-masing yang diteruskan sampai dengan PLN Unit.

Revisi ke : 0	Paraf

BAB IX
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pemantauan dan pengawasan terkait penatausahaan Konsumen Prabayar dilakukan secara periodik dan jenjang PLN Kantor Pusat sesuai dengan fungsi masing-masing yang diteruskan sampai dengan PLN Unit.

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO,

DENNY TRIYANTO

DIREKTUR RETAIL DAN NIAGA,

M. FAHRUR ROZY

DIREKTUR DISTRIBUSI,

ARSYADANY G. AKMALAPUTRI

DIREKTUR KEUANGAN,

SULISTYO BIANTORO

Revisi ke : 0	Paraf:

FORMAT I. TID *ROLLOVER* DAN GENERASI TOKEN

TID *Rollover*

a. TID adalah 24 (dua puluh empat) *bit field* yang terkandung di dalam Token yang mengidentifikasi tanggal dan waktu dari generasi Token.

b. TID mewakili menit yang sudah berlalu terhitung sejak "*base date*" ditentukan. *Base date* adalah nilai TID awal mulai dari 0 (nol) yang merepresentasikan tanggal 1-1-1993 jam 00:00.

c. TID berfungsi untuk menentukan apakah Token telah digunakan dalam meter atau belum.

d. Setiap kenaikan dari 24 (dua puluh empat) *bit field* berarti pada suatu waktu nilai Token ID di *Vending* akan berguling (*rollover*) ke nilai 0 (nol).

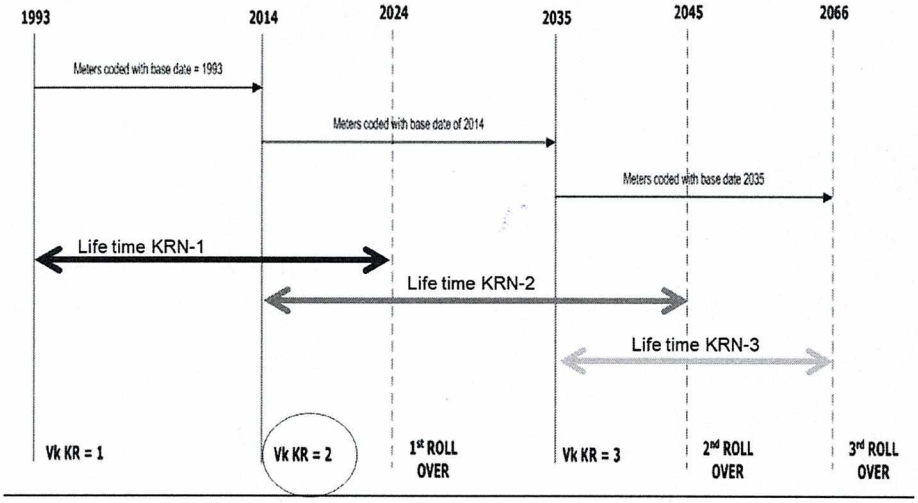
e. Semua MPB akan dipengaruhi oleh TID setelah 24 November 2024 jam 20:15 dan setiap Token yang dihasilkan *Vending* setelah tanggal/jam tersebut akan ditolak oleh meter sebagai Token lama (*Old*/Usang), dengan ilustrasi sebagai berikut:

1. *Vending*: Semua TID akan bergulir (*rollover*) ke nilai 0 (nol) pada tanggal 24 November 2024 jam 20.15

Date of issue:	Time of issue:	Elapsed minutes:	Resultant 24-bit token ID:
1 January 1993	00:00:00	0	0000 0000 0000 0000 0000 0000
1 January 1993	00:01:45	1	0000 0000 0000 0000 0000 0001
25 March 1993	13:55:22	120 355	0000 0001 1101 0110 0010 0011
25 March 1996	13:55:22	1 698 595	0001 1001 1110 1011 0010 0011
1 November 2005	00:01:55	6 749 281	0110 0110 1111 1100 0110 0001
1 December 2015	00:01:05	12 051 361	1011 0111 1110 0011 1010 0001
24 November 2024	20:15:00	16 777 215	1111 1111 1111 1111 1111 1111

2. Meter: Pembelian Token ke 51 (lima puluh satu), 52 (lima puluh dua) dst. akan ditolak meter sebagai Token lama (*Old*/Usang)

NO	TOKEN	TID	NO	TOKEN	TID	NO	TOKEN	TID
1	37063081387826404827	10730062	19	54007168491318347153	10730080	37	14612528844914460081	10800711
2	21027049780989864383	10730063	20	05162360503787747787	10730081	38	52819408878160468950	10800718
3	72474230784664864730	10730064	21	24992148997498941085	10730082	39	49153834544889342962	12904662
4	22034225617865396364	10730065	22	52534626246129983S5	10730083	40	46889044304918396699	12904680
5	43246145829468874620	10730066	23	98237139832901008758	10730084	41	72413038899382494887	12904681
6	38997263784823475744	10730067	24	38201239021693129308	10730085	42	17622462149806940364	12904682
7	71212389467842543552	10730068	25	07842108892726003510	10730086	43	68263432316682215149	14082428
8	09914401853857002110	10730069	26	15983874591277147605	10730087	44	59319308494808976502	14082427
9	08164674216797943107	10730070	27	09120924003984682261	10730088	45	44722584696325447684	14082426
10	63803274705782192025	10730071	28	05468756621004386226	10730089	46	40920851941772499348	14679469
11	49912481547686362540	10730072	29	84224822488894424163	10730090	47	30923131588667209928	14679470
12	84733718706134030669	10730073	30	88349891403132847084	10730091	48	21780843972876889234	14668782
13	01473134727449476069	10730074	31	43214842630523777602	10800496	49	00096693822299846813	14777213
14	32047301914587933598	10730075	32	13292091896084902897	10800495	50	98686744886088744235	14777214
15	00618014420871166434	10730076	33	41871554047713881563	10800497	51	[illegible]	1
16	07944944619362983415	10730077	34	66174481412333026992	10800498	52	[illegible]	16
17	67842406702306270870	10730078	35	65991903980416277156	10800708	53	[illegible]	24
18	11879090447290928049	10730079	36	14033844938779736104	10800709	54	-	



f. Batas akhir penerimaan meter dengan KRN = 1 sampai dengan 31 Desember 2013 dan meter tersebut masih bisa dilayani *Vending* (Generator Token) sampai dengan 24 November 2024.

g. Mulai 1 Januari 2014 semua meter yang diterima PLN harus menggunakan KRN = 2 sampai dengan 31 Desember 2034 dan meter tersebut masih bisa dilayani *Vending* (Generator Token) sampai dengan 24 November 2045.

Generasi Token

GENERASI KE	KRN	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR	TID AWAL	TID AKHIR	JUMLAH		
						HARI	TAHUN	KOMULATIF
1	1	01/01/1993	24/11/2024	000000	FFFFFF	11650	31.9	31.9
2	2	01/01/2014	24/11/2045	000000	FFFFFF	11650	31.9	63.8
3	3	01/01/2035	24/11/2066	000000	FFFFFF	11650	31.9	95.8
4	4	01/01/2056	24/11/2087	000000	FFFFFF	11650	31.9	127.7
5	5	01/01/2077	24/11/2108	000000	FFFFFF	11649	31.9	159.6
6	6	01/01/2098	24/11/2129	000000	FFFFFF	11649	31.9	191.5
7	7	01/01/2119	24/11/2150	000000	FFFFFF	11650	31.9	223.4
8	8	01/01/2140	24/11/2171	000000	FFFFFF	11650	31.9	255.3
9	9	01/01/2161	24/11/2192	000000	FFFFFF	11650	31.9	287.3
10	1	01/01/2182	24/11/2213	000000	FFFFFF	11649	31.9	319.2
dst								

a. Generasi Token ke-1 (satu) sampai ke-9 (sembilan) (287,3 tahun), Token yang di *create* Generator Token bersifat unik.

b. STS menstandardisasi KRN sebanyak 1 (satu) digit (1 (satu) s.d. 9 (sembilan)).

c. Token yang di-*create* mulai pada generasi ke-10 (sepuluh), kembali pada Token-Token pada generasi sebelumnya.

Revisi ke : 0	Paraf

FORMAT II. PENGELOLAAN METER PRABAYAR

a. Spesifikasi NEDISYS *File*

NO	NAME	TYPE	LENGTH	POSITION			DESCRIPTION
1	Manufacturer code	N	2	1	-	2	Kodepabrikan
2	Tandapemisah	S	1	3	-	3	Default = "_"
3	Tanggalpembuatannedisys	N	8	4	-	11	Tanggalpembuatan file nedisys, format CCYYMMDD.
4	Tandapemisah	S	1	12	-	12	Default = "_"
5	Jam pembuatannedisys	N	6	13	-	18	Jam pembuatanfile nedisys, format HHMMSS.
6	Tandapemisah	S	1	19	-	19	Default = "_"
7	Kd.Distr/WilAP	N	2	20	-	21	KodeDistribusi/Wilayah/Anak Perusahaan
8	Tandapemisah	S	1	22	-	22	Default = "_"
9	Nomorurutpengiriman	N	3	23	-	25	Nomorurutpengiriman per PLN Distr/Wil/AP
10	Tandapemisah	S	1	26	-	26	Default = "."
11	Ekstension	A	3	27	-	29	Default = "TXT"

b. Struktur Data

STRUKTUR DATA (HEADER RECORD)

NO	NAME	TYPE	LENGTH	POSITION			DESCRIPTION
1	Section indicator	AN	9	1	-	9	Default = ">>>MC158B".
2	Record type	A	1	10	-	10	Default = "H" (Header).
3	Version	N	3	11	-	13	Default = "021".
4	Manufacturer code	N	2	14	-	15	Kodepabrikan
5	Date	N	8	16	-	23	Tanggalpembuatan file nedisys, format CCYYMMDD.
6	Time	N	6	24	-	29	Jam pembuatanfile nedisys, format HHMMSS.
7	File sequence number	N	3	30	-	32	Nomorurutpengiriman per PLN Distr/Wil/AP
8	Batch number	AN	8	33	-	40	Nomorurut total pengirimankeseluruh PLN

Catatan :

- ***Record Length = 40 digit.***

STRUKTUR DATA (LINE 1 - DATA RECORD)

NO	NAME	TYPE	LENGTH	POSITION			DESCRIPTION
1	Manufacturer code	N	2	1	-	2	Kodepabrikan
2	Meter serial number	N	8	3	-	10	Nomorurut
3	Meter number check digit	N	1	11	-	11	Cek digit
4	Record line number	N	1	12	-	12	Default = "1".
5	Record type	A	1	13	-	13	Default = "N"
6	*Token* Technology	N	2	14	-	15	Default = "02"
7	Algorithm Technology	N	2	16	-	17	Default = "07"
8	Meter accuracy calibration	N	6	18	-	23	Default > "-01.00" atau< "+01.00"
9	Date of manufacture	N	8	24	-	31	Tanggalproduksi, format CCYYMMDD.
10	Dispatch date	N	8	32	-	39	Tanggalkontrak, format CCYYMMDD.
11	Distributor Code	N	4	40	-	43	Default = "0000"
12	Store code	A	5	44	-	48	Default = "00000".
13	Tariff index	N	2	49	-	50	Default TI = "01"
14	Supply group	N	6	51	-	56	Default SGC = "901129"
15	kWh residual credit value	N	8	57	-	64	Default = "+00000.0"
16	kWh credit value for new meters	N	7	65	-	71	Default MPB baru = "00005.0"
17	Load Power Limit	N	6	72	-	77	Default MPB 60A = "013.80" dan 100A = "023.00"

Catatan :

- ***Record Length Line 1 Data Record = 77 digit.***

Revisi ke : 0	Paraf

STRUKTUR DATA (LINE 2 - DATA RECORD)

NO	NAME	TYPE	LENGTH	POSITION			DESCRIPTION
18	Manufacturer code	N	2	1	-	2	Kodepabrikan
19	Meter serial number	N	8	3	-	10	Nomorurut
20	Meter number check digit	N	1	11	-	11	Cek digit
21	Record line number	N	1	12	-	12	Default = "2".
22	Total kWh to date	N	8	13	-	20	Default = "000000.0"
23	Type of repair code	N	4	21	-	24	Default = "000000000000"
24	Type of repair code	N	4	25	-	28	
25	Type of repair code	N	4	29	-	32	
26	Failure mode	A	2	33	-	34	Default = space(2)
27	Failure cause	A	2	35	-	36	Default = space(2)
28	Cost of repair	N	8	37	-	44	Default = "+0000.00"
29	Guarantee period	N	8	45	-	52	Tanggaljatuh tempo garansi, format CCYYMMDD.
30	Manufacturer meter type	AN	15	53	-	67	Type meter = 15 digit
31	Key revision number	N	1	68	-	68	Default = "1", mulai 1 Jan 2014 default = "2"

Catatan :

- **Record Length *Line 2 Data Record* dari 67 digit menjadi 68 digit.**
- **Perubahan *"Manufacturer meter type"* dari 6 digit menjadi 15 digit, diisi sesuai tipe dari masing-masing merk meter.**

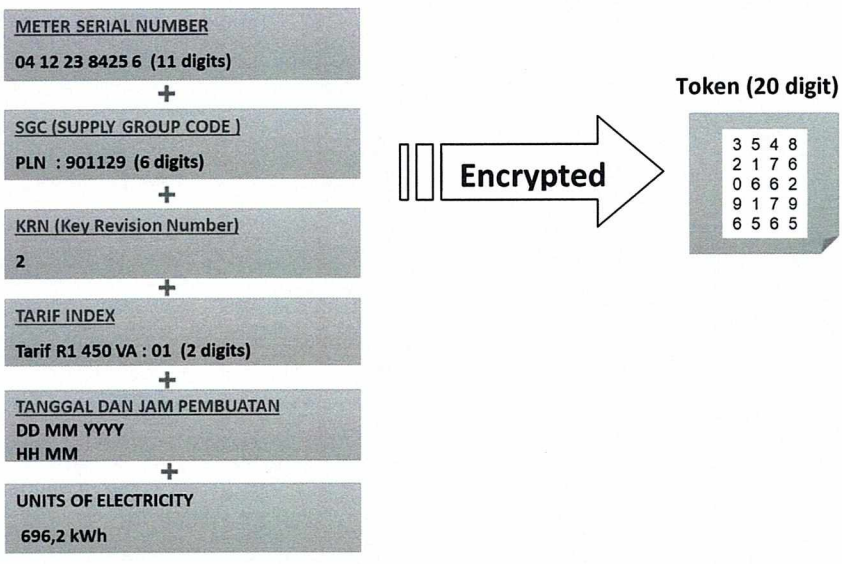
STRUKTUR DATA (TRAILER RECORD)

NO	NAME	TYPE	LENGTH	POSITION			DESCRIPTION
1	Dataset indicator	AN	9	1	-	9	Default = ">>>MC158B".
2	Record type	A	1	10	-	10	Default = "T" (Trailer).
3	Calibration hash total	N	6	11	-	16	Default >= "-99.99" atau<= "+99.99"
4	Number of records	N	4	17	-	20	Jumlahmeter, max 9999 pcs.

Catatan :

- ***Record Length* = 20 digit.**

c. Komponen Pembentuk *Credit Token* (CT)/*Electricity Credit Token* (ECT)



Revisi ke : 0	Paraf

d. *Load Limit/Power Limit* dan *Tarif Index*

No	Daya Tersambung	Sistem 220 / 380 V	Load Limit/Power Limit = 1,7 x Daya Tersambung	Keterangan
	VA	Pembatas (A)	(kW)	
1	450	1 x 2	0,765	1 Phasa
2	900	1 x 4	1,530	1 Phasa
3	1.300	1 x 6	2,210	1 Phasa
4	2.200	1 x 10	3,740	1 Phasa
5	3.500	1 x 16	5,950	1 Phasa
6	4.400	1 x 20	7,480	1 Phasa
7	5.500	1 x 25	9,350	1 Phasa
8	7.700	1 x 35	13,090	1 Phasa
9	6.600	3 x 10	11,220	3 Phasa
10	10.200	3 x 16	17,340	3 Phasa
11	13.200	3 x 20	22,440	3 Phasa
12	16.500	3 x 25	28,050	3 Phasa
13	23.000	3 x 35	39,100	3 Phasa
14	33.000	3 x 50	56,100	3 Phasa

e. Tabel *Tarif Index*

NO	GOLONGAN TARIF	TARIF INDEX	DAYA (VA)
1	R1	1	450
2		2	900
3		3	1300
4		4	2200
5	R2	5	5500
6	R3	6	6601 - 9999999
7	B1	7	450
8		8	900
9		9	1300
10		10	2200
11		11	2201 - 5500
12	I1	12	450
13		13	900
14		14	1300
15		15	2200
16		16	2201 - 5500

NO	GOLONGAN TARIF	TARIF INDEX	DAYA (VA)
17	P1	18	450
18		19	900
19		20	1300
20		21	2200
21		22	2201 - 5500
22	S2	23	450
23		24	900
24		25	1300
25		26	2200
26		27	2201 - 5500
27	L	28	250 - 9999999
28	R3	30	5501 - 6600
29	B2	31	5501 - 200000
30	I1	32	5501 - 14000
31	P1	33	5501 - 200000
32	S2	34	5501 - 200000
33	P3	35	250 - 9999999

Revisi ke : 0	Paraf :

TABEL SIMULASI PERHITUNGAN PELAPORAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK PRABAYAR

Tarif/Daya : R1/2200 VA

kWh Max : 1.584 kWh

Perhitungan Masa Transisi

PEMKWH TOTAL										
THBLLAP	IDPEL	TARIF	DAYA	ASAL_TRANSAKSI	SALDO AWAL	PEMKWH BELI	TOKEN KOMPENSASI/TMP/LAINNYA	PEMKWH BUKU	SALDO AKHIR	KETERANGAN
202501	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	79,30					Perhitungan digunakan selama masa transisi penyesuaian pada Aplikasi
				TRANSAKSI_PREPAID		1.535,60		1.584,00	30,90	
202502	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	30,90					
				TOKEN KOMPENSASI			82,00			
				TRANSAKSI_PREPAID		1.510,40		1.584,00	39,30	
202507	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	39,30					
				TOKEN TMP			40,00			
				TRANSAKSI_PREPAID		629,40		708,70		
202508	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-					
				TRANSAKSI_PREPAID		314,70		314,70		
202509	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-					
				TRANSAKSI_PREPAID		440,60		440,60		
202510	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-					
				TRANSAKSI_PREPAID		767,90		767,90		

Revisi ke : 0	Paraf :

Tarif/Daya : R1/2200 VA

kWh Max : 1.584 kWh

Perhitungan Pada Aplikasi Sudah Disesuaikan

PEMKWH TOTAL									
THBLLAP	IDPEL	TARIF	DAYA	ASAL_TRANSAKSI	SALDO AWAL	PEMKWH BELI	TOKEN KOMPENSASI/TMP/LAINNYA	PEMKWH BUKU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = kWh Max - ((6)+(8))	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	
202501	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	79,30			-	Perhitungan sesuai PERLAK dan perhitungan pada Aplikasi sudah disesuaikan
				TOKEN KOMPENSASI			36,00		
				TRANSAKSI_PREPAID		1.468,70		1.584,00	
202502	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-			-	
				TOKEN TMP			40,00		
				TRANSAKSI_PREPAID		1.544,00		1.584,00	
202507	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-			-	
				TRANSAKSI_PREPAID		629,40		629,40	
202508	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-			-	
				TRANSAKSI_PREPAID		314,70		314,70	
202509	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-			-	
				TRANSAKSI_PREPAID		440,60		440,60	
202510	511010009536	R1	2200	SALDO AWAL TRANSAKSI PREPAID	-			-	
				TRANSAKSI_PREPAID		767,90		767,90	